



## 7.5 PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

### 7.5.1 Penjelasan Pos Pos Laporan Realisasi Anggaran

Dalam rangka Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2020, Pemerintah Kota Makassar dan DPRD Kota Makassar telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2019 tentang APBD Tahun Anggaran 2020 dan Peraturan Walikota Makassar Nomor 89 Tahun 2019 tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2020. Sehubungan dengan upaya penanganan pandemi *COVID-19* pada Tahun Anggaran 2020, maka berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dilakukan penyesuaian anggaran (*refocussing*) dengan melakukan Perubahan atas Peraturan Walikota Makassar Nomor 89 Tahun 2019 tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2020 yang telah disampaikan kepada DPRD Kota Makassar dengan uraian sebagai berikut:

1. Peraturan Walikota Makassar Nomor 20 Tahun 2020 tanggal 15 April 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Makassar Nomor 89 Tahun 2019 tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2020;
2. Peraturan Walikota Makassar Nomor 25 Tahun 2020 tanggal 30 April 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Walikota Makassar Nomor 89 Tahun 2019 tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2020;
3. Peraturan Walikota Makassar Nomor 35 Tahun 2020 tanggal 24 Juni 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Walikota Makassar Nomor 89 Tahun 2019 tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2020;
4. Peraturan Walikota Makassar Nomor 41 Tahun 2020 tanggal 23 Juli 2020 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Walikota Makassar Nomor 89 Tahun 2019 tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2020;
5. Peraturan Walikota Makassar Nomor 49 Tahun 2020 tanggal 18 Agustus 2020 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Walikota Makassar Nomor 89 Tahun 2019 tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2020;
6. Peraturan Walikota Makassar 59 Tahun 2020 tanggal 23 November 2020 tentang Perubahan Keenam atas Peraturan Walikota Makassar Nomor 89 Tahun 2019 tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2020.

Sampai dengan berakhirnya Tahun Anggaran 2020 tidak terdapat Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020, sehingga penyajian Laporan Realisasi Anggaran dalam Laporan Keuangan ini berdasarkan Perubahan atas Peraturan Walikota Makassar Nomor 89 Tahun 2019 tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2020. Hal tersebut mengacu kepada ketentuan Pasal 6 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi dan

Penggunaan APBD, yang menyebutkan bahwa Dalam hal Pemerintah Daerah tidak melakukan perubahan APBD atau penyesuaian alokasi anggaran yang dilaksanakan setelah perubahan APBD, penyesuaian tersebut ditampung dalam laporan realisasi anggaran tahun anggaran berkenaan.

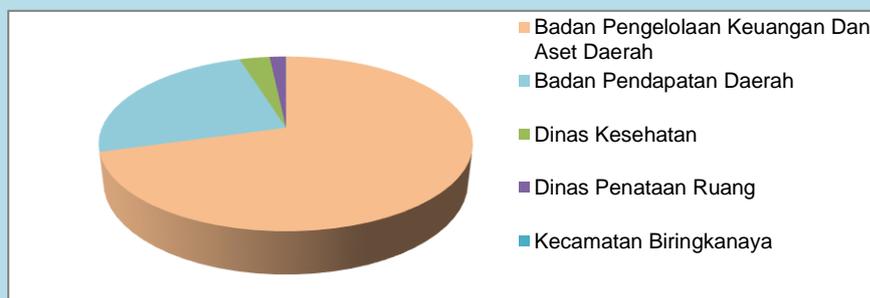
#### 7.5.1.1 Pendapatan

TA 2020	TA 2019
Rp3.323.662.286.602,28	Rp3.666.359.990.154,91

Pemerintah Kota Makassar untuk Tahun Anggaran 2020 menganggarkan Pendapatan sebesar Rp3.469.163.140.080,00 yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp1.144.166.180.881,00, Pendapatan Transfer sebesar Rp2.111.923.144.000,00 dan Lain-Lain Pendapatan yang Sah sebesar Rp213.073.815.199,00. Dari target tersebut Pendapatan Kota Makassar telah direalisasikan sebesar Rp3.323.662.286.602,28 atau sebesar 95,81%. Pencapaian target Pendapatan terdiri dari Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp1.078.328.561.269,15 sedangkan Pendapatan Transfer adalah sebesar Rp2.053.495.450.619,13 dan Lain-lain Pendapatan yang Sah sebesar Rp191.838.274.714,00.

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Makassar merupakan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dengan realisasi pendapatan tertinggi yaitu sebesar Rp2.349.325.794.331,14 atau 69,88% dari total realisasi Pendapatan TA. 2020. Dinas Pariwisata merupakan OPD dengan realisasi pendapatan terendah yaitu sebesar Rp4.020.000,00. OPD dengan realisasi pendapatan TA 2020 disajikan dalam diagram berikut.

**Gambar 1 Diagram OPD dengan Realisasi Pendapatan Tertinggi TA 2020**





PEMERINTAH KOTA MAKASSAR  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

7.5.1.1.1 Pendapatan Asli Daerah

TA 2020	TA 2019
Rp1.078.328.561.269,15	Rp1.303.316.337.553,94

Nilai tersebut merupakan pendapatan murni yang dihasilkan dari pengelolaan sumber daya yang berasal dari Daerah Kota Makassar Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp1.078.328.561.269,15 atau 94,25% dari jumlah anggaran Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp1.144.166.180.881,00. Realisasi tersebut mengalami penurunan sebesar 17,26% atau Rp224.987.776.284,79 dari realisasi TA 2019 yang mencapai nilai sebesar Rp1.303.316.337.553,94. Pendapatan Asli Daerah Kota Makassar meliputi:

7.5.1.1.1.1 Pajak Daerah

TA 2020	TA 2019
Rp864.313.239.515,14	Rp1.067.323.035.833,80

Realisasi Pajak Daerah TA 2020 sebesar Rp864.313.239.515,14 atau 102,08% dari target sebesar Rp846.699.298.871,00. Apabila dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2019, realisasi Pajak Daerah mengalami penurunan sebesar Rp203.009.796.318,66 atau 19,02% dari realisasi Tahun 2019 yang mencapai nilai realisasi sebesar Rp1.067.323.035.833,80.

Realisasi Jenis Pajak Daerah yang dipungut Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar selama Tahun Anggaran 2019 meliputi:

**Tabel 12 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Pajak Daerah TA 2020**

Jenis pajak	Anggaran (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)	%	Realisasi 2019 (Rp)	% Kenaikan/ Penurunan
Pajak Hotel	Rp72.000.000.000,00	Rp55.082.353.413,20	76,50	Rp120.487.321.552,80	(54,28)
Pajak Restoran	Rp111.637.986.374,00	Rp136.496.439.277,94	122,27	Rp210.329.363.125,00	(35,10)
Pajak Hiburan	Rp30.000.000.000,00	Rp14.435.494.763,00	48,12	Rp40.227.621.280,00	(64,12)
Pajak Reklame	Rp41.000.000.000,00	Rp46.606.813.357,00	113,68	Rp53.641.688.525,00	(13,11)
Pajak Penerangan Jalan	Rp209.000.000.000,00	Rp219.727.194.495,00	105,13	Rp222.267.797.099,00	(1,14)
Pajak Pengambilan Tambang Galian Gol. C	Rp0,00	Rp0,00	0,00	Rp0,00	0,00
Pajak Parkir	Rp11.000.000.000,00	Rp9.962.069.183,00	90,56	Rp20.073.510.111,00	(50,37)
Pajak Air Bawah Tanah	Rp3.036.312.497,00	Rp4.428.233.192,00	145,84	Rp3.873.728.024,00	14,31
Pajak Sarang Burung Walet	Rp25.000.000,00	Rp28.539.800,00	114,16	Rp33.713.400,00	(15,35)
Pajak BPHTB	Rp205.000.000.000,00	Rp207.950.696.893,00	101,44	Rp232.812.018.732,00	(10,68)
Pajak Bumi dan Bangunan Sek. P2	Rp164.000.000.000,00	Rp169.595.405.141,00	103,41	Rp163.576.273.985,00	3,68
<b>Jumlah</b>	<b>Rp846.699.298.871,00</b>	<b>Rp864.313.239.515,14</b>	<b>102,08</b>	<b>Rp1.067.323.035.833,80</b>	<b>(19,02)</b>



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

Realisasi Pajak Penerangan Jalan (PPJ) sebesar Rp219.727.194.495,00 terdiri atas PPJ PLN sebesar Rp219.713.980.843,00 dan PPJ Non PLN sebesar Rp13.213.652,00.

7.5.1.1.1.2 Retribusi Daerah

TA 2020	TA 2019
<b>Rp67.204.193.741,00</b>	<b>Rp68.097.361.544,56</b>

Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah Tahun 2020 sebesar Rp67.204.193.741,00 atau mencapai 87,79% dari jumlah yang dianggarkan yaitu sebesar Rp76.551.490.762,00. Dibandingkan dengan Realisasi Tahun 2019 nilai tersebut mengalami penurunan senilai 1,31% atau sebesar Rp893.167.803,56 dari jumlah realisasi Tahun 2019 yang mencapai Rp68.097.361.544,56. Jenis retribusi yang memberikan kontribusi terbesar adalah Retribusi Izin Mendirikan Bangunan yang mencapai 63,41% dari total Retribusi Daerah.

Realisasi Jenis Retribusi yang dipungut Pemerintah Kota Makassar selama Tahun Anggaran 2020 meliputi:

**Tabel 13 Anggaran dan Realisasi Retribusi Daerah TA 2020**

Jenis Retribusi	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi 2019 (Rp)	% Kenaikan/ Penurunan
Retribusi Pelayanan Kesehatan	Rp4.544.050.000,00	Rp1.124.662.600,00	24,74	1.666.298.300,00	(32,51)
Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	Rp8.524.886.000,00	Rp13.901.195.000,00	163,07	18.252.930.000,00	(23,84)
Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat	Rp280.000.000,00	Rp217.900.000,00	77,82	595.350.000,00	(63,40)
Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	Rp1.015.279.870,00	Rp138.416.500,00	13,63	1.539.892.350,00	(91,01)
Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran	Rp165.000.000,00	Rp326.950.000,00	198,15	564.501.500,00	(42,08)
Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	Rp118.260.000,00	Rp360.765.000,00	305,06	360.670.000,00	0,03
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	Rp5.393.614.892,00	Rp6.216.768.231,00	115,26	8.247.881.985,56	(24,63)
Retribusi Tempat Pelelangan	Rp1.050.000.000,00	Rp1.179.640.000,00	112,35	1.466.181.000,00	(19,54)
Retribusi Penyeberangan di Air	Rp25.000.000,00	Rp46.536.000,00	186,14	50.000.000,00	(6,93)
Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	Rp55.000.000.000,00	Rp42.612.458.910,00	77,48	33.403.802.709,00	27,57
Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol	Rp400.000.000,00	Rp1.040.000.000,00	260,00	1.305.000.000,00	(20,31)
Retribusi Izin Trayek	Rp35.400.000,00	Rp38.901.500,00	109,89	44.169.800,00	(11,93)
Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing	Rp0,00	Rp0,00	0,00	600.683.900,00	(100,00)
<b>Jumlah</b>	<b>Rp76.551.490.762,00</b>	<b>Rp67.204.193.741,00</b>	<b>87,78</b>	<b>68.097.361.544,56</b>	<b>(1,31)</b>



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

<b>7.5.1.1.1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan</b>	<b>TA 2020</b>	<b>TA 2019</b>
	<b>Rp31.875.688.803,93</b>	<b>Rp18.225.557.959,00</b>

Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Tahun 2020 merupakan bagi hasil atas penyertaan modal/deviden yang terealisasi sebesar Rp31.875.688.803,93 atau 51,40% dari jumlah yang dianggarkan sebesar Rp62.009.352.589,00. Apabila dibandingkan dengan Tahun 2019 nilai tersebut mengalami peningkatan 74,90% atau sebesar Rp13.650.130.844,93 dari realisasi Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp18.225.557.959,00. Pendapatan ini sepenuhnya dikelola oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Makassar. Realisasi Bagi hasil atas Penyertaan Modal dapat dilihat dalam tabel berikut.

**Tabel 14 Realisasi Bagi Hasil TA 2020 dan 2019**

Nama Perusahaan	Anggaran (Rp)	Nilai Bagi Hasil TA 2020 (Rp)	Nilai Bagi Hasil TA 2019 (Rp)	Trend %	% Kenaikan/ Penurunan
<b>Perusahaan Daerah</b>					
PDAM	Rp37.339.645.000,00	Rp9.318.929.626,00	Rp9.920.229.777,00	(6,06)	(6,06)
BPR	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	-	
PD. Pasar Makassar Raya	Rp1.200.000.000,00	Rp711.064.839,93	Rp802.874.497,00	(11,43)	(11,44)
PD. RPH	Rp200.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	-	
PD. Parkir	Rp1.500.000.000,00	Rp443.631.541,00	Rp762.993.082,00	(41,85)	(41,86)
PD. Terminal	Rp317.576.000,00	Rp0,00	Rp0,00	-	
<b>Perusahaan Pemerintah</b>					
PT. Bank SULSEL	Rp21.211.070.589,00	Rp21.211.070.589,00	Rp6.367.217.139,00	233,12	233,13
PT. Kima Makassar	Rp135.461.000,00	Rp190.992.208,00	Rp240.243.464,00	(20,50)	
<b>Perusahaan Swasta</b>					
PT. GMTD	Rp105.600.000,00	Rp0,00	Rp132.000.000,00	(100)	(100,00)
<b>Jumlah</b>	<b>Rp62.009.352.589,00</b>	<b>Rp31.875.688.803,93</b>	<b>Rp18.225.557.959,00</b>	<b>74,89</b>	<b>74,90</b>

<b>7.5.1.1.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah</b>	<b>TA 2020</b>	<b>TA 2019</b>
	<b>Rp114.935.439.209,08</b>	<b>Rp149.670.382.216,58</b>

Merupakan pendapatan daerah yang sah diluar Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, meliputi hasil penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan, pendapatan BLUD, pendapatan UPTD, penerimaan jasa giro, pendapatan bunga deposito, tuntutan ganti kerugian daerah, pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan, pendapatan dari pengembalian, dana kapitasi JKN pada FKTP, hasil penjualan aset lainnya dan hasil penerimaan pihak ketiga. Nilai tersebut direalisasikan sebesar Rp114.935.439.209,08 atau 72,33% dari jumlah yang dianggarkan sebesar Rp158.906.038.659,00. Jika dibandingkan dengan Tahun 2019, nilai tersebut mengalami penurunan 23,21% atau sebesar Rp34.734.943.007,50 dari realisasi Tahun 2019 sebesar Rp149.670.382.216,58.



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

Rincian Anggaran dan Realisasi Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah tergambar pada OPD berikut:

**Tabel 15. Rincian Lain-Lain PAD yang Sah per OPD**

No	Nama OPD	Anggaran	Realisasi
1	DINAS KESEHATAN	Rp103.182.387.111,00	Rp78.284.922.256,00
2	DINAS PENATAAN RUANG	Rp2.250.000.000,00	Rp2.377.458.690,00
3	DINAS PERTANAHAN	Rp500.000.000,00	Rp284.066.226,00
4	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	Rp350.000.000,00	Rp357.317.410,00
5	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	Rp52.623.651.548,00	Rp33.631.674.627,08
<b>Jumlah</b>		<b>Rp158.906.038.659,00</b>	<b>Rp114.935.439.209,08</b>

Dari realisasi Lain-Lain PAD yang Sah tersebut terdapat reklasifikasi atas pengakuan belanja tak terduga dari lain PAD yang sah ke belanja sebesar Rp38.484.705.567,00 yaitu pada Dinas Kesehatan sebesar Rp16.679.797.620,00, Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebesar Rp2.983.510.215,00 dan Dinas Sosial sebesar Rp18.821.397.732,00.

Adapun rincian rincian Lain-lain PAD yang Sah per jenis pendapatan tergambar pada tabel berikut:

**Tabel 16. Rincian Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah**

Jenis Lain-Lain PAD yang Sah	Anggaran (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)	%	Realisasi 2019	% Kenaikan/ Penurunan
Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan	Rp845.934.000,00	Rp284.066.226,00	33,58	Rp1.174.538.353,00	(75,81)
Penerimaan Jasa Giro	Rp15.282.888.560,00	Rp17.694.744.250,00	115,78	Rp10.960.634.284,00	61,44
Pendapatan Bunga Deposito	Rp0,00	Rp0,00	0,00	Rp10.602.739.712,00	(100,00)
Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	Rp5.000.000.000,00	Rp5.807.370.503,43	116,15	Rp8.920.303.573,84	(34,90)
Pendapatan Denda Atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	Rp273.000.000,00	Rp244.592.403,00	89,59	Rp8.689.141.819,92	(97,19)
Pendapatan Dari Pengembalian	Rp31.681.828.988,00	Rp8.702.704.470,65	27,47	Rp11.771.713.316,82	(26,07)
Lain-lain PAD yang sah lainnya	Rp40.000.000,00	Rp1.182.263.000,00	2955,66	Rp0,00	
Pendapatan Jasa Layanan Umum BLUD	Rp77.987.315.111,00	Rp54.463.552.156,00	69,84	Rp68.377.098.977,00	(20,35)
Pendapatan UPTD Bank Sampah	Rp350.000.000,00	Rp357.317.410,00	102,09	Rp1.008.047.630,00	(64,55)
Dana Kapitasi JKN pada FKTP	Rp25.195.072.000,00	Rp23.821.370.100,00	94,55	Rp28.166.164.550,00	(15,43)
Hasil Penerimaan Pihak Ketiga	Rp2.250.000.000,00	Rp2.377.458.690,00	105,66	Rp0,00	
<b>Jumlah</b>	<b>Rp158.906.038.659,00</b>	<b>Rp114.935.439.209,08</b>	<b>72,33</b>	<b>Rp149.670.382.216,58</b>	<b>(23,21)</b>

**7.5.1.1.2 Pendapatan Transfer**

TA 2020	TA 2019
<b>Rp2.053.495.450.619,13</b>	<b>Rp2.212.978.024.448,97</b>

Pendapatan Transfer TA 2020 sebesar Rp2.053.495.450.619,13 merupakan realisasi transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan, Transfer Pemerintah Pusat Lainnya, dan Transfer Pemerintah Provinsi sebesar 97,23% dari jumlah yang dianggarkan sebesar Rp2.111.923.144.000,00. Dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2019,



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

nilai ini mengalami penurunan 7,21% atau sebesar Rp159.482.573.829,84 dari jumlah realisasi tahun 2019 yang mencapai nilai sebesar Rp2.212.978.024.448,97. Anggaran dan Realisasi Pendapatan Transfer tersaji dalam tabel berikut.

**Tabel 17 Realisasi Pendapatan Transfer TA 2020**

Jenis Pendapatan Transfer	Anggaran (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)	%	Realisasi 2019 (Rp)	% Kenaikan/ Penurunan
Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan	Rp1.712.913.222.000,00	Rp1.676.121.523.287,00	97,83	1.824.567.795.448,00	(8,14)
Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya	Rp74.623.320.000,00	Rp74.623.320.000,00	100,00	31.415.999.000,00	137,53
Transfer Pemerintah Propinsi	Rp324.386.602.000,00	Rp302.750.607.332,13	93,33	356.994.230.000,97	(15,19)
<b>Jumlah</b>	<b>Rp2.111.923.144.000,00</b>	<b>Rp2.053.495.450.619,13</b>	<b>97,23</b>	<b>2.212.978.024.448,97</b>	<b>(7,21)</b>

7.5.1.1.2.1 Pendapatan Transfer – Dana Perimbangan	TA 2020	TA 2019
	<b>Rp1.676.121.523.287,00</b>	<b>Rp1.824.567.795.448,00</b>

Realisasi Dana Perimbangan Tahun 2020 sebesar Rp1.676.121.523.287,00 merupakan realisasi transfer dari pemerintah pusat selama TA 2020 yang mencapai 97,85% dari jumlah yang dianggarkan sebesar Rp1.712.913.222.000,00. Apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun 2019 nilai tersebut mengalami penurunan 8,14% atau sebesar Rp148.446.272.161,00 dari realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan Tahun 2019 yang mencapai nilai sebesar Rp1.824.567.795.448,00, dengan rincian Dana Perimbangan sebagai berikut:

a. Bagi Hasil Pajak

Bagi Hasil Pajak dari Pusat mencapai nilai Rp113.943.184.588,00 atau sebesar 110,50% dari jumlah yang dianggarkan sebesar Rp103.114.706.000,00, bila dibandingkan dengan Tahun 2019 maka nilai tersebut mengalami peningkatan sebesar 55,98% atau sebesar Rp40.893.394.725,00, dari jumlah yang dicapai selama Tahun 2019 sebesar Rp73.049.789.863,00.

Secara lebih rinci dana Bagi Hasil Pajak Tahun 2020 dapat dilihat dalam tabel berikut.



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

**Tabel 18 Realisasi Bagi Hasil Pajak TA 2020**

Bagi Hasil Pajak	Anggaran (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)	%	Realisasi 2019 (Rp)	% Kenaikan / Penurunan
Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan	Rp5.690.248.000,00	Rp5.346.193.736,00	93,95	5.830.596.597,00	(8,31)
Bagi Hasil dari Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 25 dan Pasal 29 wajib pajak orang Pribadi dalam negeri dan PPh Pasal 21	Rp97.424.458.000,00	Rp108.596.990.852,00	111,47	67.219.193.266,00	61,56
<b>Jumlah</b>	<b>Rp103.114.706.000,00</b>	<b>Rp113.943.184.588,00</b>	<b>110,50</b>	<b>73.049.789.863,00</b>	<b>55,98</b>

b. Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam

Dana tersebut telah direalisasikan sebesar Rp4.842.507.754,00, atau sebesar 110,17% dari jumlah yang dianggarkan sebesar Rp4.395.504.000,00. Realisasi tersebut mengalami peningkatan sebesar 4,74% atau sebesar Rp219.272.224,00 dari jumlah yang terealisasi selama Tahun 2019 sebesar Rp4.623.235.530,00. Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam dapat dirinci dalam tabel berikut.

**Tabel 19 Realisasi Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/  
Sumber Daya Alam TA 2020**

Jenis Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	Anggaran (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)	%	Realisasi 2019 (Rp)	% Kenaikan /Penurunan
Bagi Hasil dari Provisi Sumber Daya Hutan	Rp48.744.000,00	Rp29.090.400,00	59,68	Rp17.858.400,00	62,89
Bagi Hasil dari Iuran Eksplorasi dan Iuran Eksplotasi (Royalti)	Rp2.635.908.000,00	Rp3.735.851.609,00	141,73	Rp2.509.285.800,00	48,88
Bagi Hasil dari Pungutan Hasil Perikanan	Rp1.418.361.000,00	Rp788.276.289,00	55,58	Rp590.155.800,00	33,57
Bagi Hasil dari Pertambangan Minyak Bumi	Rp7.000,00	Rp91.656,00	1309,37	Rp123.530,00	(25,80)
Bagi Hasil dari Pertambangan Gas Bumi	Rp292.484.000,00	Rp289.197.800,00	98,88	Rp1.505.812.000,00	(80,79)
<b>Jumlah</b>	<b>Rp4.395.504.000,00</b>	<b>Rp4.842.507.754,00</b>	<b>110,17</b>	<b>Rp4.623.235.530,00</b>	<b>4,74</b>

c. Dana Alokasi Umum

Dana Alokasi Umum selama Tahun Anggaran 2020 terealisasi sebesar Rp1.249.647.391.000,00 atau 97,14% dari jumlah yang dianggarkan sebesar Rp1.286.419.315.000,00. Bila dibandingkan dengan Tahun 2019 nilai tersebut mengalami penurunan sebesar 9,39% atau sebesar Rp129.500.809.000,00 dari realisasi Dana Alokasi Umum Tahun 2019 sebesar Rp1.379.148.200.000,00.



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

d. Dana Alokasi Khusus

Dana ini direalisasikan sebesar Rp307.688.439.945,00 atau 96,46% dari jumlah yang dianggarkan sebesar Rp318.983.697.000,00. Bila dibandingkan dengan Tahun 2019, realisasi Tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 16,33% atau sebesar Rp60.058.130.110,00 dari realisasi Dana Alokasi Khusus Tahun 2019 sebesar Rp367.746.570.055,00.

**Tabel 20. Rincian Realisasi Dana Alokasi Khusus TA. 2020**

Dana Alokasi Khusus	Anggaran	Realisasi 2020	%	Realisasi 2019	% Kenaikan/ Penurunan
<b>Dana Alokasi Khusus fisik</b>					
DAK Bidang Infrastruktur Air Minum	Rp0,00	Rp0,00	0,00	Rp0,00	0,00
DAK Bidang Infrastruktur Sanitasi	Rp0,00	Rp0,00	0,00	Rp3.483.042.000,00	(100,00)
DAK Bidang Keluarga Berencana	Rp783.439.000,00	Rp665.744.000,00	84,98	Rp0,00	0,00
DAK Bidang Perumahan dan Kawasan Pemukiman	Rp1.349.993.000,00	Rp1.349.924.500,00	99,99	Rp3.255.983.800,00	(58,54)
DAK Bidang Kesehatan	Rp18.093.173.000,00	Rp14.084.639.448,00	77,85	Rp55.865.595.034,00	(74,79)
DAK Bidang Kelautan dan Perikanan	Rp1.052.986.000,00	Rp972.508.800,00	92,36	Rp704.551.500,00	38,03
DAK Bidang Lingkungan Hidup	Rp0,00	Rp0,00	0,00	Rp393.077.712,00	(100,00)
DAK Bidang Perdagangan	Rp0,00	Rp0,00	0,00	Rp930.719.300,00	(100,00)
DAK Bidang Pendidikan	Rp35.562.389.000,00	Rp25.235.645.686,00	70,96	Rp36.478.343.300,00	(30,82)
DAK Bidang Pertanian	Rp0,00	Rp0,00	0,00	Rp1.186.044.226,00	(100,00)
DAK Bidang Keselamatan Transportasi Darat	Rp0,00	Rp0,00	0,00	Rp0,00	0,00
DAK Bidang Infrastruktur Jalan	Rp0,00	Rp0,00	0,00	Rp11.107.219.000,00	(100,00)
<b>Jumlah Dana Alokasi Khusus fisik</b>	<b>Rp56.841.980.000,00</b>	<b>Rp42.308.462.434,00</b>	<b>74,43</b>	<b>Rp113.404.575.872,00</b>	<b>(62,69)</b>
<b>Dana Alokasi Khusus non fisik</b>					
Tunjangan Profesi Guru PNSD	Rp195.319.001.000,00	Rp195.319.001.000,00	100,00	Rp201.039.994.300,00	(2,85)
Tambahan Penghasilan Guru PNSD	Rp1.386.300.000,00	Rp1.386.300.000,00	100,00	Rp1.968.000.000,00	(29,56)
Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini	Rp13.833.000.000,00	Rp11.376.000.000,00	82,24	Rp9.967.200.000,00	14,13
Bantuan Operasional Kesehatan	Rp35.960.616.000,00	Rp43.483.229.574,00	120,92	Rp25.169.450.027,00	72,76
Akreditasi Puskesmas	Rp1.559.790.000,00	Rp1.559.790.000,00	100,00	Rp1.793.940.000,00	(13,05)
Akreditasi Rumah Sakit	Rp0,00	Rp0,00	0,00	Rp203.196.000,00	(100,00)
Jaminan Persalinan	Rp954.683.000,00	Rp954.683.000,00	100,00	Rp2.698.000.000,00	(64,62)
Bantuan Operasional Keluarga Berencana	Rp2.619.360.000,00	Rp2.335.730.865,00	89,17	Rp2.942.958.592,00	(20,63)
Pelayanan Administrasi Kependudukan	Rp4.642.300.000,00	Rp4.528.812.572,00	97,56	Rp3.931.955.264,00	15,18
Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan	Rp4.437.600.000,00	Rp3.021.800.000,00	68,10	Rp4.027.300.000,00	(24,97)
Bantuan Operasional Penyelenggaraan Museum dan Taman Budaya	Rp700.000.000,00	Rp685.563.500,00	97,94	Rp600.000.000,00	14,26
Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi dan UKM	Rp417.358.000,00	Rp417.358.000,00	100,00	Rp0,00	0,00
Dana Pelayanan Kepariwisata	Rp255.870.000,00	Rp255.870.000,00	100,00	Rp0,00	0,00
Pengawasan Obat dan Makanan	Rp55.839.000,00	Rp55.839.000,00	100,00	Rp0,00	0,00
<b>jumlah Dana Alokasi Khusus non fisik</b>	<b>Rp262.141.717.000,00</b>	<b>Rp265.379.977.511,00</b>	<b>101,24</b>	<b>Rp254.341.994.183,00</b>	<b>4,34</b>
<b>TOTAL</b>	<b>Rp318.983.697.000,00</b>	<b>Rp307.688.439.945,00</b>	<b>96,46</b>	<b>Rp367.746.570.055,00</b>	<b>(16,33)</b>



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

7.5.1.1.2.2 <b>Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya</b>	TA 2020	TA 2019
		<b>Rp74.623.320.000,00</b>

Nilai tersebut merupakan realisasi transfer dari Pemerintah Pusat yang terdiri dari Dana Penyesuaian dan Dana Otonomi Khusus. Dana ini direalisasikan sebesar Rp74.623.320.000,00 atau 100,00% dari jumlah yang dianggarkan sebesar Rp74.623.320.000,00. Bila dibandingkan dengan Tahun 2019, realisasi Tahun 2020 mengalami peningkatan sebesar 137,53% atau sebesar Rp43.207.321.000,00 dari realisasi Dana Alokasi Khusus Tahun 2019 sebesar Rp31.415.999.000,00.

7.5.1.1.2.3 <b>Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi</b>	TA 2020	TA 2019
		<b>Rp302.750.607.332,13</b>

Nilai tersebut merupakan realisasi transfer dari Pemerintah Provinsi yang terdiri dari Pendapatan Bagi Hasil Pajak. Nilai tersebut tercapai sebesar Rp302.750.607.332,13 atau 93,33% dari jumlah yang dianggarkan sebesar Rp324.386.602.000,00. Realisasi transfer Pemerintah Provinsi selama Tahun 2020 secara rinci dapat dilihat dalam tabel berikut.

**Tabel 21 Realisasi Transfer Pemerintah Provinsi TA 2020**

Jenis Penerimaan Bagi Hasil Pajak	Anggaran (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)	Rasio (%)	Realisasi 2019 (Rp)	% Kenaikan/ Penurunan
Pajak Kendaraan Bermotor	Rp110.000.000.000,00	Rp120.577.459.771,00	109,62	Rp139.337.978.287,00	(13,46)
BBN Kendaraan Bermotor	Rp95.000.000.000,00	Rp58.100.209.411,00	61,16	Rp79.389.816.046,00	(26,82)
Pajak Bahan Bakar Kend. Bermotor	Rp78.000.000.000,00	Rp72.063.497.550,00	92,39	Rp86.444.758.920,00	(16,64)
Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan ABT/AP	Rp1.200.000.000,00	Rp995.779.570,00	82,98	Rp953.981.109,00	4,38
Pajak Cukai Hasil Tembakau	Rp186.602.000,00	Rp178.658.130,00	95,74	Rp237.685.691,00	(24,83)
Pajak Rokok	Rp40.000.000.000,00	Rp50.835.002.900,13	127,09	Rp50.630.009.947,97	0,40
<b>Jumlah</b>	<b>Rp324.386.602.000,00</b>	<b>Rp302.750.607.332,13</b>	<b>93,33</b>	<b>Rp356.994.230.000,97</b>	<b>(15,19)</b>

Bila dibandingkan dengan realisasi Tahun 2019 maka nilai ini mengalami penurunan 15,19% atau sebesar Rp54.243.622.668,84 dari jumlah realisasi Tahun 2019 sebesar Rp356.994.230.000,97.



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

7.5.1.1.3 Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	TA 2020	TA 2019
	<b>Rp191.838.274.714,00</b>	<b>Rp150.065.628.152,00</b>

Lain-lain Pendapatan yang Sah untuk Tahun 2020 terealisasi sebesar Rp191.838.274.714,00 atau 90,03% dari jumlah yang dianggarkan sebesar Rp213.073.815.199,00. Nilai ini mengalami peningkatan 27,84% atau sebesar Rp41.772.646.562,00 dari realisasi Tahun 2019 sebesar Rp150.065.628.152,00. Lain-lain Pendapatan yang Sah terdiri atas Pendapatan Hibah dan Pendapatan Lainnya.

7.5.1.1.3.1 Pendapatan Hibah	TA 2020	TA 2019
	<b>Rp165.818.274.714,00</b>	<b>Rp132.401.628.152,00</b>

Pendapatan Hibah Tahun 2020 terealisasi sebesar Rp165.818.274.714,00 atau 89,49% dari jumlah yang dianggarkan sebesar Rp185.288.087.199,00. Nilai ini mengalami peningkatan 25,24% atau sebesar Rp33.416.646.562,00 dari realisasi Tahun 2019 sebesar Rp132.401.628.152,00. Pendapatan Hibah merupakan pendapatan dari Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Sebesar Rp140.812.979.714,00, Pendapatan hibah Pariwisata dalam rangka Pemulihan Ekonomi Nasional (Tahap I) sebesar Rp24.446.295.000,00, Pendapatan hibah sanitasi kepada Pemerintah daerah sebesar Rp508.000.000,00 serta hibah dari masyarakat dan lembaga dalam rangka Penanganan Pandemi Covid – 19 Sebesar Rp.51.000.000,00.

7.5.1.1.3.2 Bantuan Keuangan	TA 2020	TA 2019
	<b>Rp26.020.000.000,00</b>	<b>Rp0,00</b>

Bantuan Keuangan pada Tahun Anggaran 2020 merupakan bantuan keuangan dari Pemerintah Propinsi yang terealisasi sebesar Rp26.020.000.000,00 atau 93,65% dari jumlah yang dianggarkan sebesar Rp27.785.728.000,00.

7.5.1.1.3.3 Pendapatan Lainnya	TA 2020	TA 2019
	<b>Rp0,00</b>	<b>Rp17.664.000.000,00</b>

Tidak terdapat realisasi Pendapatan Lainnya di Tahun Anggaran 2020, sementara di Tahun Anggaran 2019 terealisasi sebesar Rp17.664.000.000,00.



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

7.5.1.2 Belanja

TA 2020	TA 2019
<b>Rp2.968.616.107.772,68</b>	<b>Rp3.549.123.220.749,30</b>

Pada Tahun Anggaran 2020 Belanja Daerah dianggarkan sebesar Rp3.706.941.283.170,52 sampai dengan pelaksanaan akhir Tahun 2020 dapat direalisasi sebesar Rp2.968.616.107.772,68 atau 80,08%. Realisasi Belanja TA 2020 mengalami penurunan 15,24% atau sebesar Rp540.852.511.409,62 dibandingkan realisasi Belanja TA 2019 sebesar Rp3.548.006.636.749,30.

7.5.1.2.1 Belanja Operasi

TA 2020	TA 2019
<b>Rp2.594.304.738.544,81</b>	<b>Rp2.663.769.704.066,50</b>

Realisasi Belanja Operasi Tahun 2020 adalah sebesar Rp2.594.304.738.544,81 atau 87,37% dari rencana Belanja Tahun 2020 sebesar Rp2.969.436.720.232,00. Nilai ini mengalami penurunan 2,61% atau sebesar Rp69.464.965.521,69 dari realisasi Tahun 2019 sebesar Rp2.663.769.704.066,50. Belanja Operasi terdiri dari:

**Tabel 22 Belanja Operasi Tahun Anggaran 2020 dan 2019**

Jenis Belanja Operasi	Anggaran 2020 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)	%	TA 2019 (Rp)	% Kenaikan/ Penurunan
Belanja Pegawai	Rp1.293.973.502.732,00	Rp1.218.380.837.302,00	94,16	Rp1.212.306.922.225,00	Rp6.073.915.077,00
Belanja Barang	Rp1.449.723.717.301,00	Rp1.188.897.135.242,81	82,01	Rp1.393.040.321.841,50	(Rp204.143.186.598,69)
Belanja Bunga	Rp0,00	Rp0,00	0,00	Rp0,00	Rp0,00
Belanja Subsidi	Rp0,00	Rp0,00	0,00	Rp0,00	Rp0,00
Belanja Hibah	Rp224.244.500.199,00	Rp185.766.766.000,00	82,84	Rp55.552.460.000,00	Rp130.214.306.000,00
Belanja Bantuan Sosial	Rp1.495.000.000,00	Rp1.260.000.000,00	84,28	Rp2.870.000.000,00	(Rp1.610.000.000,00)
<b>Jumlah</b>	<b>Rp2.969.436.720.232,00</b>	<b>Rp2.594.304.738.544,81</b>	<b>87,37</b>	<b>Rp2.663.769.704.066,50</b>	<b>(Rp69.464.965.521,69)</b>

7.5.1.2.1.1 Belanja Pegawai

TA 2020	TA 2019
<b>Rp1.218.380.837.302,00</b>	<b>Rp1.212.306.922.225,00</b>

Belanja Pegawai direncanakan sebesar Rp1.293.973.502.732,00 dan terealisasi sebesar Rp1.218.380.837.302,00 atau 94,16%. Realisasi Belanja Pegawai mengalami peningkatan 0,50% atau sebesar Rp6.073.915.077,00 dari realisasi Belanja Pegawai TA 2019 sebesar Rp1.212.306.922.225,00. Anggaran dan realisasi Belanja Pegawai secara rinci dapat dilihat pada tabel di bawah ini.



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

**Tabel 23 Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai TA 2020**

No	Kelompok Belanja	Anggaran 2020 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)	Rasio %	Realisasi 2019 (Rp)	% Kenaikan/ Penurunan
1	Gaji dan Tunjangan	Rp967.193.710.932,00	Rp925.480.306.104,00	95,69	Rp971.818.886.353,00	(4,77)
2	Belanja Honor Pegawai	Rp17.645.060.000,00	Rp16.119.965.000,00	91,36	Rp167.434.048.500,00	(90,37)
3	Tambahan Penghasilan PNS	Rp236.401.222.000,00	Rp213.891.890.799,00	90,48	Rp365.400,00	58.536.268,58
4	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH/WKDH	Rp10.420.000.000,00	Rp10.292.972.153,00	98,78	Rp10.646.615.000,00	(3,32)
5	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	Rp2.871.848.000,00	Rp1.706.099.326,00	59,41	Rp1.326.500.000,00	28,62
6	Insentif Pemungutan Pajak Daerah	Rp27.091.349.000,00	Rp25.467.765.545,00	94,01	Rp32.900.734.190,00	(22,59)
7	Belanja Pegawai Dana BOS	Rp1.824.993.000,00	Rp931.847.500,00	51,06	Rp1.433.147.442,00	(34,98)
8	Belanja Pegawai BLUD	Rp30.525.319.800,00	Rp24.489.990.875,00	80,23	Rp26.746.625.340,00	(8,44)
	<b>JUMLAH</b>	<b>Rp1.293.973.502.732,00</b>	<b>Rp1.218.380.837.302,00</b>	<b>94,16</b>	<b>Rp1.212.306.922.225,00</b>	<b>0,50</b>

7.5.1.2.1.2 Belanja Barang	TA 2020	TA 2019
	<b>Rp1.188.897.135.242,81</b>	<b>Rp1.393.040.321.841,50</b>

Realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun 2020 adalah sebesar Rp1.188.897.135.242,81 atau sebesar 82,01% dari jumlah yang dianggarkan yaitu sebesar Rp1.449.723.717.301,00. Apabila dibandingkan dengan Realisasi Tahun 2019 nilai tersebut mengalami penurunan 14,65% atau sebesar Rp204.143.186.598,69 dari jumlah realisasi Tahun 2019 yang mencapai Rp1.393.040.321.841,50. Rincian anggaran dan realisasi Belanja Barang dan Jasa tersaji dalam tabel berikut.

**Tabel 24 Anggaran dan Realisasi Belanja Barang TA 2020**

No	Kelompok Belanja	Anggaran 2020 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)	Rasio %	Realisasi 2019 (Rp)	% Kenaikan/ Penurunan
1	Belanja Bahan Habis Pakai	Rp72.356.790.095,00	Rp53.666.539.765,00	74,17	Rp91.034.631.342,00	(41,05)
2	Belanja Bahan/Material	Rp47.459.385.784,00	Rp36.272.012.918,50	76,43	Rp51.935.933.857,00	(30,16)
3	Belanja Jasa Kantor	Rp705.020.612.872,00	Rp624.315.261.130,45	88,55	Rp626.112.332.979,00	(0,29)
4	Belanja Premi Asuransi	Rp97.722.000.050,00	Rp83.354.165.604,86	85,3	Rp67.911.291.726,00	22,74
5	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	Rp87.938.330.249,00	Rp68.972.713.463,00	78,43	Rp75.063.383.092,50	(8,11)
6	Belanja cetak dan Penggandaan	Rp21.177.782.825,00	Rp15.033.812.019,00	70,99	Rp33.361.473.673,00	(54,94)
7	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Par kir	Rp4.033.300.000,00	Rp2.099.255.916,00	52,05	Rp5.247.424.367,00	(59,99)
8	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	Rp885.850.000,00	Rp649.862.000,00	73,36	Rp769.808.617,00	(15,58)
9	Belanja Sewa Alat Berat	Rp0,00	Rp0,00	0,00	Rp0,00	0,00
10	Belanja Sewa perlengkapan dan Peralatan Kantor	Rp9.703.646.000,00	Rp7.965.258.400,00	82,09	Rp18.290.465.380,00	(56,45)
11	Belanja Makanan dan Minuman	Rp63.667.564.000,00	Rp45.635.237.985,00	71,68	Rp100.470.752.317,00	(54,58)
12	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	Rp5.727.460.000,00	Rp4.626.571.000,00	80,78	Rp8.478.774.000,00	(45,43)



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

No	Kelompok Belanja	Anggaran 2020 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)	Rasio %	Realisasi 2019 (Rp)	% Kenaikan/ Penurunan
13	Belanja Pakaian Kerja	Rp6.378.575.250,00	Rp5.187.949.470,00	81,33	Rp7.414.175.400,00	(30,03)
14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	Rp2.161.448.000,00	Rp1.664.322.500,00	77	Rp5.370.573.000,00	(69,01)
15	Belanja Perjalanan Dinas	Rp67.158.673.374,00	Rp40.385.958.433,00	60,14	Rp73.108.354.905,00	(44,76)
16	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	Rp150.000.000,00	Rp80.000.000,00	53,33	Rp200.000.000,00	(60,00)
17	Belanja Kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis	Rp4.044.450.000,00	Rp3.052.701.900,00	75,48	Rp10.038.753.302,00	(69,59)
18	Belanja Pemeliharaan	Rp19.012.672.039,00	Rp15.069.981.308,00	79,26	Rp20.496.064.553,00	(26,47)
19	Belanja Jasa Konsultasi	Rp12.794.441.515,00	Rp7.175.023.245,00	56,08	Rp10.263.203.855,00	(30,09)
20	Belanja Barang yang akan dijual Kepada Masyarakat	Rp3.093.000.000,00	Rp0,00	0,00	Rp852.000.000,00	(100,00)
21	Belanja Barang yang akan diserahkan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	Rp19.870.248.600,00	Rp3.169.925.698,00	15,95	Rp11.455.483.877,00	(72,33)
22	Belanja Hibah Barang dan Jasa yang akan diserahkan Kepada Masyarakat	Rp3.920.370.000,00	Rp3.312.419.420,00	84,49	Rp0,00	100,00
23	Belanja Bantuan Sosial yang akan diserahkan Kepada Masyarakat	Rp113.120.000,00	Rp0,00	0,00	Rp2.567.900.000,00	(100,00)
24	Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	Rp553.400.000,00	Rp333.400.000,00	60,25	Rp0,00	100,00
25	Belanja Barang dan Jasa Dana Kesehatan Gratis	Rp18.241.518.500,00	Rp10.429.836.517,00	57,18	Rp5.320.454.805,00	96,03
26	Belanja Barang dan Jasa Dana Bantuan Operasi Kesehatan	Rp26.627.033.000,00	Rp23.210.539.935,00	87,17	Rp24.781.170.800,00	(6,34)
27	Belanja Barang dan Jasa Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional	Rp8.724.600.300,00	Rp8.087.162.759,00	92,69	Rp10.378.856.825,00	(22,08)
28	Belanja Barang dan Jasa Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	Rp98.420.492.760,00	Rp94.718.979.055,00	96,24	Rp90.497.071.575,00	4,67
29	Belanja Barang dan Jasa BLUD	Rp42.766.952.088,00	Rp30.428.244.801,00	71,15	Rp41.619.987.594,00	(26,89)
	<b>JUMLAH</b>	<b>Rp1.449.723.717.301,00</b>	<b>Rp1.188.897.135.242,81</b>	<b>82,01</b>	<b>Rp1.393.040.321.841,50</b>	<b>(14,65)</b>

**7.5.1.2.1.3 Belanja Bunga**

TA 2020	TA 2019
<b>Rp0,00</b>	<b>Rp0,00</b>

Pada Tahun Anggaran 2020, Belanja Bunga tidak dianggarkan dalam anggaran pokok maupun anggaran perubahan, dan tidak terealisasi sampai dengan akhir Desember 2020.

**7.5.1.2.1.4 Belanja Subsidi**

TA 2020	TA 2019
<b>Rp0,00</b>	<b>Rp0,00</b>

Pada Tahun Anggaran 2020, Belanja Subsidi tidak dianggarkan dalam anggaran pokok maupun anggaran perubahan, dan tidak terealisasi sampai dengan akhir Desember 2020.



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

**7.5.1.2.1.5 Belanja Hibah**

TA 2020	TA 2019
<b>Rp185.766.766.000,0</b>	<b>Rp55.552.460.000,0</b>
<b>0</b>	<b>0</b>

Belanja Hibah Pemerintah Kota Makassar TA 2020 dianggarkan pada PPKD dan OPD sebesar Rp224.244.500.199,00 yang direalisasikan sebesar Rp185.766.766.000,00 atau 82,84%. Apabila dibandingkan dengan Realisasi Tahun 2019 Realisasi Belanja Hibah mengalami peningkatan 234,40% atau sebesar Rp130.214.306.000,00 dari realisasi TA 2019 sebesar Rp55.552.460.000,00.

Hibah tersebut terdiri dari realisasi Belanja Hibah berupa uang dan berupa barang. Belanja Hibah berupa uang antara lain Belanja Hibah Kepada Badan/Lembaga/Organisasi, Belanja Hibah kepada masyarakat/perorangan dan belanja Bantuan Operasional PAUD. Rincian anggaran dan realisasi Belanja Hibah berupa uang dan barang disajikan dalam tabel berikut.

**Tabel 25 Anggaran dan Realisasi Belanja Hibah TA 2020**

No	Jenis Belanja Hibah	Anggaran (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)	Rasio %	Realisasi 2019 (Rp)	% Kenaikan/ Penurunan
1	Belanja Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi	Rp204.188.900.199,00	Rp168.975.166.000,00	82,75	Rp37.486.960.000,00	350,76
2	Belanja Hibah Kepada Kelompok/Anggota Masyarakat	Rp1.785.000.000,00	Rp1.482.500.000,00	83,05	Rp5.905.000.000,00	(74,89)
3	BOP PAUD Masyarakat	Rp13.833.000.000,00	Rp11.347.800.000,00	82,03	Rp9.549.000.000,00	18,84
4	Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan	Rp4.437.600.000,00	Rp3.961.300.000,00	89,27	Rp2.611.500.000,00	51,69
<b>Jumlah</b>		<b>Rp224.244.500.199,00</b>	<b>Rp185.766.766.000,00</b>	<b>82,84</b>	<b>Rp55.552.460.000,00</b>	<b>234,40</b>

**7.5.1.2.1.6 Belanja Bantuan Sosial**

TA 2020	TA 2019
<b>Rp1.260.000.000,00</b>	<b>Rp2.870.000.000,00</b>

Belanja Bantuan Sosial Pemerintah Kota Makassar TA 2020 dianggarkan sebesar Rp1.495.000.000,00 yang direalisasikan sebesar Rp1.260.000.000,00 atau 84,28%. Apabila dibandingkan dengan Realisasi Tahun 2019 Realisasi Belanja Bantuan Sosial mengalami penurunan 56,10% atau sebesar Rp1.610.000.000,00 dari realisasi TA 2019 sebesar Rp2.870.000.000,00.

**7.5.1.2.2 Belanja Modal**

TA 2020	TA 2019
<b>Rp291.202.740.534,87</b>	<b>Rp884.202.784.682,80</b>

Belanja Modal Tahun Anggaran 2020 dianggarkan sebesar Rp601.990.423.167,91 dan terealisasi sebesar Rp291.202.740.534,87 atau 48,37%. Apabila dibandingkan dengan Realisasi Belanja Modal TA 2019



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

7.5.1.2.2.1 Belanja Tanah

TA 2020	TA 2019
Rp0,00	Rp1.234.902.530,00

Realisasi Belanja Modal mengalami penurunan 67,07% atau sebesar Rp593.000.044.147,93 dari realisasi Belanja Modal TA 2019 sebesar Rp884.202.784.682,80 dengan perincian sebagai berikut.

Tabel 26 Belanja Modal TA 2020 dan 2019

Jenis Belanja Modal	Anggaran TA.2020	TA 2020 (Rp)	%	TA 2019 (Rp)	% Kenaikan/ Penurunan
Belanja Tanah	Rp19.689.500.000,00	Rp0,00	0,00	Rp1.234.902.530,00	(100,00)
Belanja Peralatan dan Mesin	Rp91.410.695.510,00	Rp59.823.460.691,87	65,44	Rp268.978.239.337,00	(77,76)
Belanja Gedung dan Bangunan	Rp152.707.238.381,00	Rp65.093.458.020,00	42,63	Rp171.879.634.304,00	62,13
Belanja Jalan Irigasi, dan Jaringan	Rp284.750.800.488,00	Rp113.433.294.536,00	39,84	Rp416.511.780.032,80	(72,77)
Belanja Aset Tetap Lainnya	Rp52.649.188.788,91	Rp52.537.877.891,00	99,79	Rp24.613.620.479,00	113,45
Belanja Aset Lainnya	Rp783.000.000,00	Rp314.649.396,00	40,19	Rp984.608.000,00	(68,04)
<b>Jumlah</b>	<b>Rp601.990.423.167,91</b>	<b>Rp291.202.740.534,87</b>	<b>48,37</b>	<b>Rp884.202.784.682,80</b>	<b>(67,07)</b>

Belanja Tanah TA 2020 dianggarkan sebesar Rp19.689.500.000,00 dan tidak terealisasi sampai dengan akhir Desember 2020.

Tabel 27 Belanja Tanah TA 2020 dan 2019

Jenis Belanja	Anggaran TA.2020	TA 2020 (Rp)	%	TA 2019 (Rp)	% Kenaikan/ Penurunan
Belanja Modal Pengadaan Tanah Kantor	Rp19.689.500.000,000	Rp0,00	0,00	951.834.300,00	(100,00)
Belanja modal Pengadaan tanah sarana umum rumah potong hewan	Rp0,00	Rp0,00	0,00	Rp0,00	0,00
Belanja Modal Pengadaan Tanah sarana umum tempat pembuangan akhir sampah	Rp0,00	Rp0,00	0,00	Rp0,00	0,00
Belanja Modal Pengadaan Tanah Lainnya	Rp0,00	Rp0,00	0,00	Rp283.068.230,00	(100,00)
<b>Jumlah</b>	<b>Rp19.689.500.000,000</b>	<b>Rp0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Rp1.234.902.530,00</b>	<b>(100,00)</b>

7.5.1.2.2.2 Belanja Peralatan dan Mesin

TA 2020	TA 2019
Rp59.823.460.691,87	Rp268.978.239.337,00

Belanja Peralatan dan Mesin Tahun Anggaran 2020 dianggarkan sebesar Rp91.410.695.510,00 dan terealisasi sebesar Rp59.823.460.691,87 atau 65,44%. Apabila dibandingkan dengan Realisasi Belanja Peralatan dan Mesin TA 2019. Realisasi Belanja Peralatan dan Mesin mengalami penurunan sebesar 77,76% atau sebesar Rp209.154.778.645,13 dari realisasi Belanja Peralatan dan Mesin TA 2019 sebesar Rp268.978.239.337,00.



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

**Tabel 28 Belanja Peralatan dan Mesin TA 2020 dan 2019**

Jenis Belanja	Anggaran TA.2020	Realisasi TA 2020 (Rp)	%	Realisasi TA 2019 (Rp)	% Kenaikan/ Penurunan
Belanja modal Pengadaan Alat-Alat Berat Darat	Rp16.517.366.000,00	Rp16.438.390.000,00	99,52	Rp38.177.194.000,00	(56,94)
Belanja modal Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor	Rp22.771.350.000,00	Rp18.112.226.300,00	79,54	Rp49.518.572.100,00	(63,42)
Belanja modal Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Rp0,00	Rp0,00	0,00	Rp160.964.000,00	(100,00)
Belanja modal Pengadaan Alat Angkut Apung Bermotor	Rp4.357.046.500,00	Rp54.000.000,00	1,24	Rp0,00	100,00
Belanja modal Pengadaan Alat Angkut Apung Tidak Bermotor	Rp0,00	Rp0,00	0,00	Rp0,00	0,00
Belanja modal Pengadaan Alat Bengkel Bermesin	Rp1.566.250.125,00	Rp965.539.500,00	61,65	Rp1.271.852.520,00	(24,08)
Belanja modal Pengadaan Alat-alat Pengolahan Perikanan, Pertanian dan Peternakan	Rp155.000.000,00	Rp154.000.000,00	99,35	Rp155.900.000,00	(1,22)
Belanja modal Pengadaan Alat Ukur	Rp23.925.000,00	Rp22.464.000,00	93,89	Rp5.021.380.800,00	(99,55)
Belanja modal Pengadaan Alat Pengolahan	Rp0,00	Rp0,00	0,00	Rp0,00	0,00
Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga	Rp0,00	Rp0,00	0,00	Rp0,00	0,00
Belanja modal Pengadaan Komputer	Rp10.917.194.111,00	Rp8.858.037.651,00	81,14	Rp23.176.933.398,00	(61,78)
Belanja modal Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	Rp0,00	Rp0,00	0,00	Rp0,00	0,00
Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	Rp1.172.328.750,00	Rp388.291.450,00	33,12	Rp1.215.537.638,00	(68,06)
Belanja Modal Perlengkapan Kantor	Rp4.246.977.078,00	Rp2.500.083.748,00	58,87	Rp5.467.152.114,00	(54,27)
Belanja Modal Pengadaan Mebeleur	Rp1.809.766.795,00	Rp1.327.165.900,00	73,33	Rp9.318.113.100,00	(85,76)
Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur	Rp650.395.063,00	Rp584.344.000,00	89,84	Rp928.098.683,00	(37,04)
Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruang Rumah Tangga	Rp177.877.750,00	Rp174.575.500,00	98,14	Rp648.951.866,00	(73,10)
Belanja modal Pengadaan Alat Studio	Rp1.655.447.110,00	Rp1.000.680.000,00	60,45	Rp8.878.278.700,00	(88,73)
Belanja modal Pengadaan Alat Komunikasi	Rp626.887.500,00	Rp496.451.000,00	79,19	Rp1.220.984.940,00	(59,34)
Belanja modal Pengadaan Alat Kedokteran	Rp19.776.874.736,00	Rp6.296.474.847,87	31,84	Rp74.941.013.989,00	(91,60)
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Laboratorium	Rp109.200.000,00	Rp109.186.000,00	99,99	Rp7.283.951.677,00	(98,50)
Belanja Modal Pengadaan Penerangan Jalan, Taman dan Hutan Kota	Rp4.901.593.742,00	Rp1.454.852.745,00	29,68	Rp26.174.618.887,00	(94,44)
Belanja Modal BLUD	Rp4.695.041.400,00	Rp0,00	0,00	Rp0,00	0,00
Belanja modal Pengadaan Alat Kesehatan	Rp0,00	Rp0,00	0,00	Rp0,00	0,00
Belanja Modal Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan rumah Tangga	Rp604.279.000,00	Rp147.831.250,00	24,46	Rp253.829.400,00	(41,76)
Belanja modal Pengadaan Unit-Unit Laboratorium	Rp0,00	Rp0,00	0,00	Rp0,00	0,00
Belanja modal Pengadaan Alat Peraga/Praktek Sekolah	Rp0,00	Rp0,00	0,00	Rp0,00	0,00
Belanja modal Pengadaan Persenjataan Non Senjata Api	Rp0,00	Rp0,00	0,00	Rp847.589.811,00	(100,00)
Belanja Modal Pengadaan Rambu-rambu	Rp0,00	Rp0,00	0,00	Rp0,00	0,00



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

Jenis Belanja	Anggaran TA.2020	Realisasi TA 2020 (Rp)	%	Realisasi TA 2019 (Rp)	% Kenaikan/ Penurunan
Belanja modal Pengadaan Alat Keamanan dan Perlindungan	Rp598.456.250,00	Rp556.470.800,00	92,98	Rp0,00	100,00
Belanja Modal Pengadaan Papan Reklame	Rp0,00	Rp0,00	0,00	Rp1.697.038.300,00	(100,00)
Belanja Modal Pengadaan Plat Hibauan	Rp272.690.000,00	Rp182.396.000,00	66,89	Rp232.323.000,00	(21,49)
Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS		Rp0,00	0,00	Rp12.387.960.414,00	(100,00)
<b>Jumlah</b>	<b>Rp91.410.695.510,00</b>	<b>Rp59.823.460.691,87</b>	<b>65,44</b>	<b>Rp268.978.239.337,00</b>	<b>(77,76)</b>

<b>7.5.1.2.2.3 Belanja Gedung dan Bangunan</b>	<b>TA 2020</b>	<b>TA 2019</b>
	<b>Rp65.093.458.020,00</b>	<b>Rp171.879.634.304,00</b>

Belanja Gedung dan Bangunan Tahun Anggaran 2020 dianggarkan sebesar Rp152.707.238.381,00 dan terealisasi sebesar Rp65.093.458.020,00 atau 42,63%. Realisasi Belanja Gedung dan Bangunan TA 2020 mengalami penurunan 62,13% atau sebesar Rp106.786.176.284,00 dibandingkan dengan realisasi Belanja Gedung dan Bangunan TA 2019 sebesar Rp171.879.634.304,00.

**Tabel 29 Belanja Gedung dan Bangunan TA 2020 dan 2019**

Jenis Belanja	Anggaran TA. 2020	TA 2020 (Rp)	%	TA 2019 (Rp)	% Kenaikan/ Penurunan
Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	15.964.093.500,00	Rp3.706.982.537,00	23,22	Rp162.274.373.400,00	(97,72)
Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Tinggal	Rp0,00	Rp0,00	0,00	Rp316.579.000,00	(100,00)
Belanja modal Pengadaan konstruksi tempat berjualan/pasar	2.455.850.000,00	Rp43.725.000,00	1,78	Rp45.925.000,00	(4,79)
Belanja modal Pengadaan konstruksi gedung sekolah	82.384.965.131,00	Rp59.917.004.661,00	72,73	Rp0,00	100,00
Belanja modal Pengadaan konstruksi gedung puskesmas/RS	6.778.585.500,00	Rp86.281.400,00	1,27	Rp0,00	100,00
Belanja modal Pengadaan bangunan tidak permanen		Rp0,00	0,00	Rp1.238.832.380,00	(100,00)
Belanja modal Pengadaan konstruksi fasilitas umum dan sosial	20.484.632.000,00	Rp469.260.392,00	2,29	Rp0,00	100,00
Belanja modal Pengadaan konstruksi gerbang	434.500.000,00	Rp223.230.000,00	51,38	Rp0,00	100,00
Belanja modal Pengadaan konstruksi areal pemakaman	-	Rp0,00	0,00	Rp167.310.811,00	(100,00)
Belanja modal Pengadaan konstruksi tempat labuh/parkir	20.000.000,00	Rp0,00	0,00	Rp0,00	0,00
Belanja modal Pengadaan Bangunan Flat/Rumah Susun	235.000.000,00	Rp0,00	0,00	Rp0,00	00,00
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Patok tanah/wilayah		Rp0,00	0,00	Rp358.753.850,00	(100,00)
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Sarana dan Prasarana Olahraga	2.821.500.000,00	Rp104.379.000,00	3,70	Rp4.359.389.500,00	(97,61)
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Taman dan Jalur	4.442.162.250,00	Rp396.795.030,00	8,93	Rp48.500.000,00	718,13



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

Jenis Belanja	Anggaran TA. 2020	TA 2020 (Rp)	%	TA 2019 (Rp)	% Kenaikan/ Penurunan
Belanja modal Pengadaan konstruksi sarana dan prasarana kepariwisataan	15.099.950.000,00	Rp145.800.000,00	0,97	Rp1.614.323.500,00	(90,97)
Belanja Modal Gedung dan Bangunan BOS	1.942.698.850,00	Rp0,00	0,00	Rp1.455.646.863,00	(100,00)
<b>Jumlah</b>	<b>152.707.238.381,00</b>	<b>Rp65.093.458.020,00</b>	<b>42,63</b>	<b>Rp171.879.634.304,00</b>	<b>(62,13)</b>

7.5.1.2.2.4 Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	TA 2020	TA 2019
	<b>Rp113.433.294.536,00</b>	<b>Rp416.511.780.032,80</b>

Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan Tahun Anggaran 2020 dianggarkan sebesar Rp284.750.800.488,00 dan terealisasi sebesar Rp113.433.294.536,00 atau 39,84%. Realisasi Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan TA 2020 mengalami penurunan 72,77% atau sebesar Rp303.078.485.496,80 dibandingkan realisasi Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan TA 2019 sebesar Rp416.511.780.032,80.

**Tabel 30 Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan TA 2020 dan 2019**

Jenis Belanja	Anggaran TA. 2020	Realisasi TA 2020 (Rp)	%	TA 2019 (Rp)	% Kenaikan/ Penurunan
Belanja modal Pengadaan Jalan	233.294.798.659,00	Rp87.954.815.541,00	37,70	Rp326.708.451.468,00	(73,08)
Belanja modal Pengadaan Jembatan	3.022.877.388,00	Rp198.450.000,00	6,56	Rp2.437.048.940,00	(91,86)
Belanja modal Pengadaan Bangunan Air Irigasi	48.168.914.441,00	Rp25.022.280.995,00	51,95	Rp87.324.644.624,80	(71,35)
Belanja modal Pengadaan Jaringan Air Minum	Rp0,00	Rp0,00	0,00	Rp0,00	0,00
Belanja modal Pengadaan Instalasi Listrik dan Telepon	150.000.000,00	Rp148.000.000,00	98,67	Rp0,00	100,00
Belanja modal Pengadaan Jalan, Taman	4.901.593.742,00	Rp109.748.000,00	2,24	Rp41.635.000,00	163,60
<b>Jumlah</b>	<b>284.750.800.488,00</b>	<b>Rp113.433.294.536,00</b>	<b>39,84</b>	<b>Rp416.511.780.032,80</b>	<b>(72,77)</b>

7.5.1.2.2.5 Belanja Aset Tetap Lainnya	TA 2020	TA 2019
	<b>Rp52.537.877.891,00</b>	<b>Rp24.613.620.479,00</b>

Belanja Aset Tetap Lainnya Tahun Anggaran 2020 dianggarkan sebesar Rp52.649.188.788,91 terealisasi sebesar Rp52.537.877.891,00 atau 99,79%. Realisasi Belanja Aset Tetap Lainnya Tahun 2020 mengalami peningkatan 113,45% atau sebesar Rp27.924.257.412,00 jika dibandingkan Belanja Aset Tetap Lainnya TA 2019 sebesar Rp24.613.620.479,00.



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

**Tabel 31 Belanja Aset Tetap Lainnya TA 2020 dan 2019**

Jenis Belanja	Anggaran TA.2020	TA 2020 (Rp)	%	TA 2019 (Rp)	% Kenaikan/ Penurunan
Belanja modal Pengadaan Buku	230.690.000,00	Rp225.030.925,00	97,55	Rp518.891.260,00	(56,63)
Belanja modal Pengadaan Barang Bercorak Kebudayaan	11.000.000,00	Rp11.000.000,00	100,00	Rp2.944.698.550,00	(99,63)
Belanja Modal Pengadaan Hewan/Ternak dan Tanaman	Rp0,00	Rp0,00	0,00	Rp0,00	0,00
Belanja Modal BLUD	4.695.041.400,00	Rp1.262.390.964,00	26,89	Rp1.722.556.673,00	(26,71)
Belanja Modal Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional	1.552.502.900,00	Rp1.240.220.507,00	79,89	Rp690.365.000,00	79,65
Belanja Modal Dana BOS	46.159.954.488,91	Rp49.799.235.495,00	107,88	Rp18.737.108.996,00	165,78
<b>Jumlah</b>	<b>52.649.188.788,91</b>	<b>Rp52.537.877.891,00</b>	<b>99,79</b>	<b>Rp24.613.620.479,00</b>	<b>113,45</b>

**7.5.1.2.2.6 Belanja Aset  
Lainnya**

TA 2020	TA 2019
<b>Rp314.649.396,00</b>	<b>Rp984.608.000,00</b>

Belanja Aset Lainnya Tahun Anggaran 2020 dianggarkan sebesar Rp783.000.000,00 terealisasi sebesar Rp314.649.396,00 atau 40,19. Realisasi Belanja Aset Tetap Lainnya TA 2020 mengalami penurunan 68,04% atau sebesar Rp669.958.604,00 dibandingkan Belanja Aset Tetap Lainnya TA 2019 sebesar Rp984.608.000,00. Belanja Aset lainnya merupakan Belanja Aset Tak Berwujud antara lain berupa Pengadaan Aplikasi Sistem Informasi Manajemen (SIM), Aplikasi Berbasis *Website* dan *Mobile*, SIM BLUD, dan Software Integrasi CCTV.

**7.5.1.2.3 Belanja Tidak  
Terduga**

TA 2020	TA 2019
<b>Rp83.108.628.693,00</b>	<b>Rp34.148.000,00</b>

Belanja Tidak Terduga Tahun Anggaran 2020 dianggarkan sebesar Rp135.514.139.770,61 terealisasi sebesar Rp83.108.628.693,00 atau 61,33%. Realisasi Belanja Tidak Terduga TA 2020 mengalami peningkatan 243.277,73% atau sebesar Rp83.074.480.693,00 dibandingkan Belanja Tidak Terduga TA 2019 sebesar Rp34.148.000,00. Peningkatan tersebut terjadi karena adanya Belanja yang merupakan Pengembalian kelebihan pendapatan dan Refocusing dana penanganan Pandemi Covid - 19 yang terdiri atas:



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

**Tabel 32 Belanja Tidak Terduga TA 2020**

NO	URAIAN	NAMA PENERIMA	JUMLAH
1	Pengembalian Kelebihan Pendapatan	Yuliati Arsyad	Rp20.000.000,00
		Hermin Daun	Rp15.921.000,00
		PT. Maruki Internasional Indonesia	Rp17.942.400,00
		BPJS Kesehatan Kantor cabang Makassar	Rp15.135.000,00
2	Penanganan Pandemi Covid – 19 TA 2020	Dinas Kesehatan	Rp29.696.958.380,00
		Dinas Sosial	Rp33.635.731.568,00
		Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Rp19.706.940.345,00
		<b>Jumlah</b>	<b>Rp83.108.628.693,00</b>

Rincian Belanja Tak Terduga untuk dana penanganan pandemi Covid - 19 dapat dilihat pada *Lampiran 33*

**7.5.1.3 Transfer**

TA 2020	TA 2019
<b>Rp1.169.896.000,00</b>	<b>Rp1.116.584.000,00</b>

Transfer Tahun 2020 direncanakan sebesar Rp1.215.892.000,00 dan terealisasi sebesar Rp1.169.896.000,00 atau 96,22%. Realisasi Transfer mengalami peningkatan dari realisasi Transfer TA 2019 sebesar Rp53.312.000,00 atau 4,77% dibandingkan transfer TA 2019 sebesar Rp1.116.584.000,00. Belanja transfer sendiri terdiri atas transfer bantuan keuangan.

**7.5.1.3.1 Transfer Bagi Hasil Ke Kelurahan**

TA 2020	TA2019
<b>Rp0,00</b>	<b>Rp0,00</b>

Pada Tahun Anggaran 2020, transfer bagi hasil ke kelurahan tidak dianggarkan dalam anggaran pokok maupun anggaran perubahan dan tidak terealisasi sampai dengan akhir Desember 2020.

**7.5.1.3.2 Transfer Bantuan Keuangan**

TA 2020	TA 2019
<b>Rp1.169.896.000,00</b>	<b>Rp1.116.584.000,00</b>

Belanja Bantuan Keuangan Tahun 2020 direncanakan sebesar Rp1.215.892.000,00 terealisasi sebesar Rp1.169.896.000,00 atau 96,22%. Belanja Bantuan Keuangan diperuntukkan sebagai bantuan kepada Provinsi dan Partai Politik. Adapun anggaran dan realisasi Belanja Bantuan Keuangan tersaji dalam tabel berikut.



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

**Tabel 33 Anggaran dan Realisasi Belanja Bantuan Keuangan TA 2020**

No.	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)	Rasio %	Realisasi 2019 (Rp)	% Kenaikan/ Penurunan
1	Belanja Bantuan Kepada Partai Golongan Karya	Rp135.442.000,00	Rp135.442.000,00	100,00	Rp151.437.000,00	(10,56)
2	Belanja Bantuan Kepada Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	Rp118.523.000,00	Rp118.522.000,00	100,00	Rp100.894.000,00	17,47
3	Belanja Bantuan Kepada Partai Amanat Nasional	Rp100.127.000,00	Rp100.127.000,00	100,00	Rp92.448.000,00	8,31
4	Belanja Bantuan Kepada Partai Keadilan Sejahtera	Rp92.450.000,00	Rp92.449.000,00	100,00	Rp85.916.000,00	7,60
5	Belanja Bantuan Kepada Partai Persatuan Pembangunan	Rp93.263.000,00	Rp93.262.000,00	100,00	Rp96.978.000,00	(3,83)
6	Belanja Bantuan Kepada Partai Demokrat	Rp138.685.000,00	Rp138.684.000,00	100,00	Rp153.388.000,00	(9,59)
7	Belanja bantuan Kepada Partai Hanura	Rp81.784.000,00	Rp81.784.000,00	100,00	Rp83.567.000,00	(2,13)
8	Belanja bantuan Kepada Partai Gerindra	Rp125.864.000,00	Rp125.864.000,00	100,00	Rp131.330.000,00	(4,16)
9	Belanja Bantuan Kepada Partai Nasional Demokrat	Rp171.943.000,00	Rp171.943.000,00	100,00	Rp130.699.000,00	31,56
10	Belanja Bantuan Kepada Partai Kebangkitan Bangsa	Rp56.600.000,00	Rp56.600.000,00	100,00	Rp18.867.000,00	199,99
11	Belanja Bantuan Kepada Partai Persatuan Indonesia	Rp55.219.000,00	Rp55.219.000,00	100,00	Rp0,00	100,00
12	Belanja Bantuan Kepada Partai Berkarya	Rp45.992.000,00	Rp0,00	0,00	Rp0,00	0,00
13	Belanja bantuan Kepada Partai Bulan Bintang	Rp0,00	Rp0,00	0,00	Rp25.749.000,00	(100,00)
14	Belanja bantuan Kepada Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	Rp0,00	Rp0,00	0,00	Rp29.980.000,00	(100,00)
15	Belanja bantuan Kepada Partai Berkarya	Rp0,00	Rp0,00	0,00	Rp15.331.000,00	(100,00)
	<b>Jumlah</b>	<b>Rp1.215.892.000,00</b>	<b>Rp1.169.896.000,00</b>	<b>96,22</b>	<b>Rp1.116.584.000,00</b>	<b>4,77</b>

**7.5.1.3 Pembiayaan**

TA 2020	TA 2019
<b>Rp239.051.988.218,19</b>	<b>Rp121.757.265.684,91</b>

Dalam Tahun Anggaran 2020, Pembiayaan Netto direncanakan sebesar Rp238.994.035.090,52, dan terealisasi sebesar Rp239.051.988.218,19 atau 100,02%. Realisasi Pembiayaan mengalami peningkatan dari realisasi Pembiayaan TA 2019 sebesar Rp117.294.722.533,28 atau 96,33% dibandingkan Pembiayaan Netto TA 2019 sebesar Rp121.757.265.684,91. Pos pembiayaan daerah yang terdiri atas Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan.



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

<b>7.5.1.3.1</b>	<b>Penerimaan Pembiayaan</b>	<b>TA 2020</b>	<b>TA 2019</b>
		<b>Rp239.051.988.218,19</b>	<b>Rp174.757.265.684,91</b>

Penerimaan Pembiayaan direncanakan sebesar Rp238.994.035.090,52 dapat direalisasi sebesar Rp239.051.988.218,19 atau 100,02%.

Kelompok Penerimaan Pembiayaan dibagi menurut jenis Penerimaan Pembiayaan yang terdiri atas: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya dianggarkan sebesar Rp238.994.035.090,52 dan terealisasi sebesar Rp239.051.988.218,19 atau 100,02%. Pada penerimaan pembiayaan silpa terdapat penambahan nilai berupa penyesuaian saldo awal Kas Dana Bos sebesar Rp57.953.127,67.

<b>7.5.1.3.2</b>	<b>Pengeluaran Pembiayaan</b>	<b>TA 2020</b>	<b>TA 2019</b>
		<b>Rp0,00</b>	<b>Rp 53.000.000.000,00</b>

Pada Tahun Anggaran 2020, Pengeluaran Pembiayaan tidak dianggarkan dalam anggaran pokok maupun anggaran perubahan dan tidak terealisasi sampai dengan akhir Desember 2020.

<b>7.5.1.3.3</b>	<b>SILPA</b>	<b>TA 2020</b>	<b>TA 2019</b>
		<b>Rp592.928.271.047,79</b>	<b>Rp238.994.035.090,52</b>

Sisa lebih pembiayaan anggaran (Silpa) Tahun Anggaran 2020 yaitu sebesar Rp592.928.271.047,79 mengalami peningkatan sebesar 148,09% dari Tahun Anggaran 2019 atau sebesar Rp353.934.235.957,27 Silpa tersebut terdiri dari:

**Tabel 34 Rincian Silpa TA 2020**

No	Uraian	Nilai
1	Kas di Kas Daerah	Rp583.021.816.655,79
2	Kas di Bendahara Pengeluaran	Rp37.000.080,00
3	Kas di BOS	Rp4.369.060.336,00
4	Kas FKTP/JKN (27 PUSKESMAS)	Rp1.866.461.126,00
5	KAS di BLUD (19 PUSKESMAS DAN RSUD DAYA)	Rp3.633.932.850,00
<b>Jumlah</b>		<b>Rp592.928.271.047,79</b>



## **7.5.2 Penjelasan Atas Pos–Pos Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih**

### **7.5.2.1 Saldo Anggaran Lebih Awal**

Merupakan penjumlahan saldo yang berasal dari akumulasi SiLPA tahun-tahun anggaran sebelumnya dan tahun berjalan serta penyesuaian lain yang diperkenankan.

Saldo Anggaran Lebih awal tahun 2020 adalah sebesar Rp238.994.035.090,52.

### **7.5.2.2 Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan**

Merupakan Saldo Anggaran Lebih yang telah digunakan sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan. Tahun 2020 Penggunaan SAL merupakan Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan sebesar Rp239.051.988.218,19.

### **7.5.2.3 Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)**

Merupakan selisih lebih/kurang antara realisasi pendapatan LRA dan belanja, serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan dalam APBD selama satu periode pelaporan.

Selisih Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) Tahun 2020 adalah sebesar Rp592.928.271.047,79.

#### **a. Surplus/Defisit – LRA**

Merupakan selisih lebih/kurang antara pendapatan LRA dan belanja selama satu periode pelaporan.

Surplus/Defisit – LRA Tahun 2020 sebesar Rp353.876.282.829,60 dan pada tahun 2020 sebesar (Rp117.236.769.405,61).

#### **b. Pembiayaan Netto**

Adalah selisih antara Penerimaan Pembiayaan setelah dikurangi Pengeluaran Pembiayaan selama satu periode pelaporan. Pembiayaan Netto Tahun 2020 sebesar Rp239.051.988.218,19 mengalami peningkatan 90,33% sebesar Rp117.294.722.533,28 dari Tahun 2019.

### **7.5.2.4 Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya**

Merupakan koreksi kesalahan pembukuan yang berhubungan dengan periode sebelumnya. Untuk tahun 2020 terdapat koreksi sebesar Rp57.953.127,67 yang merupakan Koreksi saldo awal Dana Bos.

### **7.5.2.5 Saldo Anggaran lebih pada Tahun 2020 sebesar Rp592.928.271.047,79.**



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

### 7.5.3 Penjelasan Pos-Pos Neraca

Neraca untuk pemerintah daerah dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan serta menggambarkan posisi keuangan suatu entitas akuntansi/entitas pelaporan mengenai Aset, Kewajiban, dan Ekuitas Dana pada tanggal tertentu.

#### 7.5.3.1 Aset

	31 Desember 2020	31 Desember 2019
	<b>Rp29.907.454.974.078,80</b>	<b>Rp28.917.379.713.966,00</b>

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan darimana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya, terdiri dari:

**Tabel 35 Rincian Aset Per 31 Desember 2020 dan 2019**

No.	Uraian	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)
1	Aset Lancar	Rp1.145.512.567.105,46	Rp769.201.156.578,19
2	Investasi Jangka Panjang	Rp744.676.329.433,52	Rp722.610.453.340,27
3	Aset Tetap	Rp27.653.198.515.934,60	Rp27.034.458.722.847,30
4	Dana Cadangan	Rp0,00	Rp0,00
5	Aset Lainnya	Rp364.067.561.605,26	Rp391.109.381.200,22
	<b>Jumlah</b>	<b>Rp29.907.454.974.078,80</b>	<b>Rp28.917.379.713.966,00</b>

#### 7.5.3.1.1 Aset Lancar

	31 Desember 2020	31 Desember 2019
	<b>Rp1.145.512.567.105,46</b>	<b>Rp769.201.156.578,19</b>

Aset Lancar meliputi Kas dan Setara Kas, Investasi Jangka Pendek, Piutang, Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran, Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi, Piutang Lainnya dan Persediaan. Nilai Aset Lancar Pemerintah Kota Makassar per 31 Desember 2020 dan per 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp1.145.512.567.105,46 dan Rp769.201.156.578,19 sebagai berikut.

**Tabel 36 Rincian Aset Lancar Per 31 Desember TA 2020 dan 2019**

No.	Uraian	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)
1	Kas di Kas Daerah	Rp583.021.816.655,79	Rp222.096.474.878,19
2	Kas di Bendahara Pengeluaran	Rp37.937.044,00	Rp1.091.229.858,00



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

No.	Uraian	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)
3	Kas di Bendahara Penerimaan	Rp0,00	Rp0,00
4	Kas di Bendahara JKN	Rp1.866.461.126,00	Rp1.507.133.476,00
5	Kas di BLUD	Rp3.683.774.100,42	Rp5.018.356.629,42
6	Kas Dana BOS	Rp0,00	Rp0,00
7	Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	Rp4.774.105.728,90	Rp9.455.691.691,18
8	Piutang Pajak	Rp544.485.153.621,37	Rp478.670.075.953,27
9	Piutang Retribusi	Rp46.017.997.253,00	Rp29.982.675.692,00
10	Piutang Deviden	Rp45.126.597.924,47	Rp55.164.423.151,15
11	Piutang Dana Bagi Hasil Pajak	Rp65.384.585.345,00	Rp85.497.737.088,89
12	Belanja Dibayar Dimuka	Rp152.479.166,67	Rp38.668.258,33
13	Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi	Rp2.265.253.608,00	Rp1.367.311.840,01
14	Piutang Lainnya	Rp62.801.334.222,96	Rp60.827.753.653,41
15	Piutang BLUD	Rp1.695.623.493,00	Rp11.446.044.628,00
16	Penyisihan Piutang Tak Tertagih	(Rp286.937.241.453,85)	(Rp239.784.553.004,47)
17	Persediaan	Rp71.136.689.268,79	Rp46.822.132.784,81
<b>Jumlah</b>		<b>Rp1.145.512.567.105,46</b>	<b>Rp769.201.156.578,19</b>

7.5.3.1.1.1 **Kas di Kas Daerah**

31 Desember 2020	31 Desember 2019
<b>Rp583.021.816.655,79</b>	<b>Rp222.096.474.878,19</b>

Kas Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Walikota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah. Saldo Kas di Kas Daerah per 31 Desember 2020 dan per 31 Desember 2019 sebesar Rp583.021.816.655,79 dan Rp222.096.474.878,19 sebagai berikut.

**Saldo Kas/Setara Kas per 31 Desember 2020 terdiri dari:**

- Saldo awal 1 Januari 2020 (Audited)	Rp	Rp222.096.474.878,19
- Kenaikan Kas Bersih Periode 1 Januari s.d. 31 Desember 2020	Rp	Rp360.925.341.777,60
<b>Saldo Akhir Kas di BUD</b>	<b>Rp</b>	<b><u>Rp583.021.816.655,79</u></b>

Rincian saldo pada Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) sebagai berikut.



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

**Tabel 37 Kas di Kas Daerah  
Per 31 Desember 2020 dan 2019**

No.	Nama Bank	Nama Bank Nomor Rekening	Saldo Rekening	
			31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)
1.	Bank SulSelBar Cabang Utama Makassar	Bank Sulselbar 130-001- 000003414 3	Rp583.021.816.655,79	Rp222.096.474.878,19
	<b>Jumlah</b>		<b>Rp583.021.816.655,79</b>	<b>Rp222.096.474.878,19</b>

**7.5.3.1.1.2 Kas di Bendahara  
Pengeluaran**

31 Desember 2020	31 Desember 2019
<b>Rp37.937.044,00</b>	<b>Rp1.091.229.858,00</b>

Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2020 dan 2019 sebesar Rp37.937.044,00 dan Rp1.091.229.858,00. Adapun rincian Kas di Bendahara Pengeluaran dapat dilihat pada *Lampiran 2*.

**7.5.3.1.1.3 Kas di Bendahara  
Penerimaan**

31 Desember 2020	31 Desember 2019
<b>Rp0,00</b>	<b>Rp0,00</b>

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2020 sebesar Rp0,00 dan saldo Kas Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2019 sebesar Rp0,00.

**7.5.3.1.1.4 JKN**

Kas di Bendahara	31 Desember 2020	31 Desember 2019
<b>JKN</b>	<b>Rp1.866.461.126,00</b>	<b>Rp1.507.133.476,00</b>

Sisa kas di Bendahara JKN per 31 Desember 2020 pada Puskesmas selaku penyelenggara Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sebesar Rp1.866.461.126,00 yang merupakan sisa kas di rekening masing-masing puskesmas sebesar Rp1.866.461.126,00, dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 38 Kas di Bendahara JKN Puskesmas  
Per 31 Desember 2020**

NO	NAMA PUSKESMAS	NO REKENING	RINCIAN SALDO AKHIR 31/12/2020	
			SALDO BANK	SALDO TUNAI
1	ANDALAS	130-002-000030127-1	Rp0,00	Rp0,00
2	ANTANG	130-002-000030128-9	Rp138.809.314,00	Rp0,00
3	ANTANG PERUMNAS	130-002-000030129-7	Rp26.698.675,00	Rp0,00
4	ANTARA	130-002-000030130-1	Rp56,00	Rp0,00
5	BAROMBONG	130-002-000030132-7	Rp587.578.124,00	Rp0,00
6	BATUA	130-002-000030133-5	Rp633.883,00	Rp0,00
7	BIRA	130-002-000030134-3	Rp68.213.480,00	Rp0,00
8	DAHLIA	130-002-000030136-0	Rp0,00	Rp0,00



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

NO	NAMA PUSKESMAS	NO REKENING	RINCIAN SALDO AKHIR 31/12/2020	
			SALDO BANK	SALDO TUNAI
9	KARUWISI	130-002-000030140-8	Rp4.465.078,00	Rp888.636,00
10	LAYANG	130-002-000030142-4	Rp106.487.780,00	Rp200,00
11	MACCINI SAWAH	130-002-000030143-2	Rp327.304.160,00	Rp0,00
12	MALIMONGAN BARU	130-002-000030145-9	Rp6.834.387,00	Rp0,00
13	MANGASA	130-002-000030147-5	Rp69.707.503,00	Rp0,00
14	MARADEKAYA	130-002-000030148-3	Rp4.388.520,00	Rp0,00
15	PANAMBUNGAN	130-002-000030151-3	Rp183,00	Rp0,00
16	TABARINGAN	130-002-000030157-2	Rp53.594.080,00	Rp0,00
17	TAMALANREA	130-002-000030159-9	Rp34.939.110,00	Rp0,00
18	TAMANGAPA	130-002-000030161-1	Rp14.184.534,00	Rp0,00
19	TARAKAN	130-002-000030162-9	Rp779.033,00	Rp0,00
20	BARRANG LOMPO	130-002-000030163-7	Rp202.393.990,00	Rp0,00
21	KAPASA	130-002-000030164-5	Rp38.623.610,00	Rp0,00
22	KODINGARENG	130-002-000030165-3	Rp0,00	Rp0,00
23	BULUROKENG	130-002-000030168-8	Rp83.415.504,00	Rp0,00
24	BANGKALA	130-002-000030166-1	Rp92.185.030,00	Rp0,00
25	BALLAPARANG	130-002-000030484-9	Rp2.336.256,00	Rp0,00
26	TODDOPULI	130-002-000030485-7	Rp2.000.000,00	Rp0,00
27	TAMALANREA JAYA	130-002-000030486-5	Rp0,00	Rp0,00
<b>JUMLAH</b>			<b>Rp1.865.572.290,00</b>	<b>Rp888.636,00</b>

Sesuai Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah, pada Pasal 7 ayat (3) dinyatakan bahwa saldo kas di Bendahara Dana Kapitasi JKN tidak harus disetorkan ke Rekening Kas Daerah dan dapat digunakan pada tahun anggaran berikutnya. Sisa kas tersebut tidak disetor ke rekening kas daerah karena rekening masing-masing puskesmas merupakan bagian dari kas daerah, yang penggunaannya langsung dengan penerbitan Surat Pengesahan Pendapatan dan Belanja (SP2B) oleh Bendahara Umum Daerah (BUD)/Kuasa Bendahara Umum Daerah, yang secara rinci dapat dilihat pada *Lampiran 4*.

#### 7.5.3.1.1.5 Kas di BLUD

31 Desember 2020	31 Desember 2019
<b>Rp3.683.774.100,42</b>	<b>Rp5.018.356.629,42</b>

Sisa Kas per 31 Desember 2020 pada Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) pada Rumah Sakit Umum Daerah dan Puskesmas terdapat sisa kas sebesar 3.683.774.100,42 yang merupakan sisa kas di rekening BLUD sesuai dengan laporan keuangan BLUD. Rincian sisa kas di BLUD sebagai berikut.



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

**Tabel 39 Rincian Kas di BLUD  
per 31 Desember 2020 dan 2019**

No	Satuan Kerja	Nama Bank Nomor Rekening	Saldo Rekening	
			31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)
1	Kas Di Bendahara Penerimaan	Bank Rakyat Indonesia 0403-01-000273-30-2	Rp1.532.599,00	Rp2.341.680.137,42
2	Kas Di Bendahara Pengeluaran BLUD RSUD Daya	Bank Sulselbar 130-002-000020623-5	Rp1.352.425.531,42	Rp56.191,00
3	Kas Di Bendahara Pengeluaran BLUD Puskesmas Bara Baraya	Bank Sulselbar 130-002-000030131-9	Rp41.030.486,00	Rp301.033.335,00
4	Kas Di Bendahara Pengeluaran BLUD Puskesmas Cendrawasih	Bank Sulselbar 130-002-000030135-1	Rp23.291.226,00	Rp1.895.585,00
5	Kas Di Bendahara Pengeluaran BLUD Puskesmas Jongaya	Bank Sulselbar 130-002-000030137-8	Rp255.463.552,00	Rp236.435.180,00
6	Kas Di Bendahara Pengeluaran BLUD Puskesmas Jumpandang Baru	Bank Sulselbar 130-002-000030138-6	Rp0,00	Rp0,00
7	Kas Di Bendahara Pengeluaran BLUD Puskesmas Kaluku Bodoa	Bank Sulselbar 130-002-000030139-4	Rp5.942.130,00	Rp3.266.950,00
8	Kas Di Bendahara Pengeluaran BLUD Puskesmas Kassi Kassi	Bank Sulselbar 130-002-000030141-6	Rp696.792.940,00	Rp475.349.399,00
9	Kas Di Bendahara Pengeluaran BLUD Puskesmas Makkasau	Bank Sulselbar 130-002-000030144-1	Rp3.790.076,00	Rp44.727.654,00
10	Kas Di Bendahara Pengeluaran BLUD Puskesmas Mamajang	Bank Sulselbar 130-002-000030146-7	Rp3.551.068,00	Rp33.484.485,00
11	Kas Di Bendahara Pengeluaran BLUD Puskesmas Minasa Upa	Bank Sulselbar 130-002-000030149-1	Rp40.325.886,00	Rp66.047.005,00
12	Kas Di Bendahara Pengeluaran BLUD Puskesmas Pampang	Bank Sulselbar 130-002-000030150-5	Rp17.693.835,00	Rp47.095.685,00
13	Kas Di Bendahara Pengeluaran BLUD Puskesmas Pattingalloang	Bank Sulselbar 130-002-000030152-1	Rp3.518.702,00	Rp8.898.204,00
14	Kas Di Bendahara Pengeluaran BLUD Puskesmas Pertiwi	Bank Sulselbar 130-002-000030153-0	Rp10.416.263,00	Rp15.855.324,00
15	Kas Di Bendahara Pengeluaran BLUD Puskesmas Rappokalling	Bank Sulselbar 130-002-000030154-8	Rp0,00	Rp5.703.370,00
16	Kas Di Bendahara Pengeluaran BLUD Puskesmas Sudiang	Bank Sulselbar 130-002-000030155-6	Rp109.889.469,00	Rp121.910.722,00
17	Kas Di Bendahara Pengeluaran BLUD Puskesmas Sudiang Raya	Bank Sulselbar 130-002-000030156-4	Rp129.980.604,00	Rp158.582.110,00



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

No	Satuan Kerja	Nama Bank Nomor Rekening	Saldo Rekening	
			31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)
18	Kas Di Bendahara Pengeluaran BLUD Puskesmas Tamalate	Bank Sulselbar 130-002-000030158-1	Rp182.470.774,00	Rp265.337.074,00
19	Kas Di Bendahara Pengeluaran BLUD Puskesmas Tamamaung	Bank Sulselbar 130-002-000030160-2	Rp226.811.608,00	Rp364.078.018,00
20	Kas Di Bendahara Pengeluaran BLUD Puskesmas Paccerakkang	Bank Sulselbar 130-002-000030167-0	Rp443.263.682,00	Rp354.702.569,00
21	Kas Di Bendahara Pengeluaran BLUD Puskesmas Maccini Sombala	Bank Sulselbar 130-002-000030126-2	Rp135.583.669,00	Rp172.217.632,00
<b>Jumlah</b>			<b>Rp3.683.774.100,42</b>	<b>Rp5.018.356.629,42</b>

Adapun rincian kas di BLUD dapat dilihat pada *Lampiran 5*.

**7.5.3.1.1.6 Kas Lainnya di  
Bendahara  
Pengeluaran**

31 Desember 2020	31 Desember 2019
<b>Rp4.774.105.728,90</b>	<b>Rp9.455.691.691,18</b>

Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2020 sebesar Rp4.774.105.728,90 merupakan kas dana BOS, di mana sebesar Rp2.411.245.856,00 merupakan sisa kas di bank dan sebesar Rp2.362.859.872,90 merupakan sisa kas tunai di Bendahara BOS.

Pada Tahun 2019, Pemerintah Kota Makassar melalui Dinas Pendidikan melaksanakan penggabungan (*regrouping*) beberapa Sekolah Dasar Negeri di Kota Makassar, penutupan, dan pendirian SMP Negeri baru, melalui surat permohonan Kepala Dinas Pendidikan Kota Makassar Nomor 421/2449/DP/IV/2019 Tanggal 25 April 2019 dan telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah, untuk pelaksanaan penggabungan (*regrouping*) beberapa Sekolah Dasar Negeri di Kota Makassar. Hasil penggabungan (*regrouping*) satuan Pendidikan Sekolah Dasar di Wilayah Kota Makassar ditetapkan dalam Keputusan Walikota Makassar Nomor 1189/421.2/TAHUN 2019 tertanggal 2 Mei 2019.

Sehubungan dengan penutupan, dan penggabungan (*regrouping*) beberapa sekolah tersebut, maka sisa kas dana BOS sekolah yang telah ditutup digabungkan dengan sisa kas sekolah induk, dengan rincian sebagai berikut:



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

**Tabel 40. Daftar Sekolah Regrouping**

No	Sekolah Induk	Sekolah Tutup	Nomor Rekening	Sisa Saldo Kas per 31/12/2020
1	SD NEGERI GADDONG 2	SD NEGERI GADDONG I	130-202-000008230-8	Rp46.000,00
2	SD INPRES LAYANG BERTINGKAT	SD NEGERI LAYANG I	130-202-000008232-4	Rp42.965,00
3	SD NEGERI LARIANG BANGI I	SD NEGERI LARIANG BANGI 2	130-202-000008253-7	Rp267.472,00
		SD NEGERI LARIANG BANGI III	130-202-000008254-5	Rp257.460,00
		SD INPRES BERTINGKAT LARIANG BANGI 1	130-202-000008272-3	Rp2.372.490,00
		SD INPRES BERTINGKAT LARIANG BANGI 2	130-202-000008273-1	Rp357.585,00
4	SD INPRES MACCINI 1 1	SD NEGERI MACCINI 1	130-202-000008255-3	Rp38.878,00
5	SD NEGERI MACCINI 2	SD NEGERI MACCINI 3	130-002-000024460-9	Rp68.173,00
		SD NEGERI MACCINI 4	130-202-000008258-8	Rp859.634,00
6	SD INPRES BERTINGKAT BARA-BARAYA II	SD NEGERI BARA BARAYA II	130-202-000008260-0	Rp162.650,00
		SD NEGERI BARA-BARAYA 3	130-202-000008261-8	Rp71.440,00
7	SD INPRES BERT MAMAJANG III	SD INPRES BERT MAMAJANG IV	130-202-000008305-3	Rp29.772,00
8	SD NEGERI MATTOANGIN II	SD NEGERI MATTOANGIN III	130-202-000008351-7	Rp309.460,00
9	SD NEGERI BONTORANNU II	SD NEGERI BONTORANNU I	130-202-000008345-2	Rp39.285,00
10	SD NEGERI GARUDA	SD NEGERI TUNAS KARYA	130-202-000008355-0	Rp24.749.035,00
11	SD NEGERI PATOMPO II	SD NEGERI PATOMPO I	130-202-000008352-5	Rp605.785,00
		SD NEGERI KUNJUNG MAE	130-202-000008348-7	Rp46.273,00
12	SD NEGERI MATTOANGIN 1	SD INPRES BERTINGKAT MATTOANGIN	130-202-000008341-0	Rp333.910,00
13	SD INPRES KARUWISI 2	SD NEGERI KARUWISI 1	130-202-000008367-3	Rp257.931,00
		SD NEGERI KARUWISI 3	130-202-000008366-5	Rp54.000,00
14	SD INPRES KARUWISI 1	SD INPRES KARUWISI 3	130-202-000008370-3	Rp64.925,00
15	SD INPRES PANAIKANG 1/1	SD INPRES PANAIKANG ½	130-202-000008400-9	Rp260,00
16	SD INPRES PANAIKANG II/1	SD INPRES PANAIKANG II/2	130-202-000008374-6	Rp1.710.107,00
17	SD NEGERI MANGASA	SD NEGERI KATANGKA	130-202-000008404-1	Rp32.469,00
18	SD INPRES MANGASA 1	SD NEGERI KATANGKA 1	130-202-000008405-0	Rp9.441.809,00
19	SD NEGERI TIDUNG	SD NEGERI PERUMNAS	130-202-000008412-2	Rp282.310,00
		SD NEGERI MAPPALA	130-202-000008414-9	Rp86.610,00
20	SD INPRES TIDUNG II	SD INPRES TIDUNG	130-202-000008433-5	Rp252.985,00
21	SD INPRES PERUMNAS	SD NEGERI EMMY SAELAN	130-202-000008415-7	Rp462.735,00
		SD INPRES PERUMNAS III	130-202-000008431-9	Rp1.176.700,00
22	SD INPRES GUNUNG SARI BARU	SD INPRES RAPPOCINI	130-202-000008426-2	Rp356.460,00
23	SD NEGERI RAPPOCINI	SD NEGERI RAPPOCINI I	130-202-000008417-3	Rp80.635,00
24	SD INPRES BANTA-BANTAENG 1	SD INPRES BANTA-BANTAENG	130-202-000008439-4	Rp36.080.860,00
25	SD INPRES BARAYA 2	SD NEGERI KIP BARAYA	130-202-000008458-1	Rp24.000,00
26	SD NEGERI BEROANGING	SD INPRES BERTINGKAT BEROANGING	130-202-000008461-1	Rp46.110,00
27	SD INPRES BUTTATIANANG II	SD INPRES BUTTATIANANG I	130-202-000008462-9	Rp0,00
28	SD INPRES LAYANG III	SD INPRES LAYANG II	130-202-000008481-5	Rp3.715.410,00
29	SD INPRES UJUNG PANDANG BARU 1	SD INPRES UJUNG PANDANG BARU	130-202-000008476-9	Rp7.673.000,00
30	SD INPRES BUNG	SD NEGERI BUNG	130-202-000008496-3	Rp103.435,00



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

No	Sekolah Induk	Sekolah Tutup	Nomor Rekening	Sisa Saldo Kas per 31/12/2020
31	SD NEGERI KUMALA	SD NEGERI JONGAYA	130-202-000008526-9	Rp33.636,00
32	SD INPRES JONGAYA 1	SD INPRES JONGAYA 2	130-202-000008545-5	Rp121.600,00
33	SD INPRES BAROMBONG 2	SD INPRES BAROMBONG 1	130-202-000008546-3	Rp346.000,00
34	SD NEGERI BULOGADING	SD NEGERI SAMIUN	130-202-000008571-4	Rp1.881.655,00
35	SD NEGERI GOTONG-GOTONG 1	SD INPRES GOTONG-GOTONG 2	130-202-000008569-2	Rp296.090,00
36	SD INPRES BERTINGKAT TABARINGAN I	SD INPRES BERTINGKAT TABARINGAN II	130-202-000008620-6	Rp46.500,00
37	SD NEGERI PATTINGALLOANG 1	SD NEGERI PATTINGALLOANG 2	130-202-000008603-6	Rp54.460,00
38	SD NEGERI TIMOR	SD NEGERI BALI	130-202-000008624-9	Rp45.435,00
39	SD NEGERI MELAYU	SD NEGERI MELAYU 25	130-202-000008631-1	Rp87.000,00
40	SD NEGERI MELAYU MUHAMMADIAH	SD INPRES BERTINGKAT MELAYU 1	130-202-000008632-0	Rp99.810,00
<b>Jumlah Saldo Kas</b>				<b>Rp95.573.204,00</b>

Adapun rincian Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran (Kas Dana Bos) dapat dilihat pada *Lampiran 6*).

#### 7.5.3.1.1.7 Piutang

Piutang adalah jumlah uang yang akan diterima oleh Pemerintah Kota Makassar dan/atau hak Pemerintah Kota Makassar yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian, kewenangan Pemerintah Kota Makassar berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah, yang diharapkan diterima Pemerintah Kota Makassar dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.

#### 7.5.3.1.1.7 Piutang Pajak

31 Desember 2020	31 Desember 2019
<b>Rp544.485.153.621,37</b>	<b>Rp478.670.075.953,27</b>

Piutang pajak per 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebesar Rp544.485.153.621,37 dan sebesar Rp478.670.075.953,27,- yang dirinci sebagai berikut:

**Tabel 41**  
**Saldo Piutang Pajak Daerah TA.2020**

No	JENIS PAJAK	PIUTANG 2019	MUTASI 2020		SALDO AKHIR PER 31/12/2020
			PENAMBAHAN	PENGURANGAN PIUTANG (KOREKSI NILAI KETETAPAN)	
1	Pajak Hotel Brutto	Rp4.256.845.556,17	Rp47.701.508,00	Rp370.014.563,00	Rp3.934.532.501,17
	Penyisihan	Rp606.910.397,97	Rp317.106.976,03		Rp924.017.374,00
	<b>Pajak Hotel Netto</b>				<b>3.010.515.127,17</b>
2	Pajak Hiburan Brutto	Rp9.596.052.683,44	Rp33.499.589,00	Rp0,00	Rp9.629.552.272,44
	Penyisihan	Rp1.951.934.507,04	Rp2.548.019.314,85		Rp4.499.953.821,89
	<b>Pajak Hiburan Netto</b>				<b>Rp5.129.598.450,55</b>
3	Pajak Air Tanah Brutto	Rp1.043.274.985,00	Rp999.882.100,00	Rp578.130.680,00	Rp1.465.026.405,00
	Penyisihan	Rp57.890.490,50	Rp72.230.376,50		Rp130.120.867,00
	<b>Pajak Air Tanah Netto</b>				<b>Rp1.334.905.538,00</b>



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

No	JENIS PAJAK	PIUTANG 2019	MUTASI 2020		SALDO AKHIR PER 31/12/2020
			PENAMBAHAN	PENGURANGAN PIUTANG (KOREKSI NILAI KETETAPAN)	
4	Pajak Restoran Brutto	Rp3.917.268.986,45	Rp1.947.630.132,50	Rp1.887.941.547,00	Rp3.976.957.571,95
	Penyisihan	Rp1.353.362.459,08	Rp606.228.684,60		Rp1.959.591.143,68
	<b>Pajak Restoran Netto</b>				<b>Rp2.017.366.428,27</b>
5	Pajak Parkir Brutto	Rp1.403.201.938,20	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.403.201.938,20
	Penyisihan	Rp175.110.638,80	Rp308.326.050,80		Rp483.436.689,60
	<b>Pajak Parkir Netto</b>				<b>Rp919.765.248,60</b>
6	PPJ Non PLN Brutto	Rp6.696.222,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp6.696.222,00
	Penyisihan	Rp5.312.612,50	Rp1.383.609,50		Rp6.696.222,00
	<b>PPJ Non PLN Netto</b>				<b>Rp0,00</b>
7	Pajak Reklame Brutto	Rp5.319.236.042,90	Rp511.758.250,00	Rp102.032.375,00	Rp5.728.961.917,90
	Penyisihan	Rp2.937.080.536,10	Rp542.286.362,45		3.479.366.898,55
	<b>Pajak Reklame Netto</b>				<b>2.249.595.019,35</b>
8	PBB Brutto	Rp453.127.499.538,24	Rp82.371.727.027,00	Rp17.159.001.774,00	Rp518.340.224.791,24
	Penyisihan	Rp212.703.799.855,67	Rp37.407.608.712,49		Rp250.111.408.568,16
	<b>PBB Netto</b>				<b>Rp268.228.816.223,08</b>
	<b>JUMLAH BRUTTO</b>	<b>Rp 478.670.075.952,40</b>	<b>Rp85.912.198.606,50</b>	<b>Rp20.097.120.939,00</b>	<b>Rp544.485.153.621,37</b>
	Penyisihan	(Rp219.791.401.497,23)	(Rp41.803.190.087,65)	-	(Rp261.594.591.584,88)
	<b>JUMLAH NETTO</b>	<b>Rp258.878.674.456,04</b>	<b>Rp44.109.008.518,85</b>	<b>Rp20.097.120.939,00</b>	<b>Rp282.890.562.036,49</b>

Saldo Awal Piutang Pajak Daerah pada 1 Januari 2020 sebesar Rp478.670.075.953,27 Saldo tersebut di tahun 2020 mengalami mutasi penambahan akibat belum terealisasi atau belum terbayarkan senilai Rp83.912.198.606,50,- dan pengurangan sebesar Rp20.097.120.939,00 yang terdiri atas pelunasan piutang pajak tahun sebelumnya yang tercatat dalam neraca tahun anggaran 2020 sehingga saldo akhir piutang pajak per 31 Desember 2020 berjumlah sebesar Rp.544.485.153.621,37.

Atas Piutang Pajak Daerah tersebut di atas dilakukan analisis umur piutang. Nilai penyisihan piutang per 31 Desember 2020 sebesar Rp261.594.591.584,88 sehingga piutang pajak daerah disajikan dengan nilai netto sebesar Rp282.890.562.036,49. Rincian Piutang Pajak dan Penyisihannya per tahun 2020 berdasarkan umur piutangnya dapat dilihat pada *Lampiran 7*.

Adapun penjelasan masing-masing atas Saldo Akhir Piutang Pajak Daerah per 31 Desember 2020 diuraikan sebagai berikut:

**(1) Pajak Hotel**

Saldo awal piutang Pajak Hotel yang disajikan pada Neraca per 1 Januari 2020 sebesar Rp4.256.845.556,17 terdapat pelunasan piutang LHP BPK RI senilai Rp370.014.563,00 sehingga saldo akhir pajak Hotel hingga akhir tahun senilai Rp3.934.532.501,17.



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

Adapun gambaran piutang pajak hotel per masa pajak dapat dilihat pada table berikut:

**Tabel 42**  
**Saldo Piutang Pajak Hotel Per 31 Desember 2020**

No	Masa Pajak	Saldo Awal	Mutasi Tahun 2020				Saldo Akhir
			Penambahan		Pengurangan		
			Reklasifikasi Aset Lain-lain	piutang LHP-RI, piutang PDTT	Pelunasan	Penghapusan	
1	2007	Rp1.200.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.200.000,00
2	2008	Rp21.817.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp21.817.000,00
3	2009	Rp42.469.395,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp42.469.395,00
4	2010	Rp56.045.054,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp56.045.054,00
5	2011	Rp61.834.583,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp61.834.583,00
6	2012	Rp180.938.300,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp180.938.300,00
7	2013	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
8	2014	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
9	2015	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
10	2016	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
11	2017	Rp606.725.562,37	Rp0,00	Rp0,00	Rp100.000.000,00	Rp0,00	Rp506.725.562,37
12	2018	Rp3.333.517.173,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp270.014.563,00	Rp0,00	Rp3.063.502.610,00
13	2019	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
14	2020	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
<b>Jumlah</b>		<b>Rp4.304.547.067,37</b>	<b>Rp0,00</b>	<b>Rp0,00</b>	<b>Rp370.014.563,00</b>	<b>Rp0,00</b>	<b>Rp3.934.532.504,37</b>

**(2) Pajak Restoran**

Saldo awal piutang Pajak Restoran yang disajikan pada Neraca per 1 Januari 2020 sebesar Rp3.917.268.986,45 terdapat penambahan piutang akibat kesalahan pencatatan di tahun 2019 senilai Rp1.947.630.132,50 dan terdapat pelunasan piutang LHP BPK RI sebesar RP 1.584.383.615,- dan pengurangan piutang PDTT sebesar Rp248.943.425,00 sehingga saldo akhir piutang pajak restoran sampai dengan akhir tahun anggaran 2020 sebesar Rp3.976.957.571,95.

Adapun Rincian piutang pajak per masa pajak dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 43**  
**Pajak Restoran Per 31 Desember 2020**

Masa Pajak	Saldo Awal	Mutasi Tahun 2020				Saldo Akhir
		Penambahan		Pengurangan		
		Reklasifikasi Aset Lain-lain	Piutang LHP BPK RI	Pelunasan	Penghapusan	
2007	Rp26.486.277	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp26.486.277
2008	Rp124.831.322,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp124.831.322,00
2009	Rp65.430.767,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp65.430.767,00
2010	Rp498.659.448,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp498.659.448,00
2011	Rp275.994.600,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp275.994.600,00
2012	Rp300.706.375,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp300.706.375,00
2013	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
2014	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
2015	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

Masa Pajak	Saldo Awal	Mutasi Tahun 2020				Saldo Akhir
		Penambahan		Pengurangan		
		Reklasifikasi Aset Lain-lain	Piutang LHP BPK RI	Pelunasan	Penghapusan	
2016	Rp535.273.750,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp187.459.750,00	Rp0,00	Rp347.814.000,00
2017	Rp819.679.691,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp170.000.000,00	Rp0,00	Rp649.679.691,00
2018	Rp3.163.222.382,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.475.867.290,00	Rp0,00	Rp1.687.355.092,00
2019	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
2020	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp5.810.284.612,00</b>	<b>Rp0,00</b>	<b>Rp0,00</b>	<b>Rp1.833.327.040,00</b>	<b>Rp0,00</b>	<b>Rp3.976.957.572,00</b>

### (3) Pajak Hiburan

Saldo awal piutang Pajak Hiburan yang disajikan pada Neraca per 1 Januari 2020 adalah sebesar Rp9.596.052.683,44 terdapat penambahan piutang akibat double catat senilai Rp 33.499.589,00 dan tidak ada pengurangan piutang pajak. Sehingga saldo akhir nilai piutang pajak hiburan sampai 31 Desember 2020 senilai Rp 9.629.552.272,00.

Adapun Rincian piutang pajak per masa pajak dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 44**  
**Pajak Hiburan Per 31 Desember 2020**

No	Masa Pajak	Saldo Awal	Mutasi Tahun 2020				Saldo Akhir
			Penambahan		Pengurangan		
			Reklasifikasi Aset lain-lain	Piutang PDFT	Pelunasan	Penghapusan	
1	2008	Rp39.117.552,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp39.117.552,00
2	2009	Rp156.927.237,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp156.927.237,00
3	2010	Rp270.417.118,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp270.417.118,00
4	2011	Rp431.448.136,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp431.448.136,00
5	2012	Rp204.678.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp204.678.000,00
6	2013	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
7	2014	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
8	2015	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
9	2016	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
10	2017	Rp6.333.541.801,00	Rp0,00	Rp28.131.589,04	Rp0,00	Rp0,00	Rp6.361.673.390,04
11	2018	Rp2.159.922.838,00	Rp0,00	Rp5.368.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.165.290.838,00
12	2019	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
13	2020	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
<b>Jumlah</b>		<b>Rp9.596.052.682,00</b>	<b>Rp0,00</b>	<b>Rp33.499.589,04</b>	<b>Rp0,00</b>	<b>Rp0,00</b>	<b>Rp9.629.552.271,04</b>

### (4) Pajak Reklame

Saldo awal piutang Pajak Reklame yang disajikan pada Neraca per 1 Januari 2020 sebesar Rp5.319.236.042,90 terdapat pelunasan piutang pada tahun 2020 sebesar Rp102.032.375,00 dan piutang mengalami penambahan



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

senilai Rp511.758.250,00 Sehingga saldo akhir pajak reklame pada akhir tahun ini sebesar Rp 5.728.961.918,00.

Adapun Rincian piutang pajak per masa pajak dapat dilihat pada table berikut:

**Tabel 45**  
**Pajak Reklame Per 31 Desember 2020**

No	Masa Pajak	Saldo Awal	Mutasi Tahun 2020			Saldo Akhir
			Penambahan		Pengurangan	
			koreksi saldo awal	tahun berjalan		
1	2010	Rp563.637.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp563.637.000,00
2	2011	Rp219.316.400,00	Rp0,00		Rp0,00	Rp219.316.400,00
3	2012	Rp247.655.550,00	Rp0,00			Rp247.655.550,00
4	2013	Rp643.106.072,00	Rp0,00		Rp0,00	Rp643.106.072,00
5	2014	Rp509.669.475,00	Rp0,00		Rp0,00	Rp509.669.475,00
6	2015	Rp440.560.200,00	Rp0,00		Rp0,00	Rp440.560.200,00
7	2016	Rp694.494.480,00	Rp0,00		Rp0,00	Rp694.494.480,00
8	2017	Rp789.214.303,00	Rp0,00		Rp0,00	Rp789.214.303,00
9	2018	Rp1.072.472.688,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp43.622.500,00	Rp1.028.850.188,00
10	2019	Rp139.109.875,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp58.469.875,00	Rp80.640.000,00
11	2020		Rp60.000,00	Rp511.758.250,00		Rp511.818.250,00
<b>Jumlah</b>		<b>Rp5.319.236.043,00</b>	<b>Rp60.000,00</b>	<b>Rp511.758.250,00</b>	<b>Rp102.092.375,00</b>	<b>Rp5.728.961.918,00</b>

**(5) Pajak Parkir**

Saldo awal piutang Pajak Parkir yang disajikan pada Neraca per 1 Januari 2020 sebesar Rp1.403.201.938,20 tidak terdapat penambahan & pengurangan sampai akhir tahun 2020. Adapun Rincian piutang pajak parkir per masa pajak dapat dilihat pada table berikut :

**Tabel 46**  
**Pajak Parkir Per 31 Desember 2020**

No	Masa Pajak	Saldo Awal	Mutasi Tahun 2020			Saldo Akhir
			Penambahan PDTT	Pengurangan		
				Pelunasan	Penghapusan	
1	2007	135.000	-	-	-	135.000
2	2008	3.160.000	-	-	-	3.160.000
3	2009	3.462.500	-	-	-	3.462.500
4	2010	5.639.800	-	-	-	5.639.800
5	2011	13.240.250	-	-	-	13.240.250
6	2012	13.018.500	-	-	-	13.018.500
12	2018	1.364.545.888	-	-	-	1.364.545.888
13	2019	-	-	-	-	-
14	2020	-	-	-	-	-
<b>Jumlah</b>		<b>1.403.201.938</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1.403.201.938</b>



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

**(6) Pajak Penerangan Non PLN**

Saldo awal piutang Pajak Penerangan Non PLN yang disajikan pada Neraca per 1 Januari 2020 sebesar Rp6.696.222,00 tidak terdapat pengurangan piutang hingga 31 Desember tahun 2020.

Adapun Rincian piutang pajak per masa pajak dapat dilihat pada table berikut:

**Tabel 47**

**Pajak PPJ Non PLN Per 31 Desember 2020**

No	Masa Pajak	Saldo Awal	Mutasi Tahun 2020		Saldo Akhir
			Penambahan	Pengurangan	
1	2012	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
2	2013	Rp1.413.880,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.413.880,00
3	2014	Rp2.515.122,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.515.122,00
4	2015	Rp2.767.220,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.767.220,00
5	2016	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
6	2017	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
7	2018	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
8	2019	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
9	2020	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
<b>Jumlah</b>		<b>Rp6.696.222,00</b>	<b>Rp0,00</b>	<b>Rp0,00</b>	<b>Rp6.696.222,00</b>

**(7) Pajak Air Bawah Tanah**

Saldo akhir piutang Pajak Air Bawah Tanah yang disajikan pada Neraca per 31 Desember 2020 sebesar Rp1.474.984.817,00. dari saldo awal Rp1.043.274.985,00 terdapat penambahan piutang dalam tahun berjalan senilai Rp1.009.834.420,00,00 pengurangan piutang sebesar Rp578.130.680,00.

Adapun Rincian piutang pajak Air Bawah Tanah per masa pajak dapat dilihat pada table berikut :

**Tabel 48**

**Pajak Air Bawah Tanah Per 31 Desember 2020**

No	Masa Pajak	Saldo Awal	Mutasi Tahun 2020		Saldo Akhir
			Penambahan	Pengurangan	
1	2012	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
2	2013	Rp349.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp349.000,00
3	2014	Rp5.252.300,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp5.252.300,00
4	2015	Rp20.559.600,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp20.559.600,00
5	2016	Rp43.542.640,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp43.542.640,00
6	2017	Rp99.946.143,00	Rp0,00	Rp5.833.240,00	Rp94.112.903,00
7	2018	Rp102.440.654,00	Rp0,00	Rp44.196.920,00	Rp58.243.734,00
8	2019	Rp771.190.740,00	Rp0,00	Rp528.100.520,00	Rp243.090.220,00
9	2020	Rp0,00	Rp1.009.834.420,00	Rp0,00	Rp1.009.834.420,00
<b>Jumlah</b>		<b>Rp1.043.281.077,00</b>	<b>Rp1.009.834.420,00</b>	<b>Rp578.130.680,00</b>	<b>Rp1.474.984.817,00</b>



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

**(8) Pajak Bumi dan Bangunan**

Sebagai gambaran bahwa saldo Piutang Pajak Bumi dan Bangunan yang disajikan pada Neraca per 31 Desember 2020 sebesar Rp518.340.224.791,00 dengan Saldo Awal per 01 Januari 2020 sebesar Rp453.127.499.538,00.

Dari Saldo Awal tersebut terdapat Koreksi Saldo Awal, Mutasi Penambahan dan Mutasi Pengurangan yang terdiri dari :

**a) Koreksi Saldo Awal**

Dari Saldo Awal sebesar Rp453.127.499.538,00 mengalami koreksi sebesar Rp1.175.001.034,00 yang terdiri dari :

- Mutasi Nilai Ketetapan yang disebabkan Pembetulan Luas Bumi SPPT, Pembetulan Luas Bangunan SPPT dan atau Pemecahan SPPT Pajak sebesar Rp1.907.992.761,00
- Penambahan Piutang PBB Masa Pajak 1994 sampai dengan 2018 yang bukan merupakan bagian dari saldo awal dan disebabkan Penerbitan SPPT Baru, Pemecahan SPPT dan atau Cleansing Data sebesar Rp732.991.727,00.

Dari Koreksi Saldo Awal yang sebagaimana dijelaskan diatas, maka jumlah Saldo Awal Piutang setelah koreksi sebesar Rp451.952.498.504,00,00. Sebagai gambaran Koreksi Saldo Awal yang dimaksud diuraikan pada tabel dibawah ini :

**Tabel 49**  
**Koreksi Saldo Awal Piutang TA 2020**

KECAMATAN	SALDO AWAL PER 01 JANUARI 2020	KOREKSI SALDO AWAL			SALDO PIUTANG SETELAH KOREKSI
		MUTASI NILAI KETETAPAN/ PIUTANG 2020	PIUTANG YANG TIDAK TERCATA DALAM NERACA	JUMLAH KOREKSI	
1	2	3	4	5 = 3 + 4	6 = 2 + 5
BIRINGKANAYA	Rp57.336.803.549,00	-Rp48.856.752	Rp221.641.855	Rp172.785.103	Rp57.509.588.652,00
BONTOALA	Rp5.600.413.643,00	Rp0	Rp9.624.183	Rp9.624.183	Rp5.610.037.826,00
DAERAH PELABUHAN	Rp9.141.252.842,00	Rp0	Rp0	Rp0	Rp9.141.252.842,00
KEP. SANGKARRANG	Rp5.096.516,00	Rp0	Rp0	Rp0	Rp5.096.516,00
MAKASSAR	Rp6.445.458.542,00	Rp1.622.105	Rp20.997.846	Rp22.619.951	Rp6.468.078.493,00
MAMAJANG	Rp9.653.222.553,00	-Rp205.831.396	Rp12.558.545	-Rp193.272.851	Rp9.459.949.702,00
MANGGALA	Rp29.827.738.379,00	Rp737.284	Rp124.900.472	Rp125.637.756	Rp29.953.376.135,00
MARISO	Rp10.151.091.305,00	-Rp7.985.385	Rp15.344.908	Rp7.359.523	Rp10.158.450.828,00
PANAKKUKANG	Rp61.575.431.587,00	-Rp708.924.941	Rp40.392.952	-Rp668.531.989	Rp60.906.899.598,00
RAPPOCINI	Rp33.972.358.663,00	-Rp284.256.494	Rp69.612.992	-Rp214.643.502	Rp33.757.715.161,00
TALLO	Rp11.714.643.368,00	-Rp249.439.050	Rp32.265.019	-Rp217.174.031	Rp11.497.469.337,00
TAMALANREA	Rp67.425.421.923,00	-Rp222.159.561	Rp83.519.644	-Rp138.639.917	Rp67.286.782.006,00
TAMALATE	Rp55.743.238.347,00	-Rp136.703.462	Rp87.240.473	-Rp49.462.989	Rp55.693.775.358,00
UJUNG PANDANG	Rp16.857.071.939,00	-Rp33.452.480	Rp3.427.813	-Rp30.024.667	Rp16.827.047.272,00
UJUNG TANAH	Rp1.584.374.238,00	Rp0	Rp4.397.516	Rp4.397.516	Rp1.588.771.754,00
WAJO	Rp14.787.690.530,00	-Rp12.742.629	Rp7.067.509	-Rp5.675.120	Rp14.782.015.410,00
PDPT	Rp61.306.191.614,00	Rp0	Rp0	Rp0	Rp61.306.191.614,00
<b>JUMLAH PER KECAMATAN</b>	<b>Rp453.127.499.538,00</b>	<b>-Rp1.907.992.761</b>	<b>Rp732.991.727</b>	<b>-Rp1.175.001.034</b>	<b>Rp451.952.498.504,00</b>



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

**b) Mutasi Penambahan.**

Dari Saldo Piutang PBB setelah dikoreksi yang sebesar Rp. 451.952.498.504,00 mengalami mutasi penambahan sebesar Rp. 232.380.234.501,00 yang terdiri dari :

- Penetapan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan untuk Masa Pajak 2020 di awal tahun 2020 pada 15 Kecamatan dan 153 Kelurahan serta Obyek Pajak Kawasan Pelabuhan sebesar Rp. 249.887.200.366,00 dengan jumlah SPPT sebanyak 356.179 lembar,-.
- Mutasi Ketetapan yang disebabkan Pengurangan Nilai SPPT, Pemecahan, Pembetulan Luas Bumi atau Bangunan SPPT serta Peningkatan Potensi Obyek Pajak Baru dikarenakan Penerbitan SPPT baru sebesar -Rp.17.506.965.865,00.

Dari Mutasi Penambahan sebagaimana yang jelaskan diatas, maka jumlah Piutang PBB untuk Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp.684.332.733.005,00. Sebagai gambaran mutasi penambahan dimaksud diuraikan pada tabel dibawah ini :

**Tabel 50**  
**Mutasi Panambahan Piutang TA 2020**

BULAN	SALDO PIUTANG SETELAH KOREKSI	MUTASI PENAMBAHAN			SALDO PIUTANG SETELAH PENAMBAHAN
		LO/ KETETAPAN 2020 (Cetak Massal)	MUTASI LO/ KETETAPAN 2020	JUMLAH MUTASI PENAMBAHAN	
1	6	7	8	9	10
BIRINGKANAYA	Rp57.509.588.652,00	Rp25.416.710.802,00	-Rp1.269.606.953,00	Rp24.147.103.849,00	Rp81.656.692.501,00
BONTOALA	Rp5.610.037.826,00	Rp5.081.403.319,00	-Rp81.273.540,00	Rp5.000.129.779,00	Rp10.610.167.605,00
DAERAH PELABUHAN	Rp9.141.252.842,00	Rp4.253.641.113,00	Rp0,00	Rp4.253.641.113,00	Rp13.394.893.955,00
KEP. SANGKARRANG	Rp5.096.516,00	Rp54.218.936,00	Rp39.920,00	Rp54.258.856,00	Rp59.355.372,00
MAKASSAR	Rp6.468.078.493,00	Rp8.924.818.845,00	-Rp321.324.498,00	Rp8.603.494.347,00	Rp15.071.572.840,00
MAMAJANG	Rp9.459.949.702,00	Rp6.771.928.392,00	-Rp713.035.754,00	Rp6.058.892.638,00	Rp15.518.842.340,00
MANGGALA	Rp29.953.376.135,00	Rp9.197.898.576,00	-Rp82.648.412,00	Rp9.115.250.164,00	Rp39.068.626.299,00
MARISO	Rp10.158.450.828,00	Rp8.356.424.368,00	-Rp1.112.826.838,00	Rp7.243.597.530,00	Rp17.402.048.358,00
PANAKKUKANG	Rp60.906.899.598,00	Rp44.288.660.166,00	-Rp4.025.653.971,00	Rp40.263.006.195,00	Rp101.169.905.793,00
RAPPOCINI	Rp33.757.715.161,00	Rp27.738.489.896,00	-Rp1.387.599.192,00	Rp26.350.890.704,00	Rp60.108.605.865,00
TALLO	Rp11.497.469.337,00	Rp9.616.039.304,00	-Rp502.111.679,00	Rp9.113.927.625,00	Rp20.611.396.962,00
TAMALANREA	Rp67.286.782.006,00	Rp29.917.587.538,00	-Rp1.186.476.323,00	Rp28.731.111.215,00	Rp96.017.893.221,00
TAMALATE	Rp55.693.775.358,00	Rp38.570.112.683,00	-Rp5.359.212.722,00	Rp33.210.899.961,00	Rp88.904.675.319,00
UJUNG PANDANG	Rp16.827.047.272,00	Rp19.084.433.394,00	-Rp1.166.962.854,00	Rp17.917.470.540,00	Rp34.744.517.812,00
UJUNG TANAH	Rp1.588.771.754,00	Rp1.287.464.648,00	-Rp16.133.984,00	Rp1.271.330.664,00	Rp2.860.102.418,00
WAJO	Rp14.782.015.410,00	Rp11.327.368.386,00	-Rp282.139.065,00	Rp11.045.229.321,00	Rp25.827.244.731,00
PDTT	Rp61.306.191.614,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp61.306.191.614,00
<b>JUMLAH PER KECAMATAN</b>	<b>Rp451.952.498.504,00</b>	<b>Rp249.887.200.366,00</b>	<b>-Rp17.506.965.865,00</b>	<b>Rp232.380.234.501,00</b>	<b>Rp684.332.733.005,00</b>



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

c) **Mutasi Pengurangan.**

Dari Jumlah Piutang PBB Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp.684.332.733.005,00 dan sepanjang perjalanan APBD Tahun Anggaran 2020 terdapat mutasi pengurangan sebesar Rp.165.992.508.214,00 yang secara rinci dijelaskan pada tabel di bawah ini :

**Tabel 51**  
**Mutasi pengurangan Piutang TA. 2020**

KECAMATAN	SALDO PIUTANG SETELAH PENAMBAHAN	PENGURANGAN					PIUTANG AKHIR 2020
		PEMBAYARAN PIUTANG YANG TERCATAT	PEMBAYARAN PIUTANG YANG TIDAK TERCATAT	PEMBAYARAN LO/KETETAPAN 2020	PELUNASAN PIUTANG	JUMLAH PENGURANGAN (POKOK KETETAPAN)	
1	10 = 6 + 9	11	12	13	14	15 = 11 + 12 + 13 + 14	16 = 10 - 15
BIRINGKANAYA	Rp81.656.692.501,00	Rp1.495.902.050,00	Rp221.641.855,00	Rp13.679.176.711,00	Rp0,00	Rp15.396.720.616,00	Rp66.259.971.885,00
BONTOALA	Rp10.610.167.605,00	Rp151.386.742,00	Rp9.624.183,00	Rp4.183.401.696,00	Rp0,00	Rp4.344.412.621,00	Rp6.265.754.984,00
DAERAH PELABUHAN	Rp13.394.893.955,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp4.174.921.021,00	Rp0,00	Rp4.174.921.021,00	Rp9.219.972.934,00
KEP. SANGKARRANG	Rp59.355.372,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp52.050.817,00	Rp0,00	Rp52.050.817,00	Rp7.304.555,00
MAKASSAR	Rp15.071.572.840,00	Rp300.122.624,00	Rp20.997.846,00	Rp6.585.261.738,00	Rp0,00	Rp6.906.382.208,00	Rp8.165.190.632,00
MAMAJANG	Rp15.518.842.340,00	Rp840.000.440,00	Rp12.558.545,00	Rp4.279.635.459,00	Rp0,00	Rp5.132.194.444,00	Rp10.386.647.896,00
MANGGALA	Rp39.068.626.299,00	Rp856.731.277,00	Rp124.900.472,00	Rp3.381.625.626,00	Rp0,00	Rp4.363.257.375,00	Rp34.705.368.924,00
MARISO	Rp17.402.048.358,00	Rp287.389.108,00	Rp15.344.908,00	Rp5.080.718.835,00	Rp0,00	Rp5.383.452.851,00	Rp12.018.595.507,00
PANAKKUKANG	Rp101.169.905.793,00	Rp2.420.354.307,00	Rp40.392.952,00	Rp24.608.716.064,00	Rp0,00	Rp27.069.463.323,00	Rp74.100.442.470,00
RAPPOCINI	Rp60.108.605.865,00	Rp1.833.113.774,00	Rp69.612.992,00	Rp17.501.457.993,00	Rp0,00	Rp19.404.184.759,00	Rp40.704.421.106,00
TALLO	Rp20.611.396.962,00	Rp602.007.706,00	Rp32.265.019,00	Rp7.651.612.826,00	Rp0,00	Rp8.285.885.551,00	Rp12.325.511.411,00
TAMALANREA	Rp96.017.893.221,00	Rp1.945.597.716,00	Rp83.519.644,00	Rp16.471.080.409,00	Rp0,00	Rp18.500.197.769,00	Rp77.517.695.452,00
TAMALATE	Rp88.904.675.319,00	Rp3.490.186.868,00	Rp87.240.473,00	Rp18.513.380.120,00	Rp0,00	Rp22.090.807.461,00	Rp66.813.867.858,00
UJUNG PANDANG	Rp34.744.517.812,00	Rp584.818.229,00	Rp3.427.813,00	Rp13.775.234.923,00	Rp0,00	Rp14.363.480.965,00	Rp20.381.036.847,00
UJUNG TANAH	Rp2.860.102.418,00	Rp26.372.639,00	Rp4.397.516,00	Rp1.093.644.296,00	Rp0,00	Rp1.124.414.451,00	Rp1.735.687.967,00
WAJO	Rp25.827.244.731,00	Rp417.025.533,00	Rp7.067.509,00	Rp8.976.588.940,00	Rp0,00	Rp9.400.681.982,00	Rp16.426.562.749,00
PDTT	Rp61.306.191.614,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp61.306.191.614,00
<b>JUMLAH PER KECAMA</b>	<b>Rp684.332.733.005,00</b>	<b>Rp15.251.009.013,00</b>	<b>Rp732.991.727,00</b>	<b>Rp150.008.507.474,00</b>	<b>Rp0,00</b>	<b>Rp165.992.508.214,00</b>	<b>Rp518.340.224.791,00</b>

Adapun rincian dari pengurangan piutang yang di maksud diatas yakni :

- Pembayaran Piutang untuk Masa Pajak 1994 sd 2019 yang merupakan bagian dari Saldo Piutang Awal yang tercatat dalam Neraca Daerah sebesar Rp15.251.009.013,00.
- Pembayaran Piutang untuk Masa Pajak 1994 sd 2019 yang bukan merupakan bagian dari Saldo Piutang Awal sebesar Rp732.991.727,00.
- Pembayaran Ketetapan Masa Pajak 2020 yang dicetak pada 15 Kecamatan dan 153 Kelurahan serta Obyek Pajak Kawasan Pelabuhan sebesar Rp150.008.507.474,00.



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

7.5.3.1.1.8 Piutang Retribusi

<b>31 Desember 2020</b>	<b>31 Desember 2019</b>
<b>Rp46.017.997.253,00</b>	<b>Rp29.982.675.692,00</b>

Saldo Piutang Retribusi per 31 Desember 2020 sebesar Rp46.017.997.253,00 dicatat berdasarkan nilai nominal sesuai Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang diterbitkan dan belum dilunasi oleh wajib retribusi. Rincian mutasi dan penyesuaian saldo awal piutang retribusi Tahun 2020 dapat diuraikan pada tabel berikut.

**Tabel 52.Rincian Mutasi dan Penyesuaian Saldo Awal Piutang Retribusi Daerah per 31 Desember 2020**

NO	SKPD/Jenis Retribusi	SALDO AKHIR 31/12/2019	KOREKSI SALDO AWAL	SALDO AWAL PER 01/01/2020	MUTASI DI TAHUN 2020		SALDO AKHIR 31/12/2020
					PENAMBAHAN	PENGURANGAN	
1	2	3			4	5	6 = (3+4)-5
	<b>PIUTANG RETRIBUSI UMUM</b>						
<b>A.</b>	<b>Badan Pendapatan Daerah</b>						
-	Retribusi Pelataran	Rp2.231.875.732,00	Rp0,00	Rp2.231.875.732,00	Rp69.248.230,00	Rp227.110.869,00	Rp2.074.013.093,00
	Retribusi Titik Reklame	Rp6.134.683.200,00	Rp0,00	Rp6.134.683.200,00			Rp6.134.683.200,00
<b>B.</b>	<b>DPMP TSP</b>						
-	Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan (IMB)	Rp8.146.174.000,00	Rp510.282.000,00	Rp8.656.456.000,00	Rp2.387.613.700,00	Rp1.957.128.000,00	Rp9.086.941.700,00
-	Retribusi Kompensasi Lahan Pekuburan	Rp2.897.884.000,00	Rp0,00	Rp2.897.884.000,00	Rp10.422.765.000,00	Rp505.411.000,00	Rp12.815.238.000,00
<b>C</b>	<b>Dinas Lingkungan Hidup Daerah</b>						
-	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	Rp373.672.000,00	Rp0,00	Rp373.672.000,00			Rp373.672.000,00
<b>D.</b>	<b>Dinas Komunikasi dan Informatika</b>						
-	Retribusi Menara Telekomunikasi	Rp183.355.000,00	Rp0,00	Rp183.355.000,00			Rp183.355.000,00
<b>E.</b>	<b>Dinas Pemadam Kebakaran</b>						
-	Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam	Rp12.640.000,00	Rp5.550.000,00	Rp18.190.000,00	Rp12.610.000,00	Rp18.190.000,00	Rp12.610.000,00
<b>F.</b>	<b>Dinas Perumahan dan Gedung</b>						
-	Retribusi Sewa Kamar Penghuni Rusunawa	Rp756.660.000,00	Rp0,00	Rp756.660.000,00	Rp179.890.000,00	Rp42.130.000,00	Rp894.420.000,00
<b>G.</b>	<b>PIUTANG RETRIBUSI SAMPAH KECAMATAN</b>						
-	Kecamatan Bontoala	Rp344.119.500,00	Rp0,00	Rp344.119.500,00	Rp561.921.000,00	Rp71.335.000,00	Rp834.705.500,00
-	Kecamatan Biringkanaya	Rp42.603.000,00	Rp0,00	Rp42.603.000,00	Rp230.830.000,00	Rp3.900.000,00	Rp269.533.000,00
-	Kecamatan Makassar	Rp816.770.000,00	Rp0,00	Rp816.770.000,00	Rp168.032.000,00		Rp984.802.000,00
-	Kecamatan Mamajang	Rp1.455.138.000,00	Rp0,00	Rp1.455.138.000,00	Rp950.565.000,00		Rp2.405.703.000,00
-	Kecamatan Mariso	Rp806.765.760,00	Rp0,00	Rp806.765.760,00	Rp399.416.000,00	Rp91.447.000,00	Rp1.114.734.760,00
-	Kecamatan Panakukang	Rp1.495.859.000,00	Rp0,00	Rp1.495.859.000,00	Rp1.040.882.000,00	Rp172.465.000,00	Rp2.364.276.000,00
-	Kecamatan Wajo	Rp1.220.548.000,00	Rp0,00	Rp1.220.548.000,00	Rp903.044.000,00	Rp166.036.000,00	Rp1.957.556.000,00



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

NO	SKPD/Jenis Retribusi	SALDO AKHIR 31/12/2019	KOREKSI SALDO AWAL	SALDO AWAL PER 01/01/2020	MUTASI DI TAHUN 2020		SALDO AKHIR 31/12/2020
					PENAMBAHAN	PENGURANGAN	
1	2	3			4	5	6 = (3+4)-5
-	Kecamatan Manggala	Rp29.448.000,00	Rp0,00	Rp29.448.000,00	Rp272.396.000,00		Rp301.844.000,00
-	Kecamatan Tamalanrea	Rp65.329.000,00	Rp0,00	Rp65.329.000,00	Rp33.230.000,00		Rp98.559.000,00
-	Kecamatan Rappocini	Rp1.407.564.000,00	Rp0,00	Rp1.407.564.000,00	Rp1.736.234.000,00	Rp409.725.000,00	Rp2.734.073.000,00
-	Kecamatan Tallo	Rp369.412.000,00	Rp0,00	Rp369.412.000,00		Rp27.934.000,00	Rp341.478.000,00
-	Kecamatan Tamalate	Rp385.805.000,00	Rp0,00	Rp385.805.000,00	Rp37.105.000,00	Rp346.303.000,00	Rp76.607.000,00
-	Kecamatan Ujung Tanah	Rp381.533.000,00	Rp0,00	Rp381.533.000,00	Rp183.087.000,00	Rp122.718.000,00	Rp441.902.000,00
-	Kecamatan Ujung Pandang	Rp424.837.500,00	Rp0,00	Rp424.837.500,00	Rp92.453.500,00		Rp517.291.000,00
<b>JUMLAH</b>		<b>Rp29.982.675.692,00</b>	<b>Rp515.832.000,00</b>	<b>Rp30.498.507.692,00</b>	<b>Rp19.681.322.430,00</b>	<b>Rp4.161.832.869,00</b>	<b>Rp46.017.997.253,00</b>

**Penyisihan  
Piutang Retribusi**

31 Desember 2020	31 Desember 2019
<b>(Rp14.664.609.961,65)</b>	<b>(Rp10.821.801.073,10)</b>

Atas Piutang Retribusi Daerah sebesar Rp46.017.997.253,00 tersebut dilakukan analisis umur piutang. Nilai penyisihan piutang retribusi tak tertagih per 31 Desember 2020 sebesar Rp14.461.602.716,65 sehingga piutang retribusi daerah disajikan dengan nilai netto sebesar Rp31.353.387.291,35 yang dirinci sebagai berikut.

**Tabel 53. Penyisihan Piutang Retribusi per 31 Desember 2020 dan 2019**

No	SKPD	PENYISIHAN PIUTANG PAJAK	PENYISIHAN PIUTANG PAJAK PER 31 DESEMBER 2020	PENYISIHAN PIUTANG PAJAK PER 31 DESEMBER 2019
1	Badan Pendapatan Daerah	Penyisihan Piutang Pelataran	Rp1.670.671.610,65	Rp1.547.718.195,60
2	Badan Pendapatan Daerah	Penyisihan Piutang Titik Reklame	Rp5.964.183.200,00	Rp5.818.533.200,00
3	Dinas Lingkungan Hidup	Penyisihan Piutang Pelayanan Persampahan/Kebersihan	Rp373.672.000,00	Rp373.672.000,00
4	Dinas Penataan Ruang	Penyisihan Piutang IMB dan Pelataran	Rp4.369.640.768,50	Rp2.124.202.805,00
5	Dinas Penataan Ruang	Penyisihan Piutang Retribusi Kompensasi Lahan Pekuburan	Rp291.361.125,00	Rp162.933.665,00
6	Dinas Komunikasi dan Informatika	Penyisihan Piutang Menara Telekomunikasi	Rp183.355.000,00	Rp183.355.000,00
7	Dinas Perumahan	Penyisihan Piutang Sewa Kamar Penghuni Rusunawa	Rp147.038.450,00	Rp57.608.400,00
8	Dinas Pemadam Kebakaran	Penyisihan Piutang Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam	Rp63.050,00	Rp63.200,00
9	Kecamatan Bontoala	Penyisihan Retribusi Sampah	Rp30.088.055,00	Rp8.692.790,00
10	Kecamatan Biringkanaya	Penyisihan Retribusi Sampah	Rp5.024.450,00	Rp213.015,00
11	Kecamatan Makassar	Penyisihan Retribusi Sampah	Rp242.257.560,00	Rp85.000.945,00
12	Kecamatan Mamejeng	Penyisihan Retribusi Sampah	Rp159.346.625,00	Rp56.810.490,00
13	Kecamatan Mariso	Penyisihan Retribusi Sampah	Rp170.586.460,00	Rp59.347.170,00
14	Kecamatan Panakukang	Penyisihan Retribusi Sampah	Rp193.374.610,00	Rp52.318.535,00
15	Kecamatan Wajo	Penyisihan Retribusi Sampah	Rp430.794.820,00	Rp90.314.730,00
16	Kecamatan Manggala	Penyisihan Retribusi Sampah	Rp16.085.980,00	Rp7.143.200,00
17	Kecamatan Tamalanrea	Penyisihan Retribusi Sampah	Rp32.830.650,00	Rp31.544.500,00
18	Kecamatan Rappocini	Penyisihan Retribusi Sampah	Rp149.536.270,00	Rp62.608.280,00
19	Kecamatan Tallo	Penyisihan Retribusi Sampah	Rp79.131.800,00	Rp14.601.570,00
20	Kecamatan Tamalate	Penyisihan Retribusi Sampah	Rp6.554.125,00	Rp55.265.770,00
21	Kecamatan Ujung Tanah	Penyisihan Retribusi Sampah	Rp106.067.335,00	Rp24.276.555,00
22	Kecamatan Ujung Pandang	Penyisihan Retribusi Sampah	Rp42.946.017,50	Rp5.577.057,50
<b>Jumlah</b>			<b>Rp14.664.609.961,65</b>	<b>Rp10.821.801.073,10</b>



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

Adapun rincian piutang retribusi dan perhitungan penyisihannya dapat dilihat pada *Lampiran 8*.

<b>7.5.3.1.1.9</b>	<b>Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan</b>	<b>31 Desember 2020</b>	<b>31 Desember 2019</b>
		<b>Rp45.126.597.924,47</b>	<b>Rp55.164.423.151,15</b>

Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Tahun 2020 sebesar Rp45.126.597.924,47 merupakan kekurangan Bagian Laba Tahun Buku 2020 yang harus disetor ke Kas Daerah dari PD Pasar Makassar Raya, PD Rumah Pemotongan Hewan, PD Parkir Makassar Raya, dan PDAM Kota Makassar. Rincian dapat dilihat pada tabel berikut dan dapat dilihat pada *Lampiran 9*.

**Tabel 54**  
**Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan**

No.	Jenis Retribusi	Saldo Awal 01/01/2020 (Rp)	Mutasi (Rp)		Saldo Akhir 31/12/2020 (Rp)
			Penambahan	Pengurangan	
1.	PD. Pasar Makassar Raya	Rp748.484.560,70	Rp262.771.764,75	Rp711.064.839,93	Rp300.191.485,54
2.	PD. Rumah Pemotongan Hewan	Rp30.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp30.000.000,00
3.	PD. Parkir Makassar Raya	Rp921.576.476,95	Rp173.029.015,5	Rp443.631.541,00	Rp650.973.951,45
5.	PDAM Kota Makassar	Rp53.464.362.113,50	Rp0,00	Rp9.318.929.626,00	Rp44.145.432.487,50
<b>Jumlah</b>		<b>Rp55.164.423.151,15</b>	<b>Rp435.800.780,25</b>	<b>Rp10.473.626.006,93</b>	<b>Rp45.126.597.924,47</b>

<b>7.5.3.1.1.10</b>	<b>Piutang Dana Bagi Hasil Pajak/ Bukan Pajak</b>	<b>31 Desember 2020</b>	<b>31 Desember 2019</b>
		<b>Rp65.384.585.345,00</b>	<b>Rp85.497.737.088,89</b>

Piutang Dana Bagi Hasil Pajak/ Bukan Pajak per 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebesar Rp65.384.585.345,00 dan sebesar Rp85.497.737.088,89. Piutang tersebut merupakan kurang bayar Pendapatan Bagi Hasil Pajak Provinsi yang belum ditransfer s.d. 31 Desember 2020 terdiri dari Pajak Kendaraan Bermotor, PBBKB, Pajak Bahan Bakar, dan Pajak Air Permukaan untuk bulan Oktober 2020 sebesar Rp18.100.925.977,00, bulan November 2020 sebesar Rp22.563.824.624,00, dan bulan Desember 2020 sebesar Rp24.719.834.744,00.

Adapun Rincian Piutang Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak dapat dilihat pada *Lampiran 10*.



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

7.5.3.1.1.11 **Belanja Dibayar Dimuka**

<b>31 Desember 2020</b>	<b>31 Desember 2019</b>
<b>Rp152.479.166,67</b>	<b>Rp38.668.258,33</b>

Belanja Dibayar Dimuka sampai dengan tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp152.479.166,67. Belanja Dibayar di muka timbul karena terdapat pembayaran sewa/kontrak yang telah terbayarkan namun sampai dengan tanggal 31 Desember 2020 masa kontrak belum habis. Adapun rincian Belanja Dibayar Di muka dapat dilihat pada Tabel di bawah.

**Tabel 55 Rincian Belanja Dibayar Dimuka Per 31 Desember 2020**

No	SKPD	JENIS SEWA DIBAYAR DIMUKA	NOMOR POLIS/KONTRAK	NILAI SEWA/KONTRAK	PERIODE		SISA BULAN	NILAI PER BULAN	NILAI SEWA DIBAYAR DIMUKA
					AWAL	AKHIR			
1	Sekretariat DPRD	Asuransi Kendaraan Operasional Pimpinan DPRD	09-M 000318/2020/0/0	Rp30.000.000,00	18/09/2020	18/09/2021	9	Rp2.500.000,00	Rp22.500.000,00
2	Sekretariat DPRD	Asuransi Gedung Kantor DPRD	09-N 0003957/2020/0/0	Rp50.000.000,00	18/09/2020	18/09/2021	9	Rp4.166.666,67	Rp37.500.000,00
3	Sekretariat DPRD	Asuransi Rumah Dinas Ketua DPRD	09-N 0003958/2020/0/0	Rp20.000.000,00	18/09/2020	18/09/2021	9	Rp1.666.666,67	Rp15.000.000,00
4	Dinas Sosial	Sewa Rumah/Gedung/Kantor Kegiatan Pemberdayaan dan Peningkatan SDM	027/00385/Dinsos/1/2020	Rp50.000.000,00	31/01/2020	31/01/2021	1	Rp4.166.666,67	Rp4.166.666,67
5	Kecamatan Makassar	Sewa Kantor Lurah Maricaya Baru	900/01/KMKS/IX/2020	Rp97.750.000,00	24/09/2020	24/09/2021	9	Rp8.145.833,33	Rp73.312.500,00
<b>Jumlah</b>									<b>Rp152.479.166,67</b>

Adapun rincian mutasi penambahan dan pengurangan belanja dibayar dimuka dapat dilihat pada *Lampiran 14*.

7.5.3.1.1.12 **Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi**

<b>31 Desember 2020</b>	<b>31 Desember 2019</b>
<b>Rp2.265.253.608,00</b>	<b>Rp1.367.311.840,01</b>

Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi sampai dengan tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebesar Rp2.265.253.608,00. Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi adalah Tuntutan Ganti Rugi yang telah ada SKTJM dan akan jatuh tempo dalam 12 bulan.

Adapun rincian Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi dapat dilihat pada *Lampiran 11*.

7.5.3.1.1.13 **Piutang Lainnya**

<b>31 Desember 2020</b>	<b>31 Desember 2019</b>
<b>Rp62.801.334.222,96</b>	<b>Rp60.827.753.653,41</b>

Piutang Lainnya sampai dengan tanggal 31 Desember 2020 yang belum disetorkan ke Kas Daerah atau dipertanggungjawabkan oleh pihak ketiga sebesar Rp62.801.334.222,96 dengan penyisihan sebesar (Rp10.669.561.789,85) sehingga Piutang Lainnya disajikan netto sebesar Rp52.131.772.433,12, seperti pada tabel berikut.



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

**Tabel 56 Piutang Lainnya**

No	Jenis Piutang Lainnya	Saldo Awal 01/01/2020 (Rp)	Mutasi (Rp)		Saldo Akhir 31/12/2020 (Rp)
			Penambahan	Pengurangan	
1	PT. Pelitagro Mustika Karya	Rp923.484.445,48	Rp0,00	Rp330.000.000,00	Rp593.484.445,48
2	PT. Putra-Putra Nusantara	Rp2.267.550.374,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.267.550.374,00
3	PT. Bank Sulselbar (Sewa ATM)	Rp244.850.000,00	Rp734.550.000,00	Rp244.850.000,00	Rp734.550.000,00
4	PT. BNI (Sewa ATM)	Rp45.000.000,00	Rp90.000.000,00	Rp0,00	Rp135.000.000,00
5	PT. Asindoindah Griyatama	Rp0,00	Rp9.395.000,00	Rp0,00	Rp9.395.000,00
6	PT. Ananda IDY Bahagia	Rp0,00	Rp45.000.000,00	Rp0,00	Rp45.000.000,00
7	Fasum/Fasos	Rp580.759.440,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp580.759.440,00
8	Piutang Denda Pajak	Rp56.766.109.393,93	Rp1.884.385.369,50	Rp214.899.800,00	Rp58.435.594.963,43
<b>Jumlah</b>		<b>Rp60.827.753.653,41</b>	<b>Rp2.763.330.369,50</b>	<b>Rp789.749.800,00</b>	<b>Rp62.801.334.222,96</b>

Adapun Rincian Piutang Lainnya dan Penyisihannya dapat dilihat pada **Lampiran 12**.

- a. Piutang Lainnya pada PT Pelitagro Mustika Karya (PT PMK) sebesar Rp923.484.445,48 merupakan tunggakan piutang tahun-tahun sebelumnya yang belum disetor yaitu berupa kontribusi dari aset yang dikerjasamakan antara Pemerintah Kota Makassar dengan PT PMK. Pada tahun 2020 terdapat penyetoran sebesar Rp330.000.000,00, sehingga sisa piutang sebesar Rp593.484.445,48. Sesuai surat Nomor 005/1350/BKS/XI/2015 tentang rapat evaluasi kerjasama Pemerintah Kota Makassar dengan PT PMK dalam pengelolaan pusat pergudangan/terminal *cargo*, bahwa Pemerintah Kota Makassar telah melakukan beberapa kali pertemuan dengan PT PMK untuk membahas tunggakan piutang kontribusi yang belum terselesaikan.
- b. Piutang Lainnya pada PT Putra-Putra Nusantara (PPN) sebesar Rp2.267.550.374,00 yang terdiri atas Piutang Royalti sebesar Rp2.002.751.872,00 dan Piutang Denda TA 2012 sebesar Rp264.798.502,00, sehingga total sebesar Rp2.267.550.374,00. Piutang ini merupakan kewajiban kontribusi PT PPN dalam kerjasama pengelolaan Pulau Kayangan untuk TA 2006 s.d. TA 2012. Pada TA 2012, Pemkot Makassar memutuskan kerjasama dengan PT PPN. Sampai dengan saat ini penyelesaian kewajiban piutang royalti masih belum ada perkembangan. Piutang Lainnya pada PT PPN per 31 Desember 2020 sebesar Rp2.267.550.374,00 dengan penyisihan sebesar Rp2.267.550.374,00 sehingga Piutang PT PPN disajikan netto sebesar Rp0,00.
- c. Piutang Lainnya pada PT. Bank Sulselbar sebesar Rp734.550.000,00 merupakan Piutang atas Sewa Lahan ATM berdasarkan Perjanjian Kerjasama Nomor 180.593.3/32/BPKS/XII/2018 Tanggal 21 Desember 2018, dengan masa perjanjian dimulai pada tanggal 21 Desember 2018 sampai dengan 21 Desember 2023 .
- d. Piutang Lainnya pada PT. Bank Negara Indonesia sebesar Rp135.000.000,00 merupakan Piutang atas Sewa Lahan ATM



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

- berdasarkan Perjanjian Kerjasama Nomor 180.580/058/BPKS/XII/2019 Tanggal 31 Desember 2019, dengan masa perjanjian dimulai pada tanggal 31 Desember 2019 sampai dengan 31 Desember 2022.
- e. Piutang Lainnya pada PT. Asindoindah Griyatama sebesar Rp9.395.000 merupakan piutang Sarana Penyebrangan Multiguna yang menghubungkan Gedung Panakukang Trade Centre (PTC), Panakukang Square (PS) Dengan Gedung Panakukang Mall berdasarkan Perjanjian Kerjasama Nomor 630/026/S.Perja/HK Tanggal 06/ Oktober 2006.
- f. Piutang Lainnya pada PT. Ananda IDY Bahagia sebesar Rp45.000.000 merupakan piutang Sarana Penyebrangan Multiguna yang Menghubungkan Gedung A dan Gedung B RSIA Ananda berdasarkan Perjanjian Kerjasama Nomor 180.5630/026.BPKS/V/2019 Tanggal 07/05/2019 sebagaimana telah di addendum nomor 180.630/019/BPKS/IX/2020 tanggal 14 September 2020, dengan masa perjanjian dimulai pada tanggal 07 Mei 2019 sampai dengan 07 Mei 2024
- g. Piutang Lainnya sebesar Rp580.759.440,00, merupakan piutang dana kompensasi sarana pemakaman umum oleh developer atas fasum/fasus pada Dinas Tata Ruang dan Bangunan yang sumber obyeknya sudah tidak diketahui.

**7.5.3.1.1.14 Piutang BLUD**

31 Desember 2020	31 Desember 2019
<b>Rp1.695.623.493,00</b>	<b>Rp11.446.044.628,00</b>

Piutang Badan Layanan Umum Daerah RSUD Kota Makassar merupakan piutang tahun 2020 sebesar Rp1.695.623.493,00. Piutang tersebut merupakan Piutang BPJS, yang pada tahun 2020 telah terbayarkan sebesar Rp9.750.421.135,00. Rincian piutang BLUD dapat dilihat pada *Lampiran 15*.

**7.5.3.1.1.15 Persediaan**

31 Desember 2020	31 Desember 2019
<b>Rp71.136.689.269,72</b>	<b>Rp46.822.132.784,81</b>

Persediaan barang pakai habis/material adalah barang yang dipakai habis dalam satu periode akuntansi, persediaan barang pakai habis/material terdiri dari Obat-obatan, Alat Tulis Kantor (ATK), Barang Cetakan, Alat Listrik dan Lain-lain. Persediaan diakui pada akhir priode akuntansi berdasarkan nilai barang yang belum terjual atau terpakai dan diukur berdasarkan hasil inventarisasi fisik barang yang belum terpakai yang dicantumkan ke dalam neraca daerah.

Persediaan sampai dengan tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp71.136.689.269,72. Jika dibandingkan dengan Persediaan per 31 Desember 2019 sebesar Rp46.822.132.784,81 maka Persediaan TA 2020



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

mengalami peningkatan sebesar Rp24.314.556.484,91 atau 51,93%, hal ini disebabkan meningkatnya sisa barang pakai habis pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kota Makassar.

**Tabel 57 Saldo Persediaan  
Per 31 Desember 2020 dan 2019**

No.	Jenis Persediaan	Saldo Per 31 Des 2020 (Rp)	Saldo Per 31 Des 2019 (Rp)
1.	Obat-Obatan	Rp34.584.827.068,74	Rp23.861.205.702,81
2.	Bahan Bangunan	Rp7.764.143.664,39	Rp0,00
3.	Bahan Baku	Rp71.000.000,00	Rp0,00
4.	ATK	Rp4.247.214.031,33	Rp1.324.889.401,00
5.	Bahan Komputer	Rp106.778.792,00	Rp0,00
6.	Barang Cetak	Rp45.335.000,00	Rp1.101.262.882,00
7.	Kertas dan Cover	Rp421.770.520,90	Rp0,00
8.	Perabot Kantor	Rp133.936.640,00	Rp0,00
9.	Alat Listrik	Rp5.027.831.560,00	Rp12.058.132.460,00
10.	Tabung Gas	Rp0,00	Rp0,00
11.	Alat Pembersih	Rp0,00	Rp42.620.724,00
12.	Alat Kesehatan	Rp6.016.047.700,26	Rp213.551.670,00
13.	Alat Bengkel	Rp1.031.153.245,00	Rp1.391.825.640,00
14.	Lain-lain	Rp11.401.319.127,10	Rp6.828.644.305,00
15.	Persediaan Hibah	Rp285.331.920,00	Rp0,00
<b>Jumlah</b>		<b>Rp71.136.689.269,72</b>	<b>Rp46.822.132.784,81</b>

Rincian persediaan per jenis dan per OPD disajikan dalam *Lampiran 16*.

**7.5.3.1.2 Investasi Jangka Panjang**

31 Desember 2020	31 Desember 2019
<b>Rp744.676.329.433,52</b>	<b>Rp722.610.453.340,27</b>

Investasi jangka panjang merupakan investasi yang diadakan dengan maksud untuk mendapatkan manfaat ekonomi dan manfaat sosial dalam jangka waktu lebih dari satu periode akuntansi. Investasi jangka panjang meliputi investasi nonpermanen dan permanen. Investasi nonpermanen antara lain investasi dalam Surat Utang Negara, penyertaan modal dalam proyek pembangunan, dan investasi non permanen lainnya. Investasi permanen antara lain penyertaan modal Pemerintah Kota Makassar dan investasi permanen lainnya.

Saldo Investasi Jangka panjang per 31 Desember 2020 sebesar Rp744.676.329.433,52 dan per 31 Desember 2019 sebesar Rp722.610.453.340,27 yang terdiri dari Investasi Non Permanen sebesar Rp9.140.000,00 dan Investasi Permanen sebesar Rp744.667.189.433,52.



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

7.5.3.1.2.1 **Investasi Non  
Permanen**

31 Desember 2020	31 Desember 2019
<b>Rp9.140.000,00</b>	<b>Rp10.520.500,00</b>

Investasi Non Permanen Lainnya adalah pengeluaran pembiayaan berupa pinjaman kepada kelompok masyarakat dalam rangka peningkatan permodalan dan perekonomian masyarakat dengan jangka waktu pengembalian lebih dari 1 tahun. Investasi Non Permanen Pemerintah Kota Makassar merupakan Pinjaman Modal pada Dinas Koperasi dan UKM kepada Koperasi dan Kelompok Usaha Kecil Menengah.

Saldo pinjaman modal per 31 Desember 2020 sebesar Rp9.140.000,00 berasal dari saldo tahun sebelumnya sebesar Rp3.650.700.000,00 dikurangi pelunasan pinjaman modal pada tahun 2020 sebesar Rp1.001.057.100,00 dan penurunan saldo akibat penggunaan metode NRV sebesar Rp2.631.362.900,00. Rincian pada *Lampiran 17*.

7.5.3.1.2.2 **Investasi  
Permanen**

31 Desember 2020	31 Desember 2019
<b>Rp744.667.189.433,52</b>	<b>Rp722.599.932.840,27</b>

Investasi Permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan dan dicatat berdasarkan harga perolehan. Investasi permanen yang dilakukan oleh pemerintah adalah investasi yang tidak dimaksudkan untuk diperjualbelikan, tetapi untuk mendapatkan deviden dan/atau pengaruh yang signifikan dalam jangka panjang dan/atau menjaga hubungan kelembagaan.

Saldo Investasi Permanen per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp744.667.189.433,52 atau mengalami peningkatan sebesar Rp22.067.256.593,25 dari saldo per 31 Desember 2019 sebesar Rp722.599.932.840,27. Diantaranya merupakan penyertaan dalam bentuk saham pada perusahaan swasta sebesar Rp74.300.000.000,00 dan penyertaan modal pada BUMD sebesar Rp670.367.189.433,52.

Dalam Investasi Permanen yang berupa Penyertaan Modal terhadap Perusahaan Daerah/BUMD Pemerintah Kota Makassar sudah menggunakan *equity method* sehingga nilai investasinya berpedoman dari laba/rugi Perusda/BUMD. Untuk perhitungan nilai investasi atas penyertaan modal Perusahaan Daerah per 31 Desember 2020, berdasarkan Laporan Keuangan Perusahaan Daerah *Audited*, dengan rincian sebagai berikut.



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

**Tabel 58 Investasi Permanen**

No	Uraian	Saldo Akhir 31/12/2019 (Rp)	Saldo Awal 01/01/2020 (Rp)	Penambahan 2020 (Rp)	Laba /Rugi TA.2020 (Rp)	Pembayaran Dividen TA.2020 (Rp)	Saldo Akhir 31/12/2020 (Rp)
	<b>Metode Biaya</b>						
1	PT. GMTD	Rp3.300.000.000,00	Rp3.300.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.300.000.000,00
2	PT. KIMA	Rp4.000.000.000,00	Rp4.000.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp4.000.000.000,00
3	SULSELBAR	Rp67.000.000.000,00	Rp67.000.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp67.000.000.000,00
	<b>Jumlah I</b>	<b>Rp74.300.000.000,00</b>	<b>Rp74.300.000.000,00</b>	<b>Rp0,00</b>	<b>Rp0,00</b>	<b>Rp0,00</b>	<b>Rp74.300.000.000,00</b>
	<b>Metode Ekuitas</b>						
1	PD. Pasar Makassar Raya	Rp193.855.521.852,00	Rp193.910.498.575,00	(Rp520.531.572,07)	Rp477.766.845,00	Rp711.064.839,93	Rp193.156.669.008,00
2	PD. Rumah Pemotongan Hewan	Rp4.664.864.781,59	Rp4.664.864.781,59	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp4.664.864.781,59
3	PD. Terminal Makassar Metro	Rp60.867.157.417,31	Rp60.857.914.837,33	Rp0,00	(Rp158.777.795,39)	Rp0,00	Rp60.699.137.041,94
4	PD. Parkir Makassar Raya	Rp6.825.439.697,00	Rp6.825.439.697,00	(Rp21.892.056,00)	Rp314.598.210,00	Rp443.631.541,00	Rp6.674.514.310,00
5	PD. Bank Perkreditan Rakyat	Rp4.319.355.774,37	Rp4.319.355.774,37	(Rp256.315.045,30)	(Rp92.929.304,46)	Rp0,00	Rp3.970.111.424,61
6	PD. Air Minum (PDAM)	Rp377.767.593.318,00	377.766.377.201,33	(Rp2.461.093.651,49)	Rp36.558.085.128,05	Rp9.318.929.626,00	Rp401.201.892.867,38
	<b>Jumlah II</b>	<b>Rp648.299.932.840,27</b>	<b>Rp648.344.450.866,62</b>	<b>(Rp3.259.832.324,86)</b>	<b>Rp37.098.743.083,20</b>	<b>Rp10.473.626.006,93</b>	<b>Rp670.367.189.433,52</b>
	<b>Jumlah Total</b>	<b>Rp722.599.932.840,27</b>	<b>Rp722.644.450.866,62</b>	<b>(Rp3.259.832.324,86)</b>	<b>Rp37.098.743.083,20</b>	<b>Rp10.473.626.006,93</b>	<b>Rp744.676.329.433,52</b>

Penjelasan penyertaan modal Pemerintah Kota Makassar pada perusahaan daerah dengan menggunakan Metode Ekuitas diuraikan sebagai berikut. Rincian dapat dilihat dalam *Lampiran 18 dan 19*.

<b>1) PD. Pasar Makassar Raya</b>	<b>Rp 193.156.669.008,00</b>
Rincian sebagai berikut:	
- Saldo Awal	Rp 193.855.521.852,00
- Penambahan investasi disebabkan laba/rugi tahun berjalan	Rp 477.766.845,00
- Pengurangan investasi disebabkan pembayaran dividen	Rp 711.064.839,93
- Pengurangan investasi disebabkan penyesuaian ekuitas akhir	Rp (520.531.572,07)
<b>2) PD. Rumah Potong Hewan</b>	<b>Rp 4.664.864.781,59</b>
Rincian sebagai berikut:	
- Saldo Awal	Rp 4.664.864.781,59
- Penambahan investasi dari laba/rugi tahun berjalan	Rp 0,00
- Pengurangan investasi disebabkan adanya pembayaran dividen	Rp 0,00



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

<b>3) PD. Terminal Makassar Metro</b>	<b>Rp</b>	<b>60.699.137.041,94</b>
Rincian sebagai berikut:		
- Saldo Awal	Rp	60.867.157.417,31
- Penambahan investasi dari laba/rugi tahun	Rp	0,00
- Pengurangan investasi disebabkan adanya laba/rugi tahun berjalan	Rp	(158.777.795,39)
- Pengurangan investasi disebabkan penyesuaian ekuitas akhir	Rp	(9.242.579,98)
<b>4) PD. Parkir Makassar Raya</b>	<b>Rp</b>	<b>6.674.514.310,00</b>
Rincian sebagai berikut:		
- Saldo Awal	Rp	6.825.439.697,00
- Penambahan investasi disebabkan adanya laba/rugi tahun berjalan	Rp	314.598.210,00
- Pengurangan investasi disebabkan adanya pembayaran deviden	Rp	443.631.541,00
- Pengurangan investasi disebabkan penyesuaian ekuitas akhir	Rp	(21.892.056,00)
<b>5) PD. Bank Perkreditan Rakyat</b>	<b>Rp</b>	<b>3.970.111.424,61</b>
Rincian sebagai berikut :		
- Saldo Awal	Rp	4.319.355.774,37
- Penambahan investasi disebabkan akumulasi laba/rugi	Rp	(92.929.304,46)
- Pengurangan investasi disebabkan penyesuaian ekuitas akhir	Rp	(256.315.045,30)
<b>6) PD. Tirta PDAM</b>	<b>Rp</b>	<b>401.201.892.867,38</b>
Rincian sebagai berikut :		
- Saldo Awal	Rp	377.767.593.318,00
- Penambahan investasi disebabkan akumulasi laba/rugi	Rp	36.558.085.128,05
- Pengurangan investasi disebabkan adanya pembayaran deviden	Rp	9.318.929.626,00
- Pengurangan investasi disebabkan penyesuaian ekuitas akhir	Rp	(2.462.309.768,15)

Penjelasan penyertaan modal Pemerintah Kota Makassar pada perusahaan swasta dan perusahaan daerah dapat diuraikan sebagai berikut:

**1) PT Gowa Makassar Tourism Development Tbk**

Penyertaan awal pada PT Gowa Makassar Tourism Development Tbk. (PT. GMTD Tbk.) yang bergerak pada bidang investasi dan pengembangan *real estate* dan properti dilakukan pada tahun 1991. Telah ditetapkan Peraturan Daerah Pemerintah Kota Makassar Nomor 6 Tahun 1992 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah tanggal 26 Juni 2017 sampai dengan 31 Desember 2020, penyertaan modal Pemerintah Kota Makassar pada PT GMTD Tbk. adalah sebesar Rp3.300.000.000,00 atau 6,5% dari seluruh modal disetor sedangkan nilai investasinya dengan menggunakan metode biaya. Pada tahun



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

---

2020 Pemerintah Kota Makassar menerima deviden dari penyertaan modal pada PT GMTD Tbk. sebesar Rp132.000.000,00.

**2) PT KIMA**

Penyertaan awal pada PT Kawasan Industri Makassar (PT KIMA) yang bergerak pada bidang usaha penyediaan prasarana pembangunan, pengurusan, pengusahaan dan pengembangan serta melakukan kegiatan di bidang kawasan industri dan jasa dilakukan pada tahun 1986. Atas penyertaan awal sebesar Rp4.000.000.000,00. Telah ditetapkan Peraturan Daerah Pemerintah Kota Makassar Nomor 5 Tahun 1986 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang Dalam Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) Kawasan Industri Ujung Pandang tanggal 16 Mei 1988. Nilai penyertaan modal Pemerintah Kota Makassar pada PT KIMA sebesar Rp4.000.000.000,00 atau 10,00% dari seluruh modal disetor sedangkan nilai investasinya dengan menggunakan metode biaya adalah sebesar Rp4.000.000.000,00. Pada tahun 2020 Pemerintah Kota Makassar menerima deviden dari penyertaan modal pada PT KIMA sebesar Rp240.243.464,00.

**3) PT Bank Sulselbar**

Penyertaan awal pada PT Bank Sulselbar yang bergerak dalam bidang usaha perbankan dilakukan pada tahun 2015 dengan penyertaan awal sebesar Rp17.000.000.000,00. Sampai dengan 31 Desember 2020 nilai penyertaan modal kepada PT Bank Sulselbar adalah sebesar Rp17.000.000.000,00 atau 1,90% dari seluruh modal disetor sedangkan nilai investasinya dengan menggunakan metode biaya sebesar Rp67.000.000.000,00. Pada tahun 2020 Pemerintah Kota Makassar menerima deviden dari penyertaan modal pada PT Bank Sulselbar senilai Rp6.367.217.139,00.

**4) PD Pasar Makassar Raya**

Penyertaan awal pada PD Pasar Makassar Raya (PD PMR) yang bergerak pada bidang pembangunan dan peremajaan pengelolaan pasar tradisional dilakukan pada tahun 1999. Telah ditetapkan Peraturan Daerah Pemerintah Kota Makassar Nomor 6 Tahun 1999 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Pasar Makassar Raya Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 17 Tahun 2012 dan Peraturan Daerah Nomor 12 tahun 2004 tentang Pengurusan Pasar dalam Wilayah Daerah Kota Makassar. Sampai dengan 31 Desember 2020, penyertaan modal Pemerintah Kota Makassar pada PD PMR adalah sebesar Rp193.156.669.008,00 atau 100% dari seluruh modal disetor sedangkan penilaian investasinya dengan menggunakan metode ekuitas. Pada tahun 2020 Pemerintah Kota Makassar menerima deviden dari penyertaan modal pada PD PMR sebesar Rp711.064.839,93,00.



**5) PD Rumah Potong Hewan**

Penyertaan awal pada PD Rumah Potong hewan (PD RPH) yang bergerak pada bidang pemotongan hewan adalah penyediaan daging dan melindungi konsumen, memperbaiki sarana dan prasarana, pengamanan dan keamanan kepada pengusaha dilakukan pada Tahun 1999. Telah ditetapkan Peraturan Daerah Pemerintah Kota Makassar Nomor 6 Tahun 1999 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Rumah Potong Hewan Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang. Sampai dengan 31 Desember 2020, penyertaan modal Pemerintah Kota Makassar pada PD RPH adalah sebesar Rp4.664.864.781,59 atau 100% dari seluruh modal disetor sedangkan penilaian investasinya dengan menggunakan metode ekuitas. Pada tahun 2020 Pemerintah Kota Makassar tidak menerima deviden dari penyertaan modal pada PD RPH karena merugi. Untuk TB 2020 laporan keuangan PD RPH belum dilakukan audit oleh kantor akuntan publik.

**6) PD Terminal Makassar Metro**

Penyertaan awal pada PD Terminal Makassar Metro (PD TMM) yang bergerak pada bidang pelayanan umum kepada masyarakat dalam hal memenuhi kebutuhan jasa dan sarana serta fasilitas di bidang Terminal dilakukan pada Tahun 1999. Telah ditetapkan Peraturan Daerah Pemerintah Kota Makassar Nomor 16 Tahun 1999 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Terminal Makassar Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang. Sampai dengan 31 Desember 2020, penyertaan modal Pemerintah Kota Makassar pada PD TMM adalah sebesar Rp60.699.137.041,94 atau 100% dari seluruh modal disetor sedangkan penilaian investasinya dengan menggunakan metode ekuitas. Pada tahun 2020 Pemerintah Kota Makassar tidak menerima deviden dari PD Terminal Makassar Metro.

**7) PD Parkir Makassar Raya**

Penyertaan awal pada PD Parkir Makassar Raya (PD PMK) yang bergerak pada bidang pelayanan umum kepada masyarakat di bidang sarana perparkiran dilakukan pada tahun 1999. Telah ditetapkan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 5 Tahun 1999 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Terminal Makassar Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang. Sampai dengan 31 Desember 2020, penyertaan modal Pemerintah Kota Makassar pada PD PMK adalah sebesar Rp6.674.514.310,00 atau 100% dari seluruh modal disetor. Pada tahun 2020 Pemerintah Kota Makassar menerima deviden dari penyertaan modal pada PD Parkir Makassar Raya sebesar Rp443.631.541,00.

**8) PD Bank Perkreditan Rakyat Makassar Sombere'**

Penyertaan awal pada PD Bank Perkreditan Rakyat (PD BPR) yang bergerak pada bidang perbankan dilakukan pada Tahun 1996. Telah ditetapkan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 4 Tahun 1996



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang dengan modal pertama sebesar Rp2.000.000.000,00 selanjutnya diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2017 tanggal 2 November 2017 tentang Perubahan Badan Hukum Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kota Makassar menjadi perusahaan perseroan terbatas Bank Perkreditan Rakyat Kota Makassar dengan modal dasar menjadi sebesar Rp20.000.000.000,00 dan modal disetor sebesar Rp5.202.382.300,00. Sampai dengan 31 Desember 2020, penyertaan modal Pemerintah Kota Makassar pada PD BPR adalah sebesar Rp3.970.111.424,61 atau 100% dari seluruh modal disetor. Pada tahun 2020 Pemerintah Kota Makassar tidak menerima deviden dari penyertaan modal pada PD BPR karena PD BPR merugi. Perusahaan yang masih aktif dan merugi ini belum diaudit oleh KAP karena modalnya masih di bawah Rp5.000.000.000,00. Terdapat permasalahan terkait peraturan perbankan karena permodalannya 4% dari ATMR bank minimal 8% dan merupakan Bank Dalam Pengawasan Khusus oleh OJK. PD. BPR saat ini dalam proses peralihan status dari Perusahaan Daerah (PD) menjadi Perseroan Terbatas (PT) yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Makassar.

**9) Perusahaan Daerah Air Minum Kota Makassar**

Penyertaan awal pada PD Air Minum (PDAM) yang bergerak pada bidang pelayanan air minum dilakukan pada tahun 1974. Telah ditetapkan Peraturan Daerah Tingkat II Ujung Pandang Nomor 6 tahun 1974 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Daerah Tingkat II Ujung Pandang. Sampai dengan 31 Desember 2020, penyertaan modal Pemerintah Kota Makassar pada PDAM adalah sebesar Rp401.201.892.867,38 atau 96,33% dari seluruh modal disetor. Pada tahun 2020, Pemerintah Kota Makassar menerima deviden dari penyertaan modal pada PDAM sebesar Rp9.318.929.626,00.

	<b>31 Desember 2020</b>	<b>31 Desember 2019</b>
<b>7.5.3.1.3 Aset Tetap</b>	<b>Rp27.653.198.515.934,60</b>	<b>Rp27.034.458.722.847,30</b>

Aset tetap adalah aset berwujud dengan masa manfaat lebih dari dua belas bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Aset tetap meliputi Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan, Irigasi, dan Jaringan, Aset Tetap Lainnya, dan Konstruksi Dalam Pengerjaan. Saldo Aset tetap Pemerintah Kota Makassar per 31 Desember 2020 dan 2019 sebesar Rp27.653.198.515.934,60 dan Rp27.034.458.722.847,30 yang terdiri dari:



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

**Tabel 59 Mutasi Aset Tetap**

NO	ASSET TETAP	SALDO PER 31 Desember 2019	Penyesuaian Saldo Awal		SALDO PER 1 JANUARI 2020
			Bertambah	Berkurang	
1	Tanah	Rp23.990.517.029.435,40	Rp0,00	Rp0,00	Rp23.990.517.029.435,40
2	Peralatan dan Mesin	Rp1.373.090.121.546,23	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.373.090.121.546,23
3	Gedung dan Bangunan	Rp1.387.780.352.960,30	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.387.780.352.960,30
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	Rp5.831.425.014.789,41	Rp0,00	Rp0,00	Rp5.831.425.014.789,41
5	Aset Tetap Lainnya	Rp27.134.424.750,38	Rp0,00	Rp0,00	Rp27.134.424.750,38
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	Rp109.882.231.921,18	Rp0,00	Rp0,00	Rp109.882.231.921,18
7	Akumulasi Penyusutan	(Rp5.685.370.452.556,19)	Rp0,00	Rp0,00	(Rp5.685.370.452.556,19)
<b>JUMLAH ASET TETAP</b>		<b>Rp27 034 458 722 847,30</b>	<b>Rp0,00</b>	<b>Rp0,00</b>	<b>Rp27 034 458 722 847,40</b>

SALDO AWAL 01 Januari 2020	MUTASI TAHUN 2020			PENYESUAIAN AKUMULASI PENYUSUTAN TAHUN 2020	SALDO AKHIR 31/12/2020
	(LRA TA 2019)	Bertambah	Berkurang		
7	8	9	10	11	12
Rp23.990.517.029.435,40	Rp0,00	Rp772.838.934.530,00	Rp59.948.474.214,00	Rp0,00	Rp24.703.407.489.751,40
RP1.373.090.121.546,23	Rp59.823.460.691,87	Rp117.833.691.120,97	Rp63.295.041.396,00	Rp0,00	RP1.487.452.231.963,07
Rp1.387.780.352.960,30	Rp65.093.458.020,00	Rp43.819.666.852,70	Rp27.072.756.761,00	Rp0,00	RP1.469.620.721.072,00
Rp5.831.425.014.789,41	Rp113.433.294.536,00	Rp209.311.000,00	Rp68.352.215.421,00	Rp0,00	RP5.876.715.404.904,41
Rp27.134.424.750,38	Rp2.738.642.396,00	Rp52.449.838.227,00	Rp50.336.722.522,08	Rp0,00	RP31.986.182.851,30
Rp109.882.231.921,18	Rp0,00	Rp63.828.113.187,39	Rp0,00	Rp0,00	RP173.710.345.107,56
(Rp5.685.370.452.556,19)	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	(Rp404.323.407.158,98)	(Rp6.089.693.859.715,17)
Rp27.034.458.722.847,40	Rp241.088.855.643,87	Rp1.050.979.554.918,06	Rp269.005.210.314,08	(Rp404.288.896.738,440)	Rp27.653.198.515.934,60

Rincian lebih lanjut dapat dilihat pada **Lampiran 20**.

**7.5.3.1.3.1 Tanah**

31 Desember 2020	31 Desember 2019
<b>Rp24.703.407.489.751,40</b>	<b>Rp23.990.517.029.435,48</b>

Saldo Tanah per 31 Desember 2020 dan 2019 milik Pemerintah Kota Makassar sebesar Rp24.703.407.489.751,40 dan sebesar Rp23.990.517.029.435,48 mengalami kenaikan sebesar Rp712.890.460.316,00 dibandingkan tahun sebelumnya. Peningkatan Tanah dipengaruhi oleh hibah fasum fasos dan divestasi pada tahun anggaran 2020. Rincian Aset Tetap Tanah Per 31 Desember 2020 dapat dilihat pada **Lampiran 20a**.

Permasalahan aset tetap dan aset lainnya berdasarkan tabel tersebut di atas, diungkapkan secara rinci baik dalam proses penyelesaian maupun yang sudah selesai dalam proses. Rincian pengungkapan ada dalam bagian **Lampiran Pengungkapan Permasalahan Aset** yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari LKPD TA 2020.



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

7.5.3.1.3.2 Peralatan dan Mesin

31 Desember 2020	31 Desember 2019
Rp1.487.452.231.963,07	Rp1.373.090.121.546,23

Peralatan dan mesin milik Pemerintah Kota Makassar per 31 Desember 2020 dan 2019 sebesar Rp1.487.452.231.963,07 dan sebesar Rp1.373.090.121.546,23. Saldo Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2020 mengalami peningkatan sebesar Rp114.362.110.416,84 dibandingkan tahun sebelumnya.

Rincian Aset Tetap Peralatan dan Mesin Per 31 Desember 2020 dapat dilihat pada *Lampiran 20b*.

7.5.3.1.3.3 Gedung dan Bangunan

31 Desember 2020	31 Desember 2019
Rp1.469.620.721.072,00	Rp1.387.780.352.960,30

Gedung dan Bangunan milik Pemerintah Kota Makassar Per 31 Desember 2020 dan 2019 Rp1.469.620.721.072,00 dan sebesar Rp1.387.780.352.960,30. Saldo Gedung dan Bangunan mengalami peningkatan sebesar Rp81.840.368.111,70 dibandingkan tahun sebelumnya.

Rincian Aset Tetap Gedung dan Bangunan Per 31 Desember 2020 dapat dilihat pada *Lampiran 20c*.

Pada aset tetap gedung dan bangunan terdapat penguasaan penggunaannya oleh pihak ketiga yaitu PT. Pelitagro Mustika Karya (PT PMK) yang belum dimasukkan di dalam kemitraan dengan pihak ketiga sebesar Rp6.756.120.000,00 karena masih dalam proses revisi/adendum bentuk kerja sama menyangkut penggunaan aset tetap antara Pemerintah Kota Makassar dengan PT PMK. Rincian bangunan yang dimanfaatkan tersebut adalah sebagai berikut.

**Tabel 60 Gedung dan Bangunan yang Digunakan Dalam Kemitraan Terminal Kargo**

*dalam Rupiah*

No	Jenis Barang	Bahan	Asal Perolehan	Ukuran Barang	Kondisi/ Satuan	Kondisi	Jumlah Barang	Nilai (Rp)
1	Gedung Cargo Terminal	Beton	APBD	90	m2	B	1	Rp75.600.000,00
2	Gedung Unit I Cargo Terminal	Beton	APBD	1.440	m2	B	1	Rp1.108.800.000,00
3	Gedung Unit II Cargo Terminal	Beton	APBD	1.440	m2	B	1	Rp1.108.800.000,00
4	Gedung Unit III Cargo Terminal	Beton	APBD	1.440	m2	B	1	Rp1.108.800.000,00
5	Gedung Unit IV Cargo Terminal	Beton	APBD	1.440	m2	B	1	Rp1.108.800.000,00
6	Gedung Unit V Cargo Terminal	Beton	APBD	1.440	m2	B	1	Rp1.108.800.000,00
7	Gedung Unit VI Cargo Terminal	Beton	APBD	1.440	m2	B	1	Rp1.108.800.000,00
8	Mushallah Cargo Terminal	Beton	APBD	24	m2	B	1	Rp18.480.000,00
9	Pos Jaga Terminal	Beton	APBD	12	m2	B	1	Rp9.240.000,00
<b>JUMLAH</b>								<b>Rp6.756.120.000,00</b>



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

7.5.3.1.3.4	<b>Jalan, Irigasi dan Jaringan</b>	<b>31 Desember 2020</b>	<b>31 Desember 2019</b>
		<b>Rp5.876.715.404.904,41</b>	<b>Rp5.831.425.014.789,41</b>

Saldo Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2020 dan 2019 sebesar Rp5.876.715.404.904,41 dan sebesar Rp5.831.425.014.789,41 mengalami peningkatan sebesar Rp45.241.682.115,00 dibandingkan tahun sebelumnya.

Rincian Aset Tetap Jalan, Jaringan dan Irigasi Per 31 Desember 2020 dapat dilihat pada *Lampiran 20d*.

7.5.3.1.3.5	<b>Aset Tetap Lainnya</b>	<b>31 Desember 2020</b>	<b>31 Desember 2019</b>
		<b>Rp31.986.182.851,30</b>	<b>Rp27.134.424.750,38</b>

Aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap digunakan.

Aset Tetap Lainnya milik Pemerintah Kota Makassar sampai dengan periode 31 Desember 2020 dan 2019 sebesar Rp31.986.182.851,30 dan sebesar Rp27.134.424.750,38 mengalami peningkatan sebesar Rp4.851.758.100,92 dibandingkan tahun sebelumnya. Rincian Aset Tetap Lainnya Per 31 Desember 2020 dapat dilihat pada *Lampiran 20e*.

7.5.3.1.3.6	<b>Konstruksi Dalam Pengerjaan</b>	<b>31 Desember 2020</b>	<b>31 Desember 2019</b>
		<b>Rp173.710.345.107,56</b>	<b>Rp109.882.231.921,81</b>

Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) adalah aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan, yang pada tanggal neraca belum selesai dibangun seluruhnya.

KDP adalah Bangunan milik Pemerintah Kota Makassar yang masih dalam pembangunan/penyelesaian fisik sampai dengan 31 Desember 2020 dan 2019 sebesar Rp173.710.345.107,56 dan sebesar Rp109.882.231.921,81.

Pengakuan KDP menjadi aset tetap gedung dan bangunan serta jalan, irigasi dan jaringan dilakukan apabila aset tersebut sudah diselesaikan seratus persen dengan penyerahan berita acara pertama atau PHO, dan secara substansi sudah dimanfaatkan Pemerintah Kota Makassar, dapat dilihat pada *Lampiran 20f*.

Pemerintah Kota Makassar menerapkan kebijakan akuntansi batas minimum kapitalisasi dalam penyajian aset tetap. Dengan demikian perolehan aset tetap yang berada di bawah kapitalisasi disajikan dalam *extra comptable* aset dan disajikan sebagai beban lain-lain (*capital expenditure*) pada Laporan Operasional. Rincian dapat dilihat pada *Lampiran 20g*.



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

7.5.3.1.3.7 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	31 Desember 2020	31 Desember 2019
	(Rp6.089.693.859.715,17)	(Rp5.685.370.452.556,19)

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Pemerintah Kota Makassar sampai dengan periode 31 Desember 2020 dan 2019 sebesar (Rp6.089.693.859.715,17) dan sebesar (Rp5.685.370.452.556,19) mengalami peningkatan sebesar Rp404.323.407.158,98 dibandingkan tahun sebelumnya.

Akumulasi penyusutan aset tetap terdiri dari:

- Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin sebesar Rp1.057.171.292.502,46;
- Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan sebesar Rp467.769.063.032,44;
- Akumulasi Penyusutan Jalan Irigasi dan Jaringan sebesar Rp4.559.231.009.650,81; dan
- Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya sebesar Rp5.522.494.529,46.

Secara Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap dapat dilihat pada *Lampiran 21*.

7.5.3.1.4 Dana Cadangan	31 Desember 2020	31 Desember 2019
	Rp0,00	Rp0,00

Pada Tahun Anggaran 2020 Pemerintah Kota Makassar tidak membentuk Dana Cadangan.

7.5.3.1.5 Aset Lainnya	31 Desember 2020	31 Desember 2019
	Rp364.067.561.605,26	Rp391.109.381.200,22

Aset lainnya adalah aset pemerintah yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan.

Aset lainnya pada Pemerintah Kota Makassar per 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebesar Rp364.067.561.605,26 dan Rp391.109.381.200,22 yang terdiri atas:



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

**Tabel 61 Mutasi Aset Lainnya**

*dalam Rupiah*

No.	Uraian	Saldo per 31 Des 2019	Mutasi (Rp)		Saldo Per 31 Des 2020
			Bertambah	Berkurang	
1	Tuntutan Ganti Rugi	Rp614.923.500,00	Rp6.469.482.632,00	Rp614.923.500,00	Rp6.469.482.632,00
2	Kemitraan Dengan Pihak Ketiga	Rp157.439.639.815,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp157.439.639.815,00
3	Aset Tak Berwujud	Rp24.316.081.151,00	Rp174.000.000,00	Rp0,00	Rp24.490.081.151,00
4	Akumulasi Amortisasi	(Rp22.745.750.710,00)	(Rp1.024.885.060,00)	Rp0,00	(Rp23.770.635.770,00)
5	Aset Lain-lain	Rp231.484.487.444,22	Rp454.841.275,00	Rp32.500.334.943,20	199.438.993.777,26
	<b>Jumlah</b>	<b>Rp391.109.381.200,22</b>	<b>Rp6.073.438.847,00</b>	<b>RpRp33.115.258.443,20</b>	<b>Rp364.067.561.605,26</b>

**7.5.3.1.5.1 Tagihan Penjualan Angsuran**

31 Desember 2020	31 Desember 2019
<b>Rp0,00</b>	<b>Rp0,00</b>

Pada Tahun Anggaran 2020 Pemerintah Kota Makassar tidak memiliki Tagihan Penjualan Angsuran.

**7.5.3.1.5.2 Tuntutan Ganti Rugi**

31 Desember 2020	31 Desember 2019
<b>Rp6.469.482.632,00</b>	<b>Rp614.923.500,00</b>

Tuntutan Ganti Rugi adalah Tuntutan Ganti Rugi yang telah ada SKTJM dan akan jatuh tempo lebih dari 12 bulan.

Tuntutan Ganti Rugi – Aset Lainnya pada Pemerintah Kota Makassar per 31 Desember 2020 sebesar Rp6.469.482.632,00. Daftar Tuntutan Ganti Rugi dapat dilihat pada *Lampiran 23*.

**7.5.3.1.5.3 Kemitraan Dengan Pihak Ketiga**

31 Desember 2020	31 Desember 2019
<b>Rp157.439.639.815,00</b>	<b>Rp157.439.639.815,00</b>

Merupakan Aset Tetap Pemerintah Kota Makassar pada:

- Terminal Regional Daya yang dikelola oleh PT Kalla Inti Karsa (KIK) sebesar Rp15.874.101.000,00

Pembangunan Terminal Regional Daya (TRD) Dilaksanakan oleh PT KIK berdasarkan Perjanjian Kerjasama Bersyarat (PKS) Nomor 551.22/02/S.Perja/HK tanggal 05 April 1997:

- Pihak Pertama (Pemerintah Kota Makassar) menyediakan modal berupa Lahan di Terminal Regional Daya seluas 12 Ha dengan nilai Rp4.628.754.000,00 dan Tanah serta Bangunan di Eks Terminal Panaikang seluas 32.349 m<sup>2</sup> dengan nilai Rp11.245.347.000,00;
- Pihak Kedua (PT KIK) menyediakan modal berupa pembangunan TRD baik sarana dan prasarana sesuai Gambar, Spesifikasi Teknik dan RAB dengan nilai sebesar Rp27.493.526.500,00. Atas



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

- pelaksanaan oleh Pihak Kedua sampai dengan 31 Desember 2020, PT KIK belum menyelesaikan pembangunan 157 toko dengan nilai sebesar Rp8.240.324.000,00.
- b. Terminal Cargo yang dikelola oleh PT Pelitagro Mustika Karya sebesar Rp78.869.000.000,00;
  - c. Lapangan Karebosi yang dikelola oleh PT Tosan Permai Lestari sebesar Rp58.794.538.815,00;
  - d. Taman Pualam yang dikelola oleh H Abdul Latief Makka sebesar Rp1.600.000.000,00; dan
  - e. Taman Pasar Cidu dikelola oleh PT Karya Dwi Putra sebesar Rp2.302.000.000,00.

Saldo Akhir Kemitraan Dengan Pihak Ketiga TA 2020 tidak mengalami perubahan jika dibandingkan dengan TA 2019. Rincian dapat dilihat pada *Lampiran 24*.

7.5.3.1.5.4 **Aset Tidak Berwujud**

31 Desember 2020	31 Desember 2019
<b>Rp24.490.081.151,00</b>	<b>Rp24.316.081.151,00</b>

Merupakan Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2020 sebesar Rp24.490.081.151,00 adalah aset berupa perangkat lunak atau aplikasi yang ada pada OPD terkait, untuk menunjang kelancaran dalam mengoptimalkan dan mempermudah kerja untuk menghindari *trouble error*.

Pemerintah Kota Makassar menyajikan nilai Akumulasi Amortisasi pada neraca per 31 Desember 2020 sebesar (Rp23.770.635.770,00). Kebijakan penerapan Amortisasi Aset Tak Berwujud pada Neraca Pemerintah Daerah mulai tahun 2017 dilakukan berdasarkan Peraturan Walikota Makassar Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Makassar sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Walikota Makassar Nomor 64 Tahun 2020 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Makassar.

Rincian mutasi Aset Tak Berwujud dan Amortisasinya dapat dilihat pada *Lampiran 25*.

7.5.3.1.5.5 **Akumulasi Amortisasi**

31 Desember 2020	31 Desember 2019
<b>(Rp23.770.635.770,00)</b>	<b>(Rp22.745.750.710,00)</b>

Akumulasi Amortisasi Aset Tetap Pemerintah Kota Makassar sampai dengan periode 31 Desember 2020 dan 2019 sebesar (Rp23.770.635.770,00) dan (Rp22.745.750.710,00), selisihnya sebesar Rp1.024.885.060,00 merupakan Akumulasi Amortisasi Tahun berjalan.

Pemerintah Kota Makassar menyajikan nilai Akumulasi Amortisasi pada neraca per 31 Desember 2020 sebesar (Rp23.770.635.770,00). Kebijakan penerapan Amortisasi Aset Tak Berwujud pada Neraca Pemerintah Daerah mulai tahun 2017 dilakukan



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

berdasarkan Peraturan Walikota Makassar Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Makassar sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Walikota Makassar Nomor 64 Tahun 2020 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Makassar.

7.5.3.1.5.6 Aset Lain-Lain

31 Desember 2020	31 Desember 2019
Rp199.438.993.777,26	Rp231.484.487.444,22

Aset lain-lain merupakan aset lainnya yang dimiliki Pemerintah Kota Makassar per 31 Desember 2020 dengan rincian mutasi sebagai berikut.

Tabel 62 Mutasi Aset Lain-lain

No.	Uraian	Saldo Per 31 Des 2019 (Rp)	Mutasi (Rp)		Saldo Per 31 Des 2020 (Rp)
			Bertambah	Berkurang	
1	Piutang Sisa UYHD	Rp775.151.955,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp775.151.955,00
2	Tuntutan Ganti Rugi yang Belum ada Penetapan Pembebanan	Rp80.473.300,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp80.473.300,00
3	Reklasifikasi dari Aset Tetap	Rp230.628.862.189,22	Rp454.841.275,00	Rp32.500.334.943,20	Rp198.583.368.521,52
Jumlah		Rp231.484.487.444,22	Rp454.841.275,00	Rp32.500.334.943,20	Rp199.438.993.777,26

Penjelasan dari masing-masing aset lainnya adalah sebagai berikut.

a. **Piutang Sisa UYHD**  
**Rp775.151.955,00**

Piutang Sisa UYHD adalah saldo sisa UYHD baik Rutin maupun Pembangunan mulai TA 2005 sampai dengan TA 2010 yang belum dikembalikan/dipertanggungjawabkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp775.151.955,00 yang jika dibandingkan dengan Piutang sisa UYHD TA 2019 sebesar Rp775.151.955,00 tidak mengalami perubahan.

b. **Tuntutan Ganti Rugi** **Rp80.473.300,00**

Tuntutan Ganti Rugi sampai dengan tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp80.473.300,00 Nilai tersebut berasal dari reklasifikasi dari Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi karena masih bersifat informasi yang belum ada pembebanannya.

c. **Reklasifikasi dari Aset Tetap** **Rp198.583.368.521,52**

Reklasifikasi aset tetap merupakan aset tetap sampai dengan Desember 2020 yang sudah rusak berat yang dalam proses pengusulan penghapusan.

Rincian lebih lanjut dapat dilihat pada **Lampiran 26**.



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

7.5.3.2 Kewajiban

31 Desember 2020	31 Desember 2019
<b>Rp130.590.759.544,81</b>	<b>Rp107.722.354.716,08</b>

Kewajiban umumnya timbul karena konsekuensi pelaksanaan tugas atau tanggungjawab untuk bertindak di masa lalu. Dalam konteks pemerintahan, kewajiban muncul antara lain karena penggunaan sumber pembiayaan pinjaman dari masyarakat, lembaga keuangan, entitas pemerintah lain, atau lembaga internasional. Kewajiban Pemerintah Kota Makassar juga terjadi karena perikatan dengan pegawai yang bekerja pada Pemerintah Kota Makassar atau dengan pemberi jasa lainnya.

Kewajiban dikelompokkan menjadi kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. Kewajiban jangka pendek merupakan kelompok kewajiban yang diselesaikan dalam waktu kurang dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban jangka panjang adalah kelompok kewajiban yang penyelesaiannya dilakukan setelah 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.

Jumlah Kewajiban Pemerintah Kota Makassar per 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebesar Rp130.590.759.544,81 dan Rp107.722.354.716,08 yang terdiri dari:

**Tabel 63 Kewajiban**

No.	Uraian	31 Desember 2020	31 Desember 2019
1	Kewajiban Jangka Pendek	Rp51.969.291.941,47	Rp29.100.887.111,74
2	Kewajiban Jangka Panjang	Rp78.621.467.604,34	Rp78.621.467.604,34
<b>Jumlah</b>		<b>Rp130.590.759.544,81</b>	<b>Rp107.722.354.716,08</b>

7.5.3.2.1 Kewajiban Jangka Pendek

31 Desember 2020	31 Desember 2019
<b>Rp51.969.291.941,47</b>	<b>Rp29.100.887.111,74</b>

Kewajiban Jangka Pendek merupakan penilaian utang dengan menggunakan nilai nominal yang harus dibayar pada tanggal jatuh tempo.

**Tabel 64 Kewajiban Jangka Pendek**

No.	Uraian	31 Desember 2020	31 Desember 2019
1	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	Rp405.045.392,90	Rp318.013.682,91
2	Utang Bunga	Rp0,00	Rp0,00
3	Bagian Lancar Utang Dalam Negeri - Pemerintah Pusat	Rp0,00	Rp0,00
4	Pendapatan Diterima Dimuka	Rp22.921.092.755,33	Rp5.146.944.693,83
5	Utang Belanja	Rp28.643.153.793,24	Rp17.957.148.026,00
6	Utang Kepada Pihak Ketiga	Rp0,00	Rp5.672.895.709,00
7	Utang Jangka pendek Lainnya	Rp0,00	Rp5.885.000,00
<b>Jumlah</b>		<b>Rp51.969.291.941,47</b>	<b>Rp29.100.887.111,74</b>



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

7.5.3.2.1.1 Utang Perhitungan  
Pihak Ketiga (PFK)

31 Desember 2020	31 Desember 2019
Rp405.045.392,90	Rp318.013.682,91

Merupakan utang Pemerintah Daerah kepada Pihak Lain yang disebabkan kedudukan Pemerintah sebagai pemotong pajak atau pungutan lainnya. Pada Tahun 2020 Utang Perhitungan Pihak Ketiga sebesar Rp405.045.392,90 merupakan utang pajak dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah) berupa Utang PPN Pusat dan Pajak Penghasilan PPh, dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 65. Rincian Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)**

NO	SEKOLAH	UTANG PAJAK 2019	UTANG PAJAK 2020
1	SMP NEGERI 1 MAKASSAR	Rp250,00	Rp55.125.550,00
2	SMP NEGERI 6 MAKASSAR	Rp4.842.875,00	Rp4.842.875,00
3	SMP NEGERI 9 MAKASSAR	Rp19.930.125,00	Rp0,00
4	SMP NEGERI 11 MAKASSAR	Rp24.167.039,00	Rp28.706.264,00
5	SMP NEGERI 12 MAKASSAR	Rp3.709.636,00	Rp1.500,00
6	SMP NEGERI 13 MAKASSAR	Rp7.054.956,00	Rp9.243.881,00
7	SMP NEGERI 16 MAKASSAR	Rp2.456.390,00	Rp5.875.140,00
8	SMP NEGERI 27 MAKASSAR	Rp26.902.223,00	Rp11.299.714,00
9	SMP NEGERI 29 MAKASSAR	Rp6.256.728,00	Rp0,00
10	SMP NEGERI 30 MAKASSAR	Rp0,00	Rp17.143.812,00
11	SMP NEGERI 31 MAKASSAR	Rp17.628.530,00	Rp19.068.530,00
12	SMP NEGERI 32 MAKASSAR	Rp0,00	Rp4.307.387,00
13	SMP NEGERI 33 MAKASSAR	Rp43.305.363,00	Rp11.824.828,00
14	SMP NEGERI 38 MAKASSAR	Rp0,00	Rp2.625.000,00
15	SMP NEGERI 40 MAKASSAR	Rp4.705.000,00	Rp0,00
16	SMP NEGERI 44 MAKASSAR	Rp0,00	Rp80.400,00
17	SMP NEGERI 47 MAKASSAR	Rp2.634.497,00	Rp1.093.817,00
18	SMP NEGERI 49 MAKASSAR	Rp2.746.245,00	Rp0,00
19	SMP NEGERI 54 MAKASSAR	Rp1.986.756,00	Rp0,00
20	SD NEGERI NUSA HARAPAN PERMAI	Rp60.000,00	Rp0,00
21	SD INPRES KALANG TUBUNG 2	Rp0,00	Rp2.502.727,00
22	SD INPRES PAGANDONGAN 1	Rp0,00	Rp1.798.000,00
23	SD INPRES LAE-LAE 2	Rp0,00	Rp500.000,00
24	SD NEGERI MANDAI	Rp399.000,00	Rp0,00
25	SD NEGERI BULUROKENG	Rp0,00	Rp7.464.552,00
26	SD INPRES MANNURUKI 1	Rp2.532.200,00	Rp0,00
27	SD INPRES MANNURUKI 2	Rp1.557.500,00	Rp0,00
28	SD NEGERI BARAYA 2	Rp2.169.999,00	Rp4.311.268,00
29	SD NEGERI LAYANG IV/72	Rp1.689.975,00	Rp0,00
30	SD NEGERI BAWAKARAENG 1	Rp2.041.000,00	Rp0,00
31	SD NEGERI LARIANG BANGI 1	Rp1.432.250,00	Rp14.958.752,00
32	SD NEGERI MAMAJANG I	Rp732.250,00	Rp0,00
33	SD NEGERI MAMAJANG II	Rp75.000,00	Rp0,00
34	SD INPRES BERT MAMAJANG I	Rp262.046,00	Rp456.375,00
35	SD INPRES BERT MAMAJANG II	Rp7.470.383,00	Rp7.470.383,00



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

NO	SEKOLAH	UTANG PAJAK 2019	UTANG PAJAK 2020
36	SD INPRES SAMBUNG JAWA III	Rp0,00	Rp5.348.283,00
37	SD NEGERI LABUANG BAJI I	Rp3.325.500,00	Rp5.044.523,00
38	SD NEGERI MAWAS	Rp1.348.000,00	Rp2.149.089,00
39	SD NEGERI CENDRAWASIH I	Rp972.000,00	Rp0,00
40	SD INPRES MANGGALA	Rp2.574.633,00	Rp3.325.904,00
41	SD INPRES TELLO BARU II	Rp0,00	Rp2.153.072,00
42	SD NEGERI KASSI	Rp6.295.450,00	Rp0,00
43	SD INPRES KASSI	Rp0,00	Rp455.000,00
44	SD INPRES BORONG JAMBU I	Rp1.867.350,00	Rp1.430.800,00
45	SD INPRES BORONG JAMBU III	Rp895.909,00	Rp0,00
46	SD INPRES NIPA-NIPA	Rp560.000,00	Rp0,00
47	SD INPRES PERUMNAS ANTANG III	Rp140.000,00	Rp0,00
48	SD INPRES PANNARA	Rp265.000,00	Rp265.000,00
49	SD NEGERI MATTOANGIN I	Rp525.500,00	Rp525.500,00
50	SD NEGERI RAJAWALI	Rp3.426.580,00	Rp0,00
51	SD NEGERI GARUDA	Rp3.247.722,00	Rp0,00
52	SD NEGERI PANAİKANG 2	Rp7.098.750,00	Rp4.201.202,00
53	SD NEGERI PACCINANG	Rp1.743.046,00	Rp4.559.207,00
54	SD NEGERI TAMAMAUNG	Rp1.831.649,00	Rp1.831.649,00
55	SD NEGERI PANNYIKKOKANG 2	Rp2.959.534,00	Rp2.959.534,00
56	SD INPRES TELLO BARU 1/2	Rp1.746.682,00	Rp7.787.905,00
57	SD INPRES KARUWISI 1	Rp105.000,00	Rp105.000,00
58	SD INPRES KARUWISI 2	Rp733.408,00	Rp0,00
59	SD INPRES PANAİKANG II/1	Rp4.000.596,00	Rp0,00
60	SD INPRES PANAİKANG II/2	Rp467.704,00	Rp467.704,00
61	SD INPRES PAROPO	Rp402.955,00	Rp0,00
62	SD NEGERI RAPPOCINI	Rp3.069.000,00	Rp3.927.735,00
63	SD NEGERI EMMY SAELAN	Rp422.500,00	Rp422.500,00
64	SD NEGERI KOMPLEKS IKIP	Rp670.250,00	Rp670.250,00
65	SD INPRES BTN IKIP II	Rp678.272,00	Rp472.727,00
66	SD NEGERI MINASA UPA	Rp807.500,00	Rp0,00
67	SD INPRES MINASA UPA	Rp1.861.400,00	Rp4.511.955,00
68	SD NEGERI MANGASA	Rp1.604.000,00	Rp0,00
69	SD INPRES PERUMNAS	Rp2.562.747,00	Rp2.562.747,00
70	SD INPRES PERUMNAS I	Rp950.211,00	Rp300.000,00
71	SD INPRES PERUMNAS II	Rp1.066.500,00	Rp1.066.500,00
72	SD INPRES PERUMNAS IV	Rp0,00	Rp425.000,00
73	SD INPRES KELAPA TIGA I	Rp0,00	Rp3.781.363,90
74	SD INPRES KASSI KASSI	Rp681.818,00	Rp2.855.260,00
75	SD INPRES KASSI KASSI 1	Rp300.000,00	Rp0,00
76	SD INPRES GUNUNG SARI BARU		Rp5.588.409,00
77	SD INPRES UNGGULAN BTN PEMDA	Rp2.071.350,00	Rp0,00
78	SD INPRES CILALLANG	Rp2.435.361,00	Rp4.810.392,00
79	SD NEGERI KALUKUANG III	Rp341.700,00	Rp341.700,00
80	SD NEGERI KALUKUANG.IV	Rp0,00	Rp75.000,00
81	SD INPRES CAMBAYA II TALLO	Rp0,00	Rp811.363,00
82	SD INPRES CAMBAYA IV	Rp803.545,00	Rp0,00
83	SD NEGERI KALUKU BODOA	Rp1.809.959,00	Rp0,00
84	SD INPRES BERTINGKAT KALUKU BODOA	Rp1.715.841,00	Rp0,00



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

NO	SEKOLAH	UTANG PAJAK 2019	UTANG PAJAK 2020
85	SD INPRES PANNAMPU 2	Rp2.786.496,00	Rp5.952.272,00
86	SD NEGERI RAPPOKALING 67/1	Rp3.587.250,00	Rp0,00
87	SD INPRES UJUNG PANDANG BARU	Rp1.580.600,00	Rp1.580.600,00
88	SD NEGERI KAPASA	Rp2.303.636,00	Rp0,00
89	SD INPRES BONTOJAI	Rp7.935.929,00	Rp16.590.461,00
90	SD NEGERI PAGANDONGAN	Rp54.182,00	Rp0,00
91	SD NEGERI BONTOA	Rp132.045,00	Rp0,00
92	SD INPRES KANTISANG	Rp2.985.150,00	Rp5.221.513,00
93	SD INPRES KERA-KERA	Rp375.000,00	Rp2.807.400,00
94	SD INPRES KAMPUS UNHAS 1	Rp8.250.977,00	Rp12.811.007,00
95	SD INPRES TAMALANREA 1	Rp1.008.000,00	Rp8.182.000,00
96	SD INPRES LANRAKI 1	Rp0,00	Rp5.730.000,00
97	SD INPRES LANTEBUNG	Rp2.596.800,00	Rp2.823.981,00
98	SD INPRES BIRA 1	Rp3.925.159,00	Rp2.625.002,00
99	SD INPRES BIRA 2	Rp7.906.726,00	Rp5.084.350,00
100	SD NEGERI BALANG BARU	Rp0,00	Rp2.714.450,00
101	SD INPRES JONGAYA	Rp340.909,00	Rp0,00
102	SD INPRES JONGAYA 2	Rp342.500,00	Rp342.500,00
103	SD NEGERI MANNURUKI	Rp115.950,00	Rp1.236.000,00
104	SD INPRES BONTOMANAI	Rp0,00	Rp1.125.441,00
105	SD INPRES PA BAENG-BAENG	Rp1.671.150,00	Rp1.035.950,00
106	SD INPRES GONTANG	Rp2.627.490,00	Rp0,00
107	SD NEGERI MACCINI SOMBALA	Rp0,00	Rp356.818,00
108	SD NEGERI SUDIRMAN I	Rp725.150,00	Rp3.206.742,00
109	SD NEGERI SUDIRMAN II	Rp2.286.120,00	Rp0,00
110	SD NEGERI MANGKURA II	Rp217.250,00	Rp0,00
111	SD NEGERI MANGKURA IV	Rp0,00	Rp50.000,00
112	SD INPRES LAE LAE I	Rp870.000,00	Rp870.000,00
113	SD NEGERI GOTONG-GOTONG 1	Rp2.107.465,00	Rp2.777.465,00
114	SD NEGERI UJUNG TANAH 2	Rp0,00	Rp4.020.087,00
115	SD NEGERI CAMBAYA	Rp0,00	Rp2.688.000,00
116	SD NEGERI BARRANG CADDI	Rp0,00	Rp8.281.478,00
117	SD NEGERI BARRANG LOMPO	Rp0,00	Rp15.877.689,00
118	SD NEGERI LANGKAI	Rp171.091,00	Rp171.091,00
119	SD INPRES TABARINGAN	Rp1.563.769,00	Rp0,00
120	SD NEGERI SANGIR	Rp125.000,00	Rp125.000,00
121	SD INPRES BERTINGKAT BUTUNG	Rp205.000,00	Rp0,00
122	SD INPRES BERTINGKAT MELAYU 1	Rp83.750,00	Rp83.750,00
123	SD INPRES TODDOPULI 1	Rp0,00	Rp4.741.384,00
<b>Jumlah</b>		<b>Rp318.013.682,00</b>	<b>Rp405.045.392,90</b>

7.5.3.2.1.2 Utang Bunga

31 Desember 2020	31 Desember 2019
Rp0,00	Rp0,00

Saldo utang bunga Pemerintah Kota Makassar tidak terdapat lagi per 31 Desember 2020.



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

<b>7.5.3.2.1.3 Bagian Lancar Utang Jangka Panjang</b>	<b>31 Desember 2020</b>	<b>31 Desember 2019</b>
	<b>Rp0,00</b>	<b>Rp0,00</b>

Bagian Lancar Utang Jangka Panjang Dalam Negeri - Pemerintah Pusat merupakan kewajiban angsuran pokok yang seharusnya dibayarkan setelah Tahun Anggaran berjalan.

<b>7.5.3.2.1.4 Pendapatan Diterima Dimuka</b>	<b>31 Desember 2020</b>	<b>31 Desember 2019</b>
	<b>Rp22.921.092.755,32</b>	<b>Rp5.146.944.693,83</b>

Pendapatan diterima dimuka sebesar Rp2.117.841.295,65 terdiri dari:

- Pendapatan diterima dimuka berupa pajak reklame sebesar Rp20.848.157.568,00
- Pendapatan diterima dimuka berupa retribusi pemakaman sebesar Rp52.700.000,00;
- Retribusi Ijin Kendaraan Bermotor sebesar Rp 97.676.250,33;
- Retribusi Ijin Trayek sebesar Rp3.243.891,67
- Retribusi Ijin Gangguan sebesar Rp 1.251.481.712,00;
- Retribusi Ijin Minol Rp 652.083.333,33;
- Retribusi Taman Pasar Cidu PT. Karya Dwi Putra Rp 15.750.000,00.

Adapun rincian Pendapatan diterima Dimuka dapat dilihat pada *Lampiran 28*.

<b>7.5.3.2.1.5 Utang Belanja</b>	<b>31 Desember 2020</b>	<b>31 Desember 2019</b>
	<b>Rp28.643.153.793,24</b>	<b>Rp17.957.148.026,00</b>

Utang Belanja berasal dari kontrak atau perolehan barang/jasa yang sampai dengan tanggal pelaporan belum dibayar. Utang belanja pemerintah kota makassar terdiri dari Utang Belanja Pegawai, Utang Belanja Barang dan Jasa, dan Utang Kepada Pihak Ketiga, seperti pada tabel berikut

**Tabel 66. Rincian Utang Belanja**

No	Utang Belanja	Saldo per 31 Desember 2020	Saldo per 31 Desember 2019
1	Utang Belanja Pegawai	Rp231.010.356,00	Rp428.959.912,00
2	Utang Belanja Barang dan Jasa	Rp12.731.486.609,00	Rp17.528.188.114,00



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

No	Utang Belanja	Saldo per 31 Desember 2020	Saldo per 31 Desember 2019
3	Utang Kepada Pihak Ketiga	Rp15.680.656.828,24	Rp5.672.895.709,00
	<b>Jumlah</b>	<b>Rp28.643.153.793,24</b>	<b>Rp23.630.043.735,00</b>

Adapun rincian Utang Belanja dapat dilihat pada *Lampiran 29*.

7.5.3.2.1.6 Utang Jangka Pendek Lainnya	31 Desember 2020	31 Desember 2019
	<b>Rp0,00</b>	<b>Rp5.885.000,00</b>

Utang Jangka Pendek di tahun 2020 sebesar Rp0,00 yang merupakan utang belanja Dinas Pendidikan yang telah dihapus buku sebesar Rp5.885.000,00, berdasarkan Surat Pernyataan Dinas Pendidikan yang menyatakan bahwa tidak terdapat pengakuan utang/piutang tersebut dari pihak ketiga kepada Dinas Pendidikan Kota Makassar. Rincian utang jangka pendek lainnya dapat dilihat dalam *Lampiran 30*.

7.5.3.2.2 Kewajiban Jangka Panjang	31 Desember 2020	31 Desember 2019
	<b>Rp78.621.467.604,34</b>	<b>Rp78.621.467.604,34</b>

Kewajiban jangka panjang merupakan kewajiban yang akan dibayar kembali atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca. Kewajiban jangka panjang Pemerintah Kota Makassar merupakan utang kepada Pemerintah Pusat yang belum jatuh tempo sampai dengan tahun 2020 yang sudah dilakukan Amandemen Tahun 2013. Atas utang kepada Pemerintah Pusat tersebut saat ini sedang dalam proses administrasi untuk penghapusan mutlak. Posisi utang Pemerintah Kota Makassar per 31 Desember 2020, sesuai berita acara Rekonsiliasi Nomor 008/WPB.25/2020 sampai dengan 017/WPB.25/2020 tanggal 9 Januari 2020.

**Tabel 67 Kewajiban Jangka Panjang**

No.	Jenis Pinjaman	Jumlah (Rp)
1	AMA-470/SLA-12/009	Rp 648.973.388,83



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

No.	Jenis Pinjaman	Jumlah (Rp)
2	AMA-472/SLA-833/2013	Rp29.810.883.371,05
3	AMA-471/SLA-159/2013	Rp9.129.376.239,04
4	AMA-169/RDI-185/2013	Rp11.106.120.129,40
5	AMA-166/RDA.P5-115/2013	Rp27.597.167.476,03
6	DEPKEU-17/02/1982	Rp328.947.000,00
<b>Jumlah</b>		<b>Rp78.621.467.604,35</b>

Rincian Kewajiban jangka Panjang dapat dilihat pada **Lampiran 32**.

**7.5.3.3 Ekuitas**

31 Desember 2020	31 Desember 2019
<b>Rp29.776.864.214.534,00</b>	<b>Rp28.809.657.359.249,90</b>

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah pada tanggal laporan. Saldo ekuitas di Neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas.

Saldo Ekuitas sampai dengan per 31 Desember 2020 Rp29.776.864.214.534,00 dan per 31 Desember 2019 Rp28.809.657.359.249,90. Saldo Ekuitas mengalami peningkatan sebesar Rp Rp967.206.855.284,06 dibandingkan Tahun sebelumnya.



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

**7.5.4 Penjelasan Atas Pos-Pos Laporan Operasional**

**7.5.4.1 Pendapatan – LO**

	TA 2020	TA 2019
	<b>Rp4.059.729.512.505,86</b>	<b>Rp3.831.110.227.244,50</b>

Pendapatan - LO merupakan pendapatan yang menjadi hak Pemerintah Kota Makassar dan telah diklasifikasikan menurut jenis pendapatan yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan yang Sah, dengan realisasi TA 2020 dan TA 2019 sebagai berikut.

**Tabel 68 Rincian Pendapatan-LO TA 2020 dan 2019**

No.	Uraian	2020 (Rp)	2019 (Rp)
1.	Pendapatan Asli Daerah	Rp1.125.887.348.170,62	Rp1.379.092.856.189,64
2.	Pendapatan Transfer	Rp2.174.195.278.589,24	Rp2.186.266.372.711,86
3.	Lain-lain Pendapatan yang Sah	Rp759.646.885.746,00	Rp265.750.998.343,00
	<b>Jumlah</b>	<b>Rp4.059.729.512.505,86</b>	<b>Rp3.831.110.227.244,50</b>

Realisasi Pendapatan-LO tahun 2020 adalah sebesar Rp4.059.729.512.505,86. Masing-masing akun Pendapatan-LO dapat diuraikan sebagai berikut.

**7.5.4.1.1 Pendapatan Asli Daerah (PAD)**

	TA 2020	TA 2019
	<b>Rp1.125.887.348.170,62</b>	<b>Rp1.379.092.856.189,64</b>

Akun PAD ini merupakan realisasi PAD pada Laporan Operasional untuk periode TA 2020 PAD pada tahun 2020 terealisasi sebesar Rp1.125.887.348.170,62 dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 69 Rincian Pendapatan Asli Daerah-LO TA 2020 dan 2019**

No.	Uraian	2020 (Rp)	2019 (Rp)
1.	Pendapatan Pajak Daerah	Rp909.280.159.615,24	Rp1.122.231.009.680,57
2.	Pendapatan Retribusi Daerah	Rp85.803.242.808,51	Rp79.824.915.912,92
3.	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yg Dipisahkan	Rp21.837.863.577,25	Rp28.857.897.950,48
4.	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	Rp108.966.082.169,62	Rp148.179.032.645,67
	<b>Jumlah</b>	<b>Rp1.125.887.348.170,62</b>	<b>Rp1.379.092.856.189,64</b>

Masing-masing realisasi jenis PAD TA 2020 dapat dijelaskan sebagai berikut.



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

1. Pendapatan Pajak Daerah

Pajak Daerah merupakan Pendapatan Asli Daerah yang dipungut dan dikelola oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar yang tarifnya ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah Kota Makassar.

Pendapatan Pajak pada Laporan Operasional disajikan dengan basis akrual, pengakuan pendapatan terjadi pada saat timbulnya hak atas pendapatan pada tahun 2020, sehingga nilai pendapatan pajak daerah pada Laporan Operasional adalah sebesar ketetapan yang diterbitkan pada tahun 2020 ditambah dengan penerimaan pajak tanpa ketetapan tahun 2020. Pembayaran atas piutang tahun sebelumnya tidak masuk pada pendapatan Laporan Operasional melainkan masuk pada pendapatan LRA.

Pendapatan Pajak Daerah pada tahun 2020 terealisasi sebesar Rp909.280.159.615,24 dengan rincian pada tabel berikut:

**Tabel 70 Rincian Pendapatan Pajak Daerah – LO  
TA 2020 dan 2019**

Jenis pajak	2020 (Rp)	2019 (Rp)
Pajak Hotel – LO	Rp120.808.999.959,56	Rp120.389.053.350,77
Pajak Restoran – LO	Rp136.561.263.131,81	Rp211.974.081.338,09
Pajak Hiburan – LO	Rp14.468.994.350,87	Rp40.143.071.574,00
Pajak Reklame – LO	Rp25.758.715.789,00	Rp51.777.652.940,00
Pajak Penerangan Jalan – LO	Rp219.727.194.495,00	Rp222.267.797.099,00
Pajak Pengambilan Tambang Galian Gol. C – LO	Rp0,00	Rp0,00
Pajak Parkir – LO	Rp9.962.069.183,00	Rp19.792.315.906,80
Pajak Air Bawah Tanah – LO	Rp4.418.280.872,00	Rp4.282.321.206,00
Pajak Sarang Burung Walet – LO	Rp28.539.800,00	Rp33.713.400,00
Pajak BPHTB – LO	Rp207.950.696.893,00	Rp232.812.018.732,00
Pajak Bumi dan Bangunan Sek. P2 – LO	Rp169.595.405.141,00	Rp218.758.984.133,91
Perkiraan Penerimaan Melalui Rekanan - LO	Rp0,00	Rp0,00
Pajak Air Permukaan - LO	Rp0,00	Rp0,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp909.280.159.615,24</b>	<b>Rp1.122.231.009.680,57</b>

2. Pendapatan Retribusi Daerah

Pendapatan retribusi daerah pada Pemerintah Kota Makassar dipungut dan dikelola oleh 25 OPD penghasil. Pendapatan Retribusi Daerah terkait langsung dengan pelayanan kepada masyarakat yang diberikan oleh Pemerintah Kota Makassar. Pemungutan Retribusi Daerah Kota Makassar didasarkan atas Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan besarnya retribusi daerah ditetapkan melalui Perda.



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

Pendapatan Retribusi Daerah pada tahun 2020 terealisasi sebesar Rp85.803.242.808,51 dengan rincian pada tabel berikut.

**Tabel 71 Rincian Pendapatan Retribusi Daerah – LO  
TA 2020 dan 2019**

Jenis Retribusi	2020 (Rp)	2019 (Rp)
Retribusi Pelayanan Kesehatan – LO	Rp1.124.662.600,00	Rp1.666.298.300,00
Retribusi Penyediaan/Penyedotan Kakus – LO	Rp360.765.000,00	Rp360.670.000,00
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah – LO	Rp6.060.655.592,00	Rp8.247.881.985,56
Retribusi Pelayanan Alat Pemadam Kebakaran – LO	Rp326.920.000,00	Rp565.471.500,00
Retribusi I M B – LO	Rp43.887.193.610,00	Rp35.939.644.521,00
Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor – LO	Rp210.894.999,67	Rp1.948.923.015,00
Retribusi Penyeberangan diatas Air – LO	Rp0,00	Rp50.000.000,00
Retribusi Izin Trayek – LO	Rp68.915.816,67	Rp44.134.800,00
Retribusi Pelayanan Pelayanan/Kebersihan – LO	Rp19.098.527.500,00	Rp21.926.156.500,00
Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat – LO	Rp9.402.142.378,17	Rp1.576.791.079,36
Retribusi Menara Telekomunikasi - LO	Rp0,00	Rp0,00
Retribusi Tempat Pelelangan Ikan – LO	Rp1.179.640.000,00	Rp1.466.181.000,00
Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol – LO	Rp1.287.500.000,00	Rp1.305.000.000,00
Retribusi Izin Gangguan/Keramaian – LO	Rp2.611.129.312,00	Rp3.970.776.912,00
Pelayanan Tempat Khusus Parkir - LO	Rp0,00	Rp0,00
Perpanjangan IMTA kepada Pemberi Tenaga Kerja Asing - LO	Rp0,00	Rp566.906.300,00
Fasilitas Lainnya di Lingkungan Terminal – LO	Rp0,00	Rp0,00
Pelayanan Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Vila - LO	Rp137.760.000,00	Rp190.080.000,00
Pelayanan Jasa ke Pelabuhan - LO	Rp46.536.000,00	Rp0,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp85.803.242.808,51</b>	<b>Rp79.824.915.912,92</b>

3. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Pendapatan ini adalah PAD dari pembagian laba atas Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kota Makassar pada Perusahaan Daerah atau Badan Usaha Milik Daerah. Pendapatan ini diterima dan dikelola melalui Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Makassar dengan realisasi pada tahun anggaran 2020 sebesar Rp21.837.863.577,25 dengan rincian sebagai berikut.



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

**Tabel 72 Rincian Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan – LO TA 2020 dan 2019**

No.	Uraian	2020 (Rp)	2019 (Rp)
	<b>Perusahaan Daerah</b>	<b>Rp435.800.780,25</b>	<b>Rp22.118.437.347,48</b>
1.	PDAM	Rp0,00	Rp20.922.052.691,81
2.	PD. BPR	Rp0,00	Rp0,00
3.	PD. Pasar Makassar Raya	Rp262.771.764,75	Rp748.484.510,40
4.	PD. RPH	Rp0,00	Rp0,00
5.	PD. Parkir	Rp173.029.015,50	Rp447.900.145,27
6.	PD. Terminal	Rp0,00	Rp0,00
	<b>Perusahaan Pemerintah</b>	<b>Rp21.402.062.797,00</b>	<b>Rp6.607.460.603,00</b>
7.	PT. Bank Sulselbar	Rp21.211.070.589,00	Rp6.367.217.139,00
8.	PT. KIMA	Rp190.992.208,00	Rp240.243.464,00
	<b>Perusahaan Swasta</b>	<b>Rp0,00</b>	<b>Rp132.000.000,00</b>
9.	PT. GMTD	Rp0,00	Rp132.000.000,00
	<b>Jumlah</b>	<b>Rp21.837.863.577,25</b>	<b>Rp28.857.897.950,48</b>

4. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Pendapatan tersebut merupakan pendapatan diluar pendapatan pajak retribusi dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan realisasi penerimaan Lain-Lain PAD untuk periode TA 2020 dengan realisasi sebesar Rp108.966.082.169,62 dengan rincian pada tabel berikut.

**Tabel 73 Rincian Lain-lain PAD yang Sah – LO TA 2020 dan 2019**

Jenis Lain-Lain PAD yang Sah	2020 (Rp)	2019 (Rp)
Pendapatan Jasa Layanan Umum BLUD – LO	Rp46.580.904.315,00	Rp61.961.423.135,00
Pendapatan UPTD Bank Sampah – LO	Rp357.317.410,00	Rp1.008.047.630,00
Penerimaan Jasa Giro – LO	Rp17.695.681.214,00	Rp10.960.634.284,00
Penerimaan TP / TGR – LO	Rp6.090.388.771,42	Rp8.920.303.573,84
Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan – LO	Rp0,00	Rp8.689.141.819,92
Pendapatan dari Pengembalian – LO	Rp8.702.704.470,65	Rp11.771.713.316,82
Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pembayaran Pajak dan Retribusi	Rp1.914.077.972,55	Rp4.594.089.271,09
Lain-lain PAD yang Sah Lainnya - LO	Rp1.182.263.000,00	Rp291.600.000,00
Pendapatan Penjualan Tanah - LO	Rp284.066.226,00	Rp685.264.353,00
Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin - LO	Rp0,00	Rp390.964.000,00
Hasil Penjualan Gedung dan Bangunan – LO	Rp0,00	Rp98.310.000,00
Pendapatan Bunga Deposito	Rp0,00	Rp10.602.739.712,00
Dana BOS – LO	Rp0,00	Rp0,00
Dana Kapitasi JKN FKTP	Rp26.198.828.790,00	Rp28.204.801.550,00
Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah Kerjasama Pemanfaatan- LO	Rp289.850.000,00	Rp0,00



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

Jenis Lain-Lain PAD yang Sah	2020 (Rp)	2019 (Rp)
Penerimaan Piutang Kerjasama Pemafaatan – PT. Pelita Agro	(Rp330.000.000,00)	Rp0,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp108.966.082.169,62</b>	<b>Rp148.179.032.645,67</b>

7.5.4.1.2 **Pendapatan Transfer**

TA 2020	TA 2019
<b>Rp2.174.195.278.589,24</b>	<b>Rp2.186.266.372.711,86</b>

Pendapatan ini merupakan Pendapatan dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Propinsi yang diterima dan dikelola oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Makassar. Adapun realisasi Pendapatan Transfer untuk periode TA 2020 sebesar Rp2.174.195.278.589,24 dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 74 Rincian Pendapatan Transfer – LO TA 2020 dan 2019**

No.	Uraian	2020 (Rp)	2019 (Rp)
1.	Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan	Rp1.676.121.523.287,00	Rp1.824.567.795.448,00
2.	Transfer Pemerintah Pusat Lainnya	Rp215.436.299.714,00	Rp31.415.999.000,00
3.	Transfer Pemerintah Provinsi	Rp282.637.455.588,24	Rp330.282.578.263,86
	<b>Jumlah</b>	<b>Rp2.174.195.278.589,24</b>	<b>Rp2.186.266.372.711,86</b>

1. Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan

Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan Pemerintah Kota Makassar untuk periode tahun 2020 secara total terealisasi sebesar Rp1.676.121.523.287,00 dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 75 Rincian Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan – LO TA 2020 dan 2019**

No.	Uraian	2020 (Rp)	2019 (Rp)
1.	Dana Bagi Hasil Pajak	Rp113.943.184.588,00	Rp73.049.789.863,00
2.	Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam)	Rp4.842.507.754,00	Rp4.623.235.530,00
3.	Dana Alokasi Umum	Rp1.249.647.391.000,00	Rp1.379.148.200.000,00
4.	Dana Alokasi Khusus	Rp307.688.439.945,00	Rp367.746.570.055,00
	<b>Jumlah</b>	<b>Rp1.676.121.523.287,00</b>	<b>Rp1.824.567.795.448,00</b>

2. Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya

Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya untuk tahun 2020 sebesar Rp215.436.299.714,00 dengan rincian sebagai berikut.



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

**Tabel 76 Rincian Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya – LO  
TA 2020 dan 2019**

No.	Uraian	2020 (Rp)	2019 (Rp)
1.	Dana Otonomi Khusus	Rp0,00	Rp0,00
2.	Dana Penyesuaian	Rp215.436.299.714,00	Rp31.415.999.000,00
	<b>Jumlah</b>	<b>Rp215.436.299.714,00</b>	<b>Rp31.415.999.000,00</b>

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya pada tahun 2020 berupa Dana Penyesuaian sebesar Rp74.623.320.000,00 yang merupakan Dana Penyesuaian untuk insentif daerah sebesar Rp74.623.320.000,00 dan Pendapatan Dana Bos sebesar Rp140.812.979.714,00.

3. Transfer Pemerintah Provinsi

Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi untuk periode tahun anggaran 2020 sebesar Rp282.637.455.588,24 dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 77 Rincian Transfer Pemerintah Provinsi – LO  
TA 2020 dan 2019**

No.	Uraian	2020 (Rp)	2019 (Rp)
1.	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	Rp282.637.455.588,24	Rp330.282.578.263,86
2.	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	Rp0,00	Rp0,00
	<b>Jumlah</b>	<b>Rp282.637.455.588,24</b>	<b>Rp330.282.578.263,86</b>

**Lain-lain  
7.5.4.1.3 Pendapatan  
yang Sah**

	TA 2020	TA 2019
	<b>Rp759.646.885.746,00</b>	<b>Rp265.750.998.343,00</b>

Lain-lain Pendapatan yang Sah ini pada tahun 2020 terealisasi sebesar Rp759.646.885.746,00 dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 78 Rincian Lain-lain Pendapatan yang Sah**

No.	Uraian	2020 (Rp)	2019 (Rp)
1.	Pendapatan Hibah	Rp733.626.885.746,00	Rp248.086.998.343,00
2.	Pendapatan Dana Darurat	Rp0,00	Rp0,00
3.	Pendapatan Lainnya	Rp26.020.000.000,00	Rp17.664.000.000,00
	<b>Jumlah</b>	<b>Rp759.646.885.746,00</b>	<b>Rp265.750.998.343,00</b>

Pendapatan Hibah merupakan Pendapatan Hibah dari Pemerintah, Lembaga dan masyarakat sebesar Rp733.626.885.746,00.

Pendapatan Lainnya sebesar Rp26.020.000.000,00 merupakan Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

7.5.4.2 Beban – LO

TA 2020	TA 2019
<b>Rp3.129.275.712.712,99</b>	<b>Rp2.837.702.740.465,32</b>

Beban LO merupakan konsumsi barang dan jasa yang benar-benar sudah dimanfaatkan dalam rangka menunjang operasional pemerintah selama satu tahun. Beban ini baik yang telah berupa kas atau tunai maupun yang masih berupa kewajiban membayar. Realisasi beban tersebut tahun 2020 dapat diuraikan sebagai berikut.

7.5.4.2.1 Beban Pegawai

TA 2020	TA 2019
<b>Rp1.218.394.819.746,00</b>	<b>Rp1.211.212.085.848,00</b>

Beban pegawai - LO disajikan dengan basis akrual, yaitu pengakuan beban pegawai terjadi pada saat timbulnya kewajiban, sehingga nilai beban pegawai - LO sebesar belanja pegawai yang dibayarkan pada tahun 2020 dan tidak termasuk pembayaran atas belanja pegawai tahun sebelumnya dikurangi dengan belanja pegawai yang dikapitalisasi menjadi aset tetap dan ditambah dengan utang belanja pegawai yang terjadi pada tahun 2020.

Beban Pegawai merupakan saldo Beban Pegawai periode 1 Januari 2020 sampai dengan 31 Desember 2020 yang terealisasi sebesar Rp1.218.394.819.746,00, dengan rincian pada tabel berikut.

**Tabel 79 Rincian Beban Pegawai- LO TA 2020 dan 2019**

No.	Uraian	2020 (Rp)	2019 (Rp)
1	Gaji Pokok PNS / Uang Representasi – LO	Rp567.316.679.494,00	Rp581.122.068.625,00
2	Tunjangan Keluarga – LO	Rp46.755.966.048,00	Rp47.299.683.480,00
3	Tunjangan Jabatan – LO	Rp13.207.420.000,00	Rp13.733.399.456,00
4	Tunjangan Fungsional – LO	Rp37.418.806.500,00	Rp38.569.333.250,00
5	Tunjangan Fungsional Umum – LO	Rp8.029.600.000,00	Rp8.027.402.500,00
6	Tunjangan Beras – LO	Rp24.331.759.552,00	Rp24.974.862.718,00
7	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus - LO	Rp4.660.854.486,00	Rp4.366.339.922,00
8	Pembulatan Gaji – LO	Rp7.173.607,00	Rp6.451.611,00
9	Iuran Jaminan Kesehatan - LO	Rp28.494.896.913,00	Rp16.149.615.339,00
10	Uang Paket – LO	Rp4.659.094.843,00	Rp4.769.879.325,00
11	Tunjangan Badan Musyawarah - LO	Rp198.712.722.620,00	Rp213.805.870.000,00
12	Tunjangan Komisi – LO	Rp1.878.550.000,00	Rp1.767.300.000,00
13	Tunjangan Badan Anggaran - Pimpinan dan Anggota DPRD – LO	Rp30.510.900,00	Rp29.247.225,00
14	Tunjangan Badan Kehormatan - Pimpinan dan Anggota DPRD - LO	Rp7.856.100,00	Rp7.201.425,00
15	Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya - Pimpinan dan Anggota DPRD – LO	Rp22.472.100,00	Rp20.188.350,00
16	Tunjangan Perumahan - Pimpinan dan Anggota DPRD – LO	Rp6.757.000.000,00	Rp6.732.500.000,00



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

No.	Uraian	2020 (Rp)	2019 (Rp)
17	Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD – LO	Rp1.510.871.760,00	Rp199.920.000,00
18	Tunjangan Asuransi Ketenagakerjaan KDH/WKDH - LO	Rp2.963.520,00	Rp1.169.640,00
19	Tunjangan Asuransi Kesehatan KDH/WKDH - LO	Rp241.920,00	Rp0,00
20	Tambahan penghasilan untuk tunjangan kesejahteraan -LO	Rp3.476.160,00	Rp4.345.200,00
21	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja – LO	Rp25.200.000,00	Rp32.400.000,00
22	Tambahan Penghasilan berdasarkan tempat bertugas – LO	Rp3.528.000,00	Rp4.536.000,00
23	Tambahan Penghasilan berdasarkan kondisi kerja – LO	Rp45.360.000,00	Rp58.320.000,00
24	Tambahan Penghasilan Guru	Rp393.300,00	Rp1.327.056.442,00
25	Tunjangan Profesi Guru	Rp240,00	Rp300,00
26	Beban Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD - LO	Rp951.930.000,00	Rp1.105.545.000,00
27	Beban Penunjang Operasional KDH/WKDH – LO	Rp1.600.078.853,00	Rp2.026.320.800,00
28	Insentif Pemungutan Pajak Daerah - LO	Rp8.790.600.000,00	Rp8.746.500.000,00
29	Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus - Pimpinan dan Anggota DPRD - LO	Rp2.904.084,00	Rp2.304.162,00
30	Beban Iuran Jaminan Kesehatan - Pimpinan dan Anggota DPRD	Rp102.934.944,00	Rp27.427.119,00
31	Beban Iuran Jaminan Ketenagakerjaan - Pimpinan dan Anggota DPRD - LO	Rp9.138.528,00	Rp9.093.168,00
32	Beban Uang Paket - Pimpinan dan Anggota DPRD	Rp95.193.000,00	Rp94.636.500,00
33	Beban Tunjangan Badan Musyawarah - Pimpinan dan Anggota DPRD	Rp30.510.900,00	Rp29.247.225,00
34	Beban Tunjangan Komisi - Pimpinan dan Anggota DPRD	Rp59.560.200,00	Rp55.479.900,00
35	Beban Uang Jasa Pengabdian - Pimpinan dan Anggota DPRD	Rp0,00	Rp349.125.000,00
36	Beban Penunjang Operasional - Pimpinan dan Anggota DPRD	Rp265.440.000,00	Rp1.749.111.390,00
37	Beban Tunjangan Reses - Pimpinan dan Anggota DPRD	Rp1.457.505.000,00	Rp1.425.900.000,00
38	Beban Tunjangan Transportasi - Pimpinan dan Anggota DPRD	Rp5.500.000.000,00	Rp5.510.000.000,00
39	Beban Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan - LO	Rp213.891.890.799,00	Rp365.400,00
40	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - LO	Rp0,00	Rp32.900.734.190,00
41	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	Rp15.433.597.000,00	Rp166.432.098.500,00
42	Beban Pegawai Dana BOS	Rp931.847.500,00	Rp1.433.147.442,00
43	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	Rp898.300.000,00	Rp1.001.950.000,00
44	Beban Pegawai BLUD	Rp24.489.990.875,00	Rp25.304.009.244,00
<b>JUMLAH</b>		<b>Rp1.218.394.819.746,00</b>	<b>Rp1.211.212.085.848,00</b>



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

7.5.4.2.2 Beban Persediaan

TA 2020	TA 2019
<b>Rp134.194.317.436,91</b>	<b>Rp238.376.917.060,19</b>

Beban Persediaan merupakan saldo Beban Persediaan periode 1 Januari 2020 sampai dengan 31 Desember 2020 sebesar Rp134.194.317.436,91. Beban persediaan-LO disajikan dengan basis akrual, yaitu beban persediaan dicatat sebesar pemakaian persediaan (*use of goods*). Dengan penggunaan metode fisik maka pengukuran pemakaian persediaan dihitung berdasarkan inventarisasi fisik dikalikan dengan nilai per unit sesuai dengan metode masuk pertama keluar pertama (MPKP atau FIFO), dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 80 Rincian Beban Persediaan LO TA 2020 dan 2019**

No.	Uraian	2020 (Rp)	2019 (Rp)
1	Beban Persediaan alat tulis kantor	Rp13.042.632.455,37	Rp88.517.485.118,00
2	Beban Persediaan dokumen/administrasi tender	Rp0,00	Rp0,00
3	Beban Persediaan alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	Rp18.507.604.288,00	Rp33.388.048.790,00
4	Beban Persediaan perangko, materai dan benda pos lainnya	Rp0,00	Rp6.000.000,00
5	Beban Persediaan peralatan kebersihan dan bahan pembersih	Rp4.252.024.536,00	Rp6.643.675.949,00
6	Beban Persediaan Bahan Bakar Minyak/Gas	Rp2.612.357.535,00	Rp3.181.100.575,00
7	Beban Persediaan pengisian tabung pemadam kebakaran	Rp0,00	Rp12.814.160,00
8	Beban Persediaan pengisian isi tabung gas	Rp70.327.500,00	Rp99.147.500,00
9	Beban Persediaan plakat dan cenderamata	Rp1.574.926.000,00	Rp2.714.805.000,00
10	Beban Persediaan bendera dan spanduk	Rp1.486.945.600,00	Rp2.503.561.300,00
11	Beban Persediaan hadiah barang	Rp197.749.310,00	Rp1.046.081.000,00
12	Beban Persediaan barang persediaan	Rp0,00	Rp72.500.000,00
13	Beban Persediaan rumah tangga	Rp822.590.000,00	Rp903.746.500,00
14	Beban Persediaan bahan baku bangunan	Rp0,00	Rp26.777.676.600,00
15	Beban Persediaan bahan/bibit tanaman	Rp1.181.168.750,00	Rp2.601.188.880,00
16	Beban Persediaan bibit ternak	Rp27.125.000,00	Rp0,00
17	Beban Persediaan bahan obat-obatan	Rp0,00	Rp0,00
18	Beban Persediaan bahan kimia	Rp576.941.400,00	Rp902.188.995,00
19	Beban Persediaan bahan material dlm rangka peringatan hari-hari besar	Rp0,00	Rp116.764.000,00
20	Beban Persediaan bahan material	Rp15.000.000,00	Rp0,00
21	Beban Persediaan bahan makanan dan minuman	Rp18.497.483.913,50	Rp14.340.223.702,00
22	Beban Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	Rp44.557.183.534,04	Rp27.065.746.215,19
23	Beban Persediaan Cetak	Rp9.722.744.492,00	Rp18.823.983.151,00



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

No.	Uraian	2020 (Rp)	2019 (Rp)
24	Beban Persediaan bahan material praktek/pratikum	Rp55.585.610,00	Rp19.742.000,00
25	Beban Persediaan peralatan/perlengkapan pelatihan/praktek	Rp2.740.433.510,00	Rp2.767.491.745,00
26	Beban Persediaan peralatan/perlengkapan kerja lapangan	Rp658.411.370,00	Rp541.966.100,00
27	Beban Persediaan Alat/Bahan Tanggap Darurat	Rp1.703.975.783,00	Rp2.296.171.800,00
28	Beban Persediaan bahan pakai habis olahraga	Rp0,00	Rp16.250.000,00
29	Beban Pesediaan PMKS/Rumah Shelter	Rp139.134.000,00	Rp199.133.000,00
30	Beban Persediaan bahan pakai habis perlengkapan mayat	Rp233.753.600,00	Rp344.415.000,00
31	Beban Persediaan bahan pakai habis pemadam	Rp536.800.000,00	Rp441.144.000,00
32	Beban Persediaan bahan material praktek/pratikum	Rp0,00	Rp1.078.089.890,00
33	Beban bahan habis pakai pengelolaan bank sampah	Rp329.997.500,00	Rp955.776.090,00
34	Beban bahan peralatan/perlengkapan perbengkelan	Rp753.323.250,00	Rp0,00
35	Beban Persediaan bahan baku bangunan	Rp9.898.098.500,00	Rp0,00
<b>JUMLAH</b>		<b>Rp134.194.317.436,91</b>	<b>Rp238.376.917.060,19</b>

7.5.4.2.3 **Beban Jasa**

TA 2020	TA 2019
<b>Rp1.042.916.455.653,97</b>	<b>Rp1.029.107.586.299,41</b>

Beban Jasa adalah Beban Jasa yang meliputi jasa konsultan, listrik, air, telepon, internet, premi asuransi, sewa, beban makanan dan minuman periode 1 Januari 2020 sampai dengan 31 Desember 2020 yang terealisasi sebesar Rp1.042.916.455.653,97. Pada beban jasa terdapat reklasifikasi dari Belanja Tak Terduga sebesar RpRp83.039.630.293,00 yaitu pada Dinas Kesehatan sebesar Rp29.696.958.380,00, Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebesar Rp19.706.940.345,00, dan Dinas Sosial sebesar Rp33.635.731.568,00.

7.5.4.2.4 **Beban Pemeliharaan**

TA 2020	TA 2019
<b>Rp33.856.034.695,00</b>	<b>Rp48.168.244.571,00</b>

Beban Pemeliharaan adalah Beban yang meliputi Pemeliharaan Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan Irigasi dan Jaringan, dan Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya periode 1 Januari 2020 sampai dengan 31 Desember 2020 yang terealisasi sebesar Rp33.856.034.695,00, dengan rincian pada tabel berikut.



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

**Tabel 81 Rincian Beban Pemeliharaan Tahun 2020 dan 2019**

No.	Uraian	2020 (Rp)	2019 (Rp)
1	Beban Jasa Service/ Rehab	Rp104.350.000,00	Rp0,00
2	Beban Penggantian Suku Cadang	Rp17.883.754.015,00	Rp 26.120.504.309,50
3	Beban Jasa KIR	Rp0,00	Rpp43.985.000,00
4	Beban Pajak Kendaraan Bermotor	Rp1.696.462.195,00	Rp1.913.066.996,00
5	Beban perpanjangan Surat Ijin Mengemudi	Rp18.220.000,00	Rp0,00
6	Beban Pemeliharaan Tanah	Rp808.853.077,00	Rp811.221.833,00
7	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	Rp5.400.857.338,00	Rp8.273.087.164,50
8	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	Rp6.800.551.376,00	Rp8.917.666.120,00
9	Beban Pemeliharaan Jalan, Irigasi, dan Jaringan	Rp1.142.986.694,00	Rp2.088.713.148,00
10	Beban Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Rp0,00	Rp0,00
<b>JUMLAH</b>		<b>Rp33.856.034.695,00</b>	<b>Rp48.168.244.571,00</b>

**7.5.4.2.5 Beban Perjalanan Dinas**

TA 2020	TA 2019
<b>Rp40.385.958.433,00</b>	<b>Rp73.108.354.905,00</b>

Beban Perjalanan Dinas meliputi Beban Perjalanan Dinas Dalam Daerah dan Beban Perjalanan Dinas Luar Daerah periode 1 Januari 2020 sampai dengan 31 Desember 2020 dimana pada tahun 2020 realisasi Beban Perjalanan Dinas sebesar Rp40.385.958.433,00 terdiri atas:

- a. Beban perjalanan dinas dalam daerah sebesar Rp1.062.041.523,00;
  - b. Beban perjalanan dinas luar daerah sebesar Rp39.323.916.910,00;
- dan

**7.5.4.2.6 Beban Bunga**

TA 2020	TA 2019
<b>Rp0,00</b>	<b>Rp0,00</b>

Beban Bunga adalah Beban Bunga Utang Pinjaman kepada Pemerintah pada periode 1 Januari 2020 sampai dengan 31 Desember 2020. Tidak terdapat realisasi beban bunga di tahun 2020.

**7.5.4.2.7 Beban Hibah**

TA 2020	TA 2019
<b>Rp185.766.766.000,00</b>	<b>Rp59.811.425.945,00</b>

Beban Hibah terdiri dari Beban yang akan diserahkan kepada masyarakat dan pihak ketiga, Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi, Hibah kepada Kelompok/Anggota Masyarakat, dan Hibah BOP PAUD masyarakat/swasta yang terjadi pada periode 1 Januari 2020 sampai



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

dengan 31 Desember 2020 yang terealisasi sebesar Rp185.766.766.000,00, terdiri atas:

**Tabel 82 Rincian Beban Hibah Tahun 2020 dan 2019**

No.	Uraian	2020 (Rp)	2019 (Rp)
1	Beban Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	Rp0,00	Rp4.227.965.945,00
2	Beban Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga	Rp0,00	Rp0,00
3	Beban Hibah Kepada Badan/Lembaga/Organisasi	Rp168.975.166.000,00	Rp37.486.960.000,00
4	Beban Hibah kepada kelompok/anggota masyarakat	Rp1.482.500.000,00	Rp5.905.000.000,00
5	Beban Hibah BOP PAUD Masyarakat/Swasta	Rp11.347.800.000,00	Rp9.549.000.000,00
6	Beban barang dan jasa dana pendidikan gratis tingkat SD/SMP/SMA/SMK	Rp0,00	Rp0,00
7	Beban barang dan jasa dana kesehatan gratis rumah sakit/Puskesmas	Rp0,00	Rp0,00
8	Beban Barang Yang Akan Dijual Kepada Masyarakat	Rp0,00	Rp0,00
9	Uang untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	Rp0,00	Rp31.000.000,00
10	Beban Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan	Rp3.961.300.000,00	Rp2.611.500.000,00
<b>Jumlah</b>		<b>Rp185.766.766.000,00</b>	<b>Rp59.811.425.945,00</b>

**7.5.4.2.8 Beban Bantuan Sosial**

TA 2020	TA 2019
<b>Rp1.260.000.000,00</b>	<b>Rp2.870.000.000,00</b>

Beban Bantuan Sosial adalah Beban Bantuan Sosial periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2020 yang terealisasi sebesar Rp1.260.000.000,00.

**7.5.4.2.9 Beban Penyusutan**

TA 2020	TA 2019
<b>Rp406.280.343.806,62</b>	<b>Rp113.937.012.152,18</b>

Beban ini merupakan Beban Penyusutan Aset Tetap, Aset Tak Berwujud, dan Aset Lain-Lain pada tahun 2020 dengan total nilai Beban Penyusutan sebesar Rp406.227.828.353,02 dengan rincian pada tabel berikut.



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

**Tabel 83 Rincian Beban Penyusutan Tahun 2020 dan 2019**

No.	Uraian	2020 (Rp)	2019 (Rp)
1	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	Rp180.209.433.772,50	Rp64.607.387.576,13
2	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	Rp28.679.706.627,31	Rp1.860.752.610,35
3	Beban Penyusutan Jalan Irigasi dan Jaringan	Rp195.049.546.188,06	Rp45.752.226.744,70
4	Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	Rp1.316.772.158,75	Rp451.973.115,00
5	Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud	Rp1.024.885.060,00	Rp1.264.672.106,00
<b>JUMLAH</b>		<b>Rp406.280.343.806,62</b>	<b>Rp113.937.012.152,18</b>

**7.5.4.2.10 Beban Penyisihan Piutang**

TA 2020	TA 2019
<b>Rp46.889.054.849,38</b>	<b>Rp30.246.436.986,90</b>

Beban Penyisihan Piutang adalah Beban Penyisihan Piutang pada periode 1 Januari 2020 sampai dengan 31 Desember 2020 dimana pada tahun 2020 realisasi Beban Penyisihan Piutang sebesar Rp46.889.054.849,38 dengan rincian pada tabel berikut.

**Tabel 84 Rincian Beban Penyisihan Piutang Tahun 2020 dan 2019**

No.	Uraian	2020 (Rp)	2019 (Rp)
1	Beban Penyisihan Piutang Pajak	Rp41.803.190.087,65	Rp28.587.665.388,00
2	Beban Penyisihan Piutang Retribusi	Rp3.579.175.288,55	Rp1.477.388.826,52
3	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Lainnya	Rp1.506.689.473,18	Rp181.382.772,38
<b>JUMLAH</b>		<b>Rp46.889.054.849,38</b>	<b>Rp30.246.436.986,90</b>

**7.5.4.2.11 Beban Lain-lain**

TA 2020	TA 2019
<b>Rp18.162.066.092,11</b>	<b>Rp29.748.092.697,64</b>

Beban Lain-Lain periode 1 Januari 2020 sampai dengan 31 Desember 2020 yang terealisasi sebesar Rp18.162.066.092,11 meliputi:

- Beban Beban Pakaian Seragam Organisasi sebesar Rp19.500.000,00;
- Beban Beban Pakaian Ibadah sebesar Rp2.500.000,00;
- Beban Batas Minimum *Capital Expenditure* sebesar 341.740.843,00;
- Beban Beban Batas Minimum *Treshold Capitalization* sebesar Rp 17.798.325.249,11.



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

7.5.4.2.12 Beban Transfer

TA 2020	TA 2019
<b>Rp1.169.896.000,00</b>	<b>Rp1.116.584.000,00</b>

Beban Transfer adalah Beban Transfer Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik periode 1 Januari 2020 sampai dengan 31 Desember 2020 yang terealisasi sebesar Rp1.169.896.000,00.

7.5.4.3 Surplus/Defisit dari Operasi

TA 2020	TA 2019
<b>Rp930.453.799.792,87</b>	<b>Rp993.407.486.779,18</b>

Surplus/Defisit dari Operasi merupakan adalah selisih antara pendapatan-LO dan beban-LO selama satu periode pelaporan dari kegiatan operasi. Surplus/Defisit dari Operasi selama periode 1 Januari 2020 sampai dengan 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut.

**Tabel 85 Rincian Surplus/Defisit dari Operasi  
Tahun 2020 dan 2019**

No	Uraian	2020 (Rp)	2019 (Rp)
1	Pendapatan	Rp4.059.729.512.505,86	Rp3.831.110.227.244,50
2	Beban	(3.129.275.712.712,99)	(Rp2.837.702.740.465,32)
<b>Jumlah</b>		<b>Rp930.453.799.792,87</b>	<b>Rp993.407.486.779,18</b>

7.5.4.4 Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional

TA 2020	TA 2019
<b>Rp0,00</b>	<b>Rp0,00</b>

Tidak terdapat realisasi Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional pada tahun 2020.

7.5.4.5 Pos Luar Biasa

TA 2020	TA 2019
<b>(Rp68.998.400,00)</b>	<b>Rp0,00</b>

Pada tahun 2020 terdapat realisasi pada Pos luar Biasa pada pos Beban Luar Biasa sebesar Rp68.998.400,00 yaitu berupa pengembalian kelebihan pendapatan oleh:

1. Yuliati Arsyad sebesar Rp20.000.000,00
2. Hermin Daun sebesar Rp15.921.000,00
3. PT. Maruki Internasional Indonesia sebesar Rp17.942.400,00, dan
4. BPJS Kesehatan Kantor Cabang Makassar sebesar Rp15.135.000,00.



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

**7.5.4.6 Surplus/Defisit  
– LO**

TA 2020	TA 2019
<b>Rp930.384.801.392,87</b>	<b>Rp993.407.486.779,18</b>

Surplus/Defisit - LO merupakan selisih antara pendapatan-LO dan beban-LO selama satu periode pelaporan setelah diperhitungkan surplus/defisit dari kegiatan non operasional dan pos luar biasa. Surplus/Defisit pada Laporan Operasional per 31 Desember 2020 terdapat surplus sebesar Rp930.384.801.392,87.



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

## 7.5.5 Penjelasan Pos-Pos Laporan Arus Kas

### 7.5.5.1 Laporan Arus Kas

Laporan Arus Kas memberikan informasi historis mengenai perubahan kas dan setara kas suatu entitas pelaporan dengan mengklasifikasikan arus kas berdasarkan aktivitas operasi, investasi aset non keuangan, pembiayaan, dan non anggaran selama satu periode akuntansi serta memberikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama satu periode akuntansi dan saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan. Informasi ini disajikan untuk pertanggungjawaban dan pengambilan keputusan.

	TA. 2020	TA. 2019
<b>7.5.5.1.1 Arus Kas dari Aktivitas Operasi</b>	<b>Rp645.079.023.364,47</b>	<b>Rp1.000.265.015.735,41</b>

Merupakan indikator yang menunjukkan kemampuan operasi pemerintah daerah dalam menghasilkan kas yang cukup untuk membiayai aktivitas operasionalnya dimasa yang akan datang tanpa mengandalkan sumber pendanaan dari luar. Arus kas dari aktivitas operasi terdiri dari:

#### 1. Arus Kas Masuk **Rp 3.323.662.286.602,28**

Arus Kas Masuk adalah jumlah realisasi penerimaan kas yang berkenaan dengan kegiatan operasional dalam periode TA 2020.

Arus Kas Masuk dari aktivitas operasi terdiri dari :

a. Pajak Daerah	Rp	864.313.239.515,14
b. Retribusi Daerah	Rp	67.204.193.741,00
c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	Rp	31.875.688.803,93
d. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yg Sah	Rp	114.935.439.209,08
e. Dana Bagi Hasil Pajak	Rp	113.943.184.588,00
f. Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (SDA)	Rp	4.842.507.754,00
g. Dana Alokasi Umum	Rp	1.249.647.391.000,00
h. Dana Alokasi khusus	Rp	307.688.439.945,00
i. Dana Penyesuaian	Rp	74.623.320.000,00
j. Pendapatan Bagi Hasil Pajak Propinsi	Rp	302.750.607.332,13
k. Hibah	Rp	165.818.274.714,00
l. Dana Darurat	Rp	
m. Bantuan Keuangan	Rp	26.020.000.000,00
n. Pendapatan Lainnya	Rp	
<b>Jumlah</b>	<b>Rp</b>	<b>3.323.662.286.602,28</b>



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

**2. Arus Kas Keluar Rp 2.678.583.263.237,81**

Arus Kas Keluar adalah jumlah realisasi pengeluaran kas yang berkenaan dengan kegiatan operasional dalam periode TA 2020, terdiri dari

a. Belanja Pegawai	Rp	1.218.380.837.302,00
b. Belanja Barang	Rp	1.188.897.135.242,81
c. Belanja Bunga	Rp	0,00
d. Belanja Hibah	Rp	185.766.766.000,00
e. Belanja Bantuan Sosial	Rp	1.260.000.000,00
f. Belanja Bantuan Keuangan	Rp	1.169.896.000,00
g. Belanja Tidak Terduga	Rp	83.108.628.693,00
h. Belanja Bagi Hasil Pajak	Rp	
<b>Jumlah</b>	<b>Rp</b>	<b>2.678.583.263.237,81</b>

**3. Jumlah Arus Kas dari Rp 645.079.023.364,47  
Aktivitas Operasi**

Arus Kas dari	TA. 2020	TA. 2019
7.5.5.1.2 Aktivitas Investasi	(Rp291.202.740.534,87)	(Rp936.028.246.329,80)

Arus Kas dari aktivitas investasi aset non keuangan mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto dalam rangka perolehan dan pelepasan sumber daya ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan dan mendukung pelayanan pemerintah daerah kepada masyarakat dimasa yang akan datang.

Arus Kas dari aktivitas investasi Aset Non Keuangan terdiri dari:

**1. Arus Kas Masuk Rp 0,00**

Arus Kas Masuk dari Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan pada Tahun Anggaran 2020 terdiri dari:

a. Pencairan Dana Cadangan	Rp	0,00
b. Pendapatan Penjualan atas Tanah	Rp	0,00
c. Pendapatan Penjualan atas Peralatan dan Mesin	Rp	0,00
d. Pendapatan Penjualan atas Gedung dan Bangunan	Rp	0,00
e. Pendapatan Penjualan atas Jalan, Irigasi dan Jaringan	Rp	0,00
f. Pendapatan dari Penjualan Aset Tetap	Rp	0,00



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

g. Pendapatan dari Penjualan Aset Lainnya	Rp	0,00
h. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	Rp	0,00
i. Penerimaan Penjualan Investasi Non Permanen	Rp	0,00
<b>Jumlah Arus Kas Masuk</b>	<b>Rp</b>	<b>0,00</b>

**2. Arus Kas Keluar Rp 0,00**

Arus Kas Keluar dari Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan adalah jumlah pengeluaran kas atas realisasi belanja modal/pembangunan/investasi dalam TA 2020 dirinci menurut objek belanja sebagai berikut.

a. Tanah	Rp	0,00
b. Peralatan dan Mesin	Rp	59.823.460.691,87
c. Gedung dan Bangunan	Rp	65.093.458.020,00
d. Jalan, Irigasi dan Jaringan	Rp	113.433.294.536,00
e. Aset Tetap Lainnya	Rp	52.537.877.891,00
f. Aset Lainnya	Rp	314.649.396,00
g. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	Rp	0,00
<b>Jumlah Arus Kas Keluar</b>	<b>Rp</b>	<b>291.202.740.534,87</b>

**3. Jumlah Arus Kas dari Aktivitas Investasi (Rp291.202.740.534,87)**

**7.5.5.1.3 Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan**

TA. 2020	TA. 2019
<b>Rp0,00</b>	<b>Rp250.000,00</b>

Arus kas dari Aktivitas Pendanaan mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto sehubungan dengan pendanaan defisit atau penggunaan surplus anggaran, yang bertujuan untuk memprediksi klaim pemerintah daerah terhadap pihak lain dimasa yang akan datang.

Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan terdiri dari:

**1. Arus Kas Masuk Rp 0,00**

Dalam Tahun Anggaran 2020 Penerimaan Arus Kas Masuk dari Aktivitas Pembiayaan diperoleh dari :

a. Penerimaan Pinjaman Daerah	Rp	0,00
b. Pencairan Dana Cadangan	Rp	0,00
c. Penerimaan Kembali Piutang	Rp	0,00



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

d. Penerimaan Sisa UYHD Tahun Lalu	Rp	0,00
e. Penerimaan Kewajiban Pihak Ketiga	Rp	0,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp</b>	<b>0,00</b>

**2. Arus Kas Keluar Rp 0,00**

Pengeluaran kas untuk membiayai pengeluaran pendanaan terdiri atas pembayaran angsuran penyertaan modal (Investasi) pemerintah daerah, belanja dibayar dimuka, dan pembayaran pokok utang pinjaman dan obligasi dengan rincian sebagai berikut:

a. Pemberian Pinjaman Daerah	Rp	0,00
b. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	Rp	0,00
c. Pembayaran Pokok Pinjaman Jatuh Tempo	Rp	0,00
d. Belanja dibayar dimuka (sisa UYHD)	Rp	0,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp</b>	<b>0,00</b>

**3. Jumlah Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan Rp 0,00**

**7.5.5.1.4 Arus Kas dari Aktivitas Transitoris**

TA. 2020	TA. 2019
<b>Rp87.031.709,99</b>	<b>Rp318.013.682,91</b>

Arus kas dari Aktivitas Transitoris mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto yang tidak mempengaruhi anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan pemerintah daerah, arus kas dari aktivitas transitoris antara lain Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) dan kiriman uang, PFK menggambarkan kas yang berasal dari jumlah dana yang dipotong dari Surat Perintah Membayar atau diterima secara tunai untuk pihak ketiga misalnya potongan Taspen dan Askes. Kiriman uang menggambarkan mutasi kas antar rekening kas umum daerah Arus Kas dari Aktivitas Non anggaran terdiri dari:

**1. Arus Kas Masuk Rp193.496.668.541,01**

Dalam Tahun Anggaran 2020 terdapat Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga berupa pemotongan/pemungutan IWP, Taperum dan PPh 21 serta penyetorannya sebesar Rp193.496.668.541,01.



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

**2. Arus Kas Keluar Rp193.409.636.831,02**

Dalam Tahun Anggaran 2020 terdapat pemotongan/pemungutan IWP, Taperum dan PPh 21 serta penyetorannya Rp193.409.636.831,02.

**3. Jumlah Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris Rp87.031.709,99**

7.5.5.1.5 Kenaikan Bersih Kas Selama Periode TA 2020	TA. 2020	TA. 2019
	<b>Rp353.963.314.539,59</b>	<b>Rp64.555.033.088,52</b>

Kenaikan terdiri dari:

a. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	Rp	645.079.023.364,47
b. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	Rp	(291.202.740.534,87)
c. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan	Rp	0,00
d. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris	Rp	353.963.314.539,59
<b>Jumlah</b>	<b>Rp</b>	<b>353.963.314.539,59</b>

Saldo Akhir Kas terdiri dari:

- Saldo Awal Kas BUD dan Kas Bendahara Pengeluaran	Rp	239.370.001.901,10
- Saldo Akhir Kas BUD dan Kas Bendahara Pengeluaran	Rp	593.333.316.440,69
<b>Jumlah</b>	<b>Rp</b>	<b>593.333.316.440,69</b>

Perbandingan saldo akhir kas di BUD antara Neraca dan Laporan Arus Kas (LAK) sebagai berikut.

Saldo Akhir Kas BUD di Neraca	Rp	592.856.134.866,11
Saldo Akhir Kas BUD di Laporan Arus Kas (LAK)	Rp	593.333.316.440,69
<b>Selisih</b>	<b>Rp</b>	<b>477.181.574,58</b>



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

Selisih tersebut merupakan:

Uang Muka kegiatan BLUD sebesar (Rp527.959.789,00).

Koreksi Uang Muka Kegiatan BLUD sebesar Rp49.841.250,42,

Kas di Bendahara Pengeluaran berupa jasa giro sebesar Rp936.964.

Perbandingan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) di Laporan Realisasi Anggaran dengan Sisa Saldo Akhir Kas di Laporan Arus Kas (LAK) sebagai berikut.

SiLPA di Laporan Realisasi Anggaran Rp 592.928.271.047,79  
(LRA)

Saldo Akhir Kas di Laporan Arus Kas Rp 593.333.316.440,69  
(LAK)

**Selisih** **Rp 405.045.392,90**

Selisih tersebut merupakan Utang PFK Neraca sebesar Rp405.045.392,90.

Adapun Saldo akhir kas pada Laporan Arus Kas (LAK) dijelaskan pada tabel berikut:

**Tabel 86. Rincian Silpa laporan Arus Kas**

<b>Rincian</b>	<b>Nilai</b>
Kas di Kas Daerah	583.021.816.655,79
Kas di Bendahara Pengeluaran	37.000.080,00
Kas di BOS	4.774.105.728,90
Kas FKTP/JKN (27 Puskesmas)	1.866.461.126,00
Kas di BLUD (19 Puskesmas dan RSUD)	3.633.932.850,00
<b>Jumlah</b>	<b>593.333.316.440,69</b>



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

### 7.5.6. Penjelasan Atas Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas

#### 7.5.5.1.1 Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas merupakan laporan kinerja keuangan terhadap pendapatan dan beban operasional selama 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2020. Laporan Operasional merupakan laporan penghubung antara LO dengan Neraca berkaitan dengan kenaikan atau penurunan ekuitas atas aktivitas operasional pada tahun pelaporan. Dari Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Pada tahun 2020 terdapat saldo awal ekuitas sebesar **Rp28.809.657.359.249,90** merupakan saldo akhir ekuitas tahun 2019.
2. Surplus/defisit – LO tahun 2020 Pemerintah Kota Makassar sebesar **Rp930.384.801.392,87** merupakan surplus atas kegiatan operasional (basis akrual) yang menambah nilai ekuitas pada Neraca.
3. Pada LPE terdapat selisih sebesar **Rp38.872.010.991,18** hal ini sebagai dampak akumulatif karena koreksi yang disebabkan adanya perubahan kebijakan atau kesalahan mendasar atas koreksi saldo awal karena kurang atau lebih catat yang dapat dijelaskan sebagai berikut:
  - a. **Koreksi Aset Tetap** per 31 Desember 2020 sebesar Rp47.400.462.030,76 merupakan mutasi penambahan dan pengurangan dari aset tetap tanah, aset tetap peralatan dan mesin, aset tetap gedung dan bangunan dan aset tetap jalan, irigasi dan jaringan, aset tetap aset tetap lainnya per 31 Desember 2020, dengan rincian pada OPD sebagai berikut:

**Tabel 87 Koreksi Aset Tetap**

No	OPD	Koreksi Aset Tetap	
		2020	2019
1	Dinas Pendidikan	Rp43.408.615.410,76	(Rp195.097.926.905,37)
2	Dinas Kesehatan	Rp4.587.592.445,00	(Rp38.798.564.415,63)
3	Dinas Pekerjaan Umum	Rp0,00	Rp115.884.242.137,08
4	Dinas Penataan Ruang	Rp0,00	(Rp6.443.611.217,50)
5	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Rp0,00	(Rp381.534.000,00)
6	Satuan Polisi Pamong Praja	Rp67.130.000,00	(Rp1.577.227.000,00)
7	Dinas Pemadam Kebakaran	Rp0,00	(Rp4.012.328.701,00)
8	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Rp1.811.112.500,00	(Rp2.089.093.625,00)
9	Dinas Sosial	Rp0,00	(Rp1.253.425.001,00)
10	Dinas Ketenagakerjaan	Rp0,00	(Rp116.514.140,00)
11	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Rp0,00	(Rp328.691.500,00)
12	Dinas Ketahanan Pangan	Rp0,00	(Rp457.437.533,33)
13	Dinas Pertanahan	Rp0,00	(Rp53.488.072.604,80)
14	Dinas Lingkungan Hidup	(Rp3.853.888.500,00)	(Rp30.224.782.820,98)
15	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Rp0,00	(Rp995.983.502,98)
16	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Rp0,00	(Rp3.712.251.965,98)



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

No	OPD	Koreksi Aset Tetap	
		2020	2019
17	Dinas Perhubungan	Rp0,00	(Rp2.367.590.914,08)
18	Dinas Komunikasi dan Informatika	Rp816.700.000,00	(Rp1.609.585.705,11)
19	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Rp0,00	(Rp1.019.793.100,00)
20	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Rp0,00	(Rp1.925.425.853,54)
21	Dinas Pemuda dan Olahraga	(Rp20.889.600.000,00)	(Rp14.777.287.574,75)
22	Dinas Kebudayaan	Rp0,00	(Rp358.390.000,00)
23	Dinas Perpustakaan	Rp9.870.000,00	(Rp603.147.814,00)
24	Dinas Kearsipan	Rp0,00	(Rp374.801.875,00)
25	Dinas Perikanan dan Pertanian	(Rp14.029.885.714,00)	(Rp10.627.283.025,89)
26	Dinas Pariwisata	Rp0,00	Rp228.393.696.438,98
27	Dinas Perdagangan	Rp0,00	(Rp13.188.062.699,67)
28	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Rp357.889.500	(Rp2.323.636.971,40)
29	Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah	Rp34.873.417.180,00	(Rp317.504.633.062,11)
30	Badan Pendapatan Daerah	Rp0,00	(Rp3.323.327.198,21)
31	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Daerah	Rp0,00	(Rp3.208.290.012,70)
32	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	Rp0,00	(Rp24.723.333,00)
33	Sekretariat Daerah	Rp0,00	(Rp10.606.805.232,39)
34	Sekretariat DPRD	Rp0,00	(Rp5.277.943.687,89)
35	Inspektorat Daerah	Rp0,00	(Rp731.240.000,00)
36	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Rp0,00	(Rp25.967.000,00)
37	Kecamatan Biringkanaya	Rp0,00	(Rp14.703.774.129,06)
38	Kecamatan Bontoala	Rp0,00	(Rp1.848.490.394,00)
39	Kecamatan Makassar	Rp28.000.000,00	(Rp1.086.890.001,65)
40	Kecamatan Mamajang	(Rp23.535.792,00)	(Rp3.844.085.574,72)
41	Kecamatan Manggala	Rp208.145.000,00	(Rp1.811.707.138,91)
42	Kecamatan Mariso	Rp0,00	(Rp2.619.275.063,70)
43	Kecamatan Panakukang	Rp12.650.000,00	(Rp5.905.276.898,09)
44	Kecamatan Rappocini	Rp0,00	(Rp1.230.713.063,80)
45	Kecamatan Tallo	Rp0,00	(Rp1.727.396.558,00)
46	Kecamatan Tamalanrea	Rp0,00	(Rp2.595.738.840,00)
47	Kecamatan Tamalate	Rp1.000.000,00	(Rp1.819.971.604,57)
48	Kecamatan Ujung Pandang	Rp0,00	(Rp6.700.579.437,00)
49	Kecamatan Ujung Tanah	Rp15.250.000,00	(Rp1.945.162.941,00)
50	Kecamatan Wajo	Rp0,00	(Rp1.082.270.814,33)
51	Kecamatan Kepulauan Sangkarrang	Rp0,00	(Rp2.864.212.190,00)
	<b>Jumlah</b>	<b>Rp47.400.462.030,76</b>	<b>(Rp436.362.986.066,08)</b>



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

- b. **Koreksi Penyusutan Aset Tetap** per 31 Desember 2020 sebesar Rp932.051.587,64 merupakan selisih penyesuaian nilai penyusutan terkait dengan adanya pengurangan nilai saldo awal Aset Tetap Tahun 2020 pada Dinas Ketahanan Pangan.
- c. **Koreksi Aset Lainnya** per 31 Desember 2020 sebesar (Rp25.716.660.430,96) merupakan penyesuaian nilai Aset Lainnya yang pada neraca disajikan berdasarkan nilai buku berdasarkan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Makassar.

**Tabel 88 Koreksi Aset Lainnya**

No	OPD	Koreksi Aset Tetap	
		2020	2019
1	Dinas Pendidikan	(Rp31.449.811.839,58)	Rp97.174.593.995,64
2	Dinas Kesehatan	(Rp49.957.143,00)	Rp2.545.405.833,63
3	Dinas Pekerjaan Umum	Rp0,00	Rp1.504.131.779,53
4	Dinas Penataan Ruang	Rp0,00	Rp103.149.556,11
5	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Rp0,00	Rp5.796.285,71
6	Satuan Polisi Pamong Praja	Rp0,00	(Rp2.360.500,00)
7	Dinas Pemadam Kebakaran	Rp0,00	Rp177.137.430,00
8	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Rp0,00	Rp42.858.023,81
9	Dinas Sosial	Rp0,00	Rp825.635.714,29
10	Dinas Ketenagakerjaan	Rp0,00	(Rp19.050.000,00)
11	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Rp0,00	Rp8.659.250,00
12	Dinas Ketahanan Pangan	(Rp20.000.000,00)	(Rp47.734.500,00)
13	Dinas Pertanahan	Rp0,00	Rp53.271.069.523,00
14	Dinas Lingkungan Hidup	Rp0,00	Rp3.542.622.710,38
15	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Rp0,00	Rp43.809.907,50
16	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Rp0,00	Rp540.000,00
17	Dinas Perhubungan	(Rp24.970.000,00)	Rp386.037.858,98
18	Dinas Komunikasi dan Informatika	Rp93.260.000,00	(Rp51.510.000,00)
19	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Rp0,00	Rp5.666.550,00
20	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Rp0,00	Rp97.212.441,93
21	Dinas Pemuda dan Olahraga	Rp0,00	Rp14.330.518.276,04
22	Dinas Kebudayaan	(Rp69.140.000,00)	Rp22.730.725,00
23	Dinas Perpustakaan	Rp0,00	Rp576.078.670,31
24	Dinas Kearsipan	Rp0,00	Rp9.808.800,00



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

No	OPD	Koreksi Aset Tetap	
		2020	2019
25	Dinas Perikanan dan Pertanian	Rp0,00	Rp1.583.563.456,29
26	Dinas Pariwisata	Rp0,00	(Rp30.192.500,00)
27	Dinas Perdagangan	Rp0,00	Rp11.877.143.279,33
28	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Rp0,00	Rp15.120.000,00
29	Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah	Rp5.923.757.947,00	Rp9.742.301.451,51
30	Badan Pendapatan Daerah	Rp0,00	Rp25.609.428,57
31	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Daerah	(Rp89.800.000,00)	(Rp89.770.645,00)
32	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	(Rp29.999.396,00)	Rp0,00
33	Sekretariat Daerah	Rp0,00	Rp768.038.604,29
34	Sekretariat DPRD	Rp0,00	Rp91.784.945,71
35	Inspektorat Daerah	Rp0,00	Rp4.201.250,00
36	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Rp0,00	Rp0,00
37	Kecamatan Biringkanaya	Rp0,00	Rp12.833.839.545,82
38	Kecamatan Bontoala	Rp0,00	Rp391.531.660,21
39	Kecamatan Makassar	Rp0,00	Rp366.635.326,53
40	Kecamatan Mamajang	Rp0,00	Rp443.329.963,96
41	Kecamatan Manggala	Rp0,00	Rp213.468.229,29
42	Kecamatan Mariso	Rp0,00	Rp241.512.125,71
43	Kecamatan Panakukang	Rp0,00	Rp4.876.736.379,90
44	Kecamatan Rappocini	Rp0,00	Rp69.411.909,77
45	Kecamatan Tallo	Rp0,00	Rp54.767.374,09
46	Kecamatan Tamalanrea	Rp0,00	Rp722.345.503,57
47	Kecamatan Tamalate	Rp0,00	(Rp485.088.249,67)
48	Kecamatan Ujung Pandang	Rp0,00	Rp5.494.568.525,00
49	Kecamatan Ujung Tanah	Rp0,00	Rp255.406.991,01
50	Kecamatan Wajo	Rp0,00	Rp239.959.499,91
51	Kecamatan Kepulauan Sangkarrang	Rp0,00	Rp1.242.088.146,20
<b>Jumlah</b>		<b>(Rp25.716.660.430,96)</b>	<b>Rp225.501.120.533,86</b>

d. **Koreksi Pinjaman Modal** per 31 Desember 2020 sebesar (Rp1.380.500,00) merupakan penyesuaian nilai investasi non-permanen berupa pinjaman modal yang menggunakan metode NRV pada Dinas Koperasi dan UKM.

e. **Koreksi Investasi** per 31 Desember 2020 sebesar Rp22.067.256.593,25 merupakan selisih penyesuaian nilai investasi terkait dengan adanya penambahan maupun pengurangan investasi



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

---

pada perusahaan daerah karena mengalami laba atau rugi pada perusahaan daerah tersebut per 31 Desember 2020 yang dicatat pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Makassar.

- f. **Koreksi Hutang** per 31 Desember 2020 sebesar (Rp10.584.193.392,24) merupakan koreksi atas pengakuan dan penghapusan hutang pada Tahun Anggaran 2020 pada OPD:
1. Dinas Pendidikan sebesar Rp391.025.801,00
  2. Dinas Kesehatan sebesar (Rp4.994.208.000,00)
  3. Dinas Pertanahan sebesar (Rp300.218.783,24)
- g. **Koreksi Piutang** per 31 Desember 2020 sebesar Rp854.527.000,00 merupakan koreksi saldo awal dari Piutang IMB (Izin Mendirikan Bangunan) pada Dinas Penataan Ruang sebesar Rp510.282.000,00 dan koreksi kurang catat piutang pada Dinas Pertanahan sebesar Rp344.245.000,00 .
- h. **Koreksi Penyisihan Piutang** per 31 Desember 2020 sebesar (Rp263.633.600,00) merupakan koreksi saldo awal penyisihan Piutang IMB (Izin Mendirikan Bangunan) pada Dinas Penataan Ruang.
- i. **Koreksi Kas BOS** per 31 Desember 2020 sebesar (Rp131.535.336,27) merupakan koreksi Utang Pajak dana Bos Tahun-tahun sebelumnya sebesar (Rp189.488.463,94) dan koreksi saldo awal kas dana Bos sebesar Rp110.497.336,27.
- j. **Koreksi BLUD** per 31 Desember 2020 sebesar Rp2.265.159.896,00 merupakan koreksi atas kurang catat Beban Pegawai-LO pada laporan konsolidasian BLUD RSUD Daya Kota Makassar.



## 7.6. PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, pembagian urusan pemerintahan antara Pemerintah Pusat, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dibagi menjadi: 1) Urusan Pemerintahan Absolut (Pemerintah Pusat); 2) Urusan Pemerintahan Konkuren (Pemerintahan Daerah), dan 3) Urusan Pemerintahan Umum (kewenangan Presiden). Pengaturan kriteria pembagian urusan pemerintahan kongkuren dibagi berdasarkan kriteria:

a. Pemerintah Pusat:

- 1) Urusan Pemerintahan yang lokasinya lintas Daerah provinsi atau lintas negara;
- 2) Urusan Pemerintahan yang penggunaannya lintas Daerah provinsi atau lintas negara;
- 3) Urusan Pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya lintas Daerah provinsi atau lintas negara;
- 4) Urusan Pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh Pemerintah Pusat; dan/atau
- 5) Urusan Pemerintahan yang peranannya strategis bagi kepentingan nasional.

b. Pemerintahan Daerah Provinsi:

- 1) Urusan Pemerintahan yang lokasinya lintas Daerah kabupaten/kota;
- 2) Urusan Pemerintahan yang penggunaannya lintas Daerah kabupaten/kota;
- 3) Urusan Pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya lintas Daerah kabupaten/kota; dan/atau
- 4) Urusan Pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh Daerah Provinsi.

c. Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota:

- 1) Urusan Pemerintahan yang lokasinya dalam Daerah kabupaten/kota;
- 2) Urusan Pemerintahan yang penggunaannya dalam Daerah kabupaten/kota;
- 3) Urusan Pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya hanya dalam Daerah kabupaten/kota; dan/atau
- 4) Urusan Pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh Daerah kabupaten/kota.

Atas perubahan pembagian urusan pemerintahan tersebut, maka terjadi pula perubahan dalam bidang urusan pemerintah daerah, antara lain:

1. Pada Bidang Pendidikan sebelumnya untuk bidang pendidikan menengah adalah kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, kini kewenangan tersebut diberikan kepada Pemerintah Provinsi. Dalam Bidang Pendidikan, kewenangan dalam pengelolaan pendidikan terdiri dari enam komponen dan dari komponen tersebut hanya lima komponen yang tetap menjadi kewenangan Pemerintah Daerah yaitu manajemen



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

---

- pendidikan, kurikulum, pemindahan pendidik, perizinan, dan bahasa dan sastra. Namun kewenangan itupun dibagi antara Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dimana Pemerintah Daerah Provinsi memiliki lima komponen kewenangan yang terkait pengelolaan pendidikan menengah dan pendidikan khusus, sedangkan Pemerintah kabupaten/Kota memiliki lima komponen kewenangan terkait pendidikan dasar dan non formal.
2. Pada Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral sebelumnya kewenangan di bagi antara Pemerintah Pusat, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, namun kini hanya diberikan kepada Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah Provinsi. Kewenangan Kabupaten/Kota yang hilang diantaranya adalah membuat Perda terkait ESDM, pemberian izin (kecuali panas bumi), pembinaan dan pengawasan.
  3. Pada Bidang Kelautan sebelumnya juga membagi kewenangan antara Pemerintah Pusat, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, namun kini kewenangan tersebut hanya diberikan kepada Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah Provinsi. Kewenangan Kabupaten/Kota yang hilang diantaranya adalah pelaksanaan kebijakan, penataan ruang laut, pengawasan dan penegakan hukum, koordinasi pengelolaan dan pemanfaatan, dan perizinan (kecuali ijin usaha perikanan).
  4. Pada Bidang Kehutanan yang semula kewenangan di bagi antara Pemerintah Pusat, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, kini hanya diberikan kepada Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah Provinsi. Kewenangan Kabupaten/Kota yang hilang diantaranya adalah inventarisasi hutan, pengelolaan taman hutan, pertimbangan teknis, dan perizinan.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID 19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan, ditetapkannya Peraturan/Keputusan/Edaran setingkat Kementrian yang terdiri dari:

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 39 tahun 2020 tentang Pengutamakan Penggunaan Alokasi Anggaran untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah.
2. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor 119/2813/SJ, Nomor 177/KMK.07/2020 tentang Percepatan Penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dalam rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid 19), serta Pengamanan Daya Beli Masyarakat dan Perekonomian Nasional.
3. Surat Edaran Nomor SE 6/MK.02/2020 tentang Refocussing Kegiatan dan Relokasi Anggaran Kementrian/Lembaga dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covis 19)



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

---

Dampak dari penarikan kewenangan sebagaimana tersebut di atas berimplikasi luas terhadap pelaksanaan pemerintahan daerah antara lain:

1. Aspek Kelembagaan

Pada Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota, perubahan struktur organisasi perangkat daerah merupakan hal yang tidak terelakan sebagai dampak dari penarikan kewenangan tersebut. Meskipun tidak mengubah struktur organisasi perangkat daerah, penambahan kewenangan tersebut berdampak pada perubahan tugas dan fungsi organisasi perangkat daerah dibawahnya.

2. Peraturan Perundang-undangan

Dengan perubahan kewenangan tersebut maka otomatis akan berdampak pada peraturan perundang-undangan di daerah. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota yang memuat kewenangan lama harus segera dicabut. Sedangkan Peraturan Daerah Provinsi yang belum mengakomodir kewenangan baru harus dibuat dan/atau direvisi.

3. Rencana Pembangunan

Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota tentunya telah menyusun rencana pembangunan yang telah ditetapkan sebelum Undang-Undang 23 tahun 2014 berlaku, khususnya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) maupun Rencana Strategis (Renstra) Organisasi Perangkat Daerah. Oleh karena itu, diperlukan beberapa penyesuaian baik Tujuan, Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan, Program, maupun Indikator Kinerja disesuaikan dengan perubahan kewenangan tersebut.



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

### 7.7. PENUTUP

Sebagai penutup Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Makassar dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Penyusunan laporan keuangan Pemerintah Kota Makassar Tahun Anggaran 2020 merupakan hasil konversi dari format menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 ke format Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
- b. Menyangkut kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penyusunan Neraca ini sebagian besar telah mengacu kepada kebijakan akuntansi menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Makassar dan Peraturan Walikota Makassar Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Makassar sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Walikota Makassar Nomor 67 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Walikota Makassar Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Makassar.
- c. Penyusunan Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2020 menggambarkan akun secara umum dan memuat transaksi dalam tahun anggaran ini.
- d. Neraca Daerah ini merupakan bagian berkelanjutan dari Neraca Daerah Tahun Anggaran 2020. Adapun akun-akun neraca yang dijelaskan hanya berkaitan pada pos-pos yang memiliki nilai transaksi dan telah dilakukan komparasi/pembandingan nilai Tahun Anggaran 2020 terhadap Tahun Anggaran 2019 untuk setiap pos-pos akun Neraca Pemerintah Kota Makassar.
- e. Dalam penyusunan Laporan Keuangan ini juga disajikan hasil temuan Tim Audit Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan (BPK-RI) dalam rangka pemeriksaan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sampai dengan Tahun Anggaran 2020.
- f. Diharapkan dengan diterbitkannya Laporan Keuangan ini akan menjadi informasi bagi pihak eksternal yaitu para *stakeholders* dalam memahami laporan keuangan Pemerintah Kota Makassar maupun pihak internal Pemerintah Kota sendiri dalam rangka pengambilan keputusan.

Demikian Laporan Keuangan Pemerintah Kota Makassar Tahun Anggaran 2020 disusun untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Makassar, 17 Mei 2021

**Walikota Makassar**

**MOH. RAMDHAN POMANTO**